



LAPORAN KINERJA 2022

POLDA LAMPUNG

Bandar Lampung, 17 Februari 2023



LAPORAN KINERJA 2022

POLDA LAMPUNG

Bandar Lampung, 17 Februari 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DOKUMEN LAPORAN KINERJA POLDA LAMPUNG T.A. 2022

Kami telah mereviu Dokumen Laporan Kinerja Polda Lampung T.A. 2022 sesuai pedoman reviu atas dokumen dimaksud. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Polda Lampung T.A. 2022 menjadi tanggung jawab manajemen Polri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap Laporan Kinerja Polda Lampung T.A. 2022 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja Polda Lampung T.A. 2022 ini.

Lampung Selatan, 14 Februari 2023
IRWASDA POLDA LAMPUNG



SUSTRI BAGUS SETIAWAN, S.Sos., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65080665

DAFTAR ISI

	HAL
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH ITWASDA POLDA LAMPUNG	
BAB I	PENDAHULUAN 1
A.	Umum 1
B.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.	Tugas 3
2.	Fungsi 4
3.	Struktur Organisasi 6
C.	Peran Strategis 6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA 8
A.	Visi 8
B.	Misi 8
C.	Tujuan 9
D.	Sasaran Prioritas 9
E.	Sasaran Strategis 10
F.	Penetapan Kinerja Poldal Lampung T.A. 2021 12
G.	Anggaran DIPA T.A. 2021 13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 17
A.	Capaian Kinerja Poldal Lampung 17
B.	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 18
0.	Sasaran Strategis <i>Impack</i> 18
1.	Sasaran Strategis Pertama 24
2.	Sasaran Strategis Kedua 32
3.	Sasaran Strategis Ketiga 38
4.	Sasaran Strategis Keempat 43
5.	Sasaran Strategis Kelima 56
C.	Realisasi Anggaran 83
D.	Regulasi dan Kelembagaan 89
BAB IV	PENUTUP 93
A.	Kesimpulan 93
B.	Saran 97

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2022.
2. Kep Kapolda Lampung Nomor : Kep/467/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal penetapan IKU di lingkungan Polda Lampung 2020-2024.
3. Penghargaan yang diperoleh Satker Polda Lampung T.A. 2022.

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1.	Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2022	13
2.	<i>Dashboard</i> Nilai NPSS Polda Lampung Tahun 2022	17
3.	NPSS Polda Lampung Tahun 2019-2022	17
4.	Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2022	18
5.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks keamanan dan ketertiban	19
6.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif	24
7.	Data korban kecelakaan lalu lintas 2021-2022.....	26
8.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks penegakkan hukum	32
9.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel	38
10.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks dukungan sarpras dan peralatan	43
11.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	47
12.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	50
13.	Data mentah penyusun nilai performa satker pada media dan media sosial (10/12)	53
14.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks penguatan implementasi kebijakan	57
15.	Kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, 2022	60
16.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks Tatakelola Kepolisian TAB 2022	62
17.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian	64
18.	Hasil kajian IKM Polda Lampung T.A. 2022	66
19.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase penanganan pengaduan masyarakat	68

NO	JUDUL	HAL
20.	Data dumasam pada satker yang terjadi TAB 2022	71
21.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP persentase Persentase penyelesaian pelanggaran personel	72
22.	Perbandingan kuantitas pelanggaran personel pada tiga tahun terakhir	75
23.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penyelesaian masalah hukum	76
24.	Data jumlah masalah hukum pada satker yang terjadi TAB 2022	79
25.	Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Nilai Kinerja Anggaran	80
26.	Perbandingan nilai kinerja anggaran 2019-2022	82
27.	Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2019-2022	83
28.	Program anggaran Polda Lampung T.A. 2022	83
29.	Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2022	86
30.	Hasil penguatan kelembagaan 2022.....	90
31.	Sasaran Strategis Polda Lampung	93
32.	IKU dan IKP Polda Lampung 2022	94

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024	10
2.	Dinamika indeks kamtibmas tiga tahun terakhir	20
3.	Sebaran kinerja indeks keamanan dan ketertiban T.A. 2022.....	21
4.	Dinamika indeks kamtibmas pada 14 Polres	22
5.	Informasi ekonomi dari BPS, 2022	23
6.	Dinamika indeks harkamtibmas tiga tahun terakhir	25
7.	Perkembangan kontribusi 8 komponen kinerja indeks harkamtibmas dalam tiga tahun terakhir.....	26
8.	Sebaran kinerja indeks harkamtibmas pada daerah hukum Polda Lampung T.A. 2022	28
9.	Dinamika Indeks harkamtibmas pada 14 Polres	29
10.	Perkembangan IKM Provinsi Lampung	30
11.	IPM Lampung Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022	31
12.	Dinamika indeks penegakan hukum tiga tahun terakhir	32
13.	perkembangan kontribusi 6 komponen kinerja indeks gakkum dalam tiga tahun terakhir	33
14.	Dinamika kasus menonjol tiga tahun terakhir.....	34
15.	Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba tiga tahun terakhir	34
16.	Dinamika penanganan kasus laka lantas, 2022	35
17.	Sebaran kinerja indeks penegakan hukum, 2022	35
18.	Dinamika Indeks penegakan hukum pada 14 Polres, 2022	37
19.	Dinamika indeks profesionalitas personel dalam tiga tahun terakhir	39
20.	perkembangan kontribusi 5 komponen kinerja indeks profesiosnalitas personel dalam tiga tahun terakhir	40
21.	Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam tiga tahun	40
22.	Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan tiga tahun terakhir	44
23.	Perkembangan kontribusi 4 komponen kinerja indeks dukungan sarpras dan peralatan dalam tiga tahun terakhir	45

NO	JUDUL	HAL
24.	Perkembangan penambahan gedung/rumdin, 2022	45
25.	Perkembangan penambahan gedung/rumdin, 2022	46
26.	Dinamika indeks SPBE Polda Lampung dalam tiga tahun terakhir	47
27.	Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu	48
28.	Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu	48
29.	Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, 2022	49
30.	Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan tiga tahun terakhir	51
31.	Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan	51
32.	Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri	52
33.	Data nilai performa satker pada media dan medsos (6-8-10/12)	53
34.	Data hasil media monitoring and sentiment analysis, 2022	54
35.	Data hasil survey kepercayaan publik charta politica, 2022	55
36.	Dinamika kinerja indeks penguatan implemenasi kebijakan dalam tiga tahun terakhir	58
37.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan	58
38.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapabilitas organisasi tiga tahun terakhir	58
39.	Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapasitas organisasi tiga tahun terakhir.	60
40.	tujuh prinsip dalam penilaian ITK	61
41.	Timeline kegiatan penilaian ITK	61
42.	Dinamika skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung tiga tahun terakhir	63
43.	Dinamika kinerja komponen indeks kepuasan layanan kepolisian dalam tiga tahun terakhir	65
44.	Dinamika kontribusi satker pada Indeks kepuasan layanan kepolisian tiga tahun terakhir	66
45.	Pencapaian realisasi IKM dibanding target nasional tahun 2022 ...	67
46.	Dinamika kinerja persentase penanganan dumas dalam tiga tahun terakhir	69

NO	JUDUL	HAL
47.	Perbandingan kinerja penanganan dumasana tiga tahun terakhir	69
48.	Perkembangan dumasana dalam tiga tahun terakhir	70
49.	Daerah hukum Polda yang terdapat dumasana, 2022	71
50.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir	73
51.	Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personil dalam tiga tahun terakhir	73
52.	Dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada 14 Polres T.A. 2022	74
53.	Perbandingan kuantitas pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir	75
54.	Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir	77
55.	Perkembangan kontribusi 3 komponen kinerja penyelesaian masalah hukum dalam tiga tahun terakhir	78
56.	Perkembangan jumlah gugatan peradilan selama tiga tahun terakhir	78
57.	Daerah hukum Polda yang terdapat masalah hukum, 2022	79
58.	Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2019-2022.	81
59.	Rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Polri Polda Lampung 2022	87



LAPORAN KINERJA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG T.A. 2022

I. Pendahuluan

A. Umum.

Kepolisian di negara Republik Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban. Saat ini institusi Polri memiliki satuan kewilayahan sebanyak tiga puluh empat kepolisian daerah (Polda), hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu keberadaan Kepolisian Daerah Lampung, memegang peran penting dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di Provinsi Lampung. Hal ini tidak lepas dari eksistensi Polda Lampung dalam mendukung mewujudkan sasaran strategis Polri. Oleh karena itu laporan kinerja Polda Lampung, menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan Polri dalam menjalankan amanat Undang-undang Kepolisian.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Renstra Polda 2020-2024, dan melihat perkembangan lingkungan strategis, terdapat beberapa permasalahan sangat kompleks dan terkait dengan berbagai pemangku kepentingan pada skala lokal kedaerahan, yang berdampak pada situasi keamanan secara nasional, terlebih khusus dalam menghadapi keadaan pasca pandemi *Covid19* menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditambah dengan distorsi orientasi toleransi dan radikalisme. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain secara internal evaluasi terhadap tataran struktur organisasi khususnya tingkat Polres dan Polsek yang dihadapkan pada dinamika situasi lingkungan strategis yang mengalami anomali, sehingga fungsi dan ukuran organisasi perlu adanya penyesuaian, demikian juga pola pikir dan budaya kerja harus optimal berorientasi pada kinerja, implementasi kebijakan organisasi terhadap tuis yang harus prediktif, responsibilitas dan berkeadilan ditunjang dengan

kualitas peningkatan pelayanan kepolisian yang terus dikembangkan dengan memanfaatkan saran TIK, terlebih pelayanan administrasi kepolisian sebagai layanan dasar publik, seperti pada layanan pada SPKT, satpas SKCK, Satpas SIM dan pelayanan bersama satu atap (Samsat).

Sedangkan pada sisi lain secara eksternal, situasi global yang ditandai dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat untuk menyerap informasi dan budaya global tanpa batas. Hal ini lambat laun berdampak pada pola tindak dan perilaku masyarakat dalam memandang tatanan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, ditambah lagi budaya permisif dan mudah dipicunya masyarakat dengan isu yang memancing terjadinya konflik sosial yang bernuansa friksi sosial budaya, SARA, batas wilayah dan sumber daya alam. Kesemuanya itu distimulan oleh tekanan kebutuhan hidup, situasi perekonomian sampai pada timbul persaingan yang tidak sehat, di samping pertambahan jumlah penduduk dan kerusakan alam.

Mengamati *trend* **indeks pembangunan manusia (IPM)**, maka tahun 2022 provinsi Lampung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 70,45 atau tumbuh 0,79% (meningkat 0,55 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Provinsi Lampung kini berada pada status capaian pembangunan manusia "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 2,97 persen atau meningkat 298.000 poin dibanding tahun 2021. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2022 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,74 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,73 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,10 tahun, dari 8,08 tahun menjadi 8,18 tahun pada tahun 2022. Kemudian Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,99 tahun, lebih lama 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Secara umum IPM periode 2021-2022, memberikan indikasi bahwa kondisi masyarakat Lampung mengalami peningkatan dibanding tahun 2020-2021, hal ini dimungkinkan karena kehidupan pasca pandemi covid19 mulai dapat berjalan normal, di mana kesehatan masyarakat terutama keberhasilan dari vaksinasi covid19 pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih dari 70% penduduknya sudah mendapat vaksin booster ke 3-4, di samping pola menerapkan protokol kesehatan sudah menjadi kebiasaan pada kegiatan masyarakat. Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2022 tumbuh sebesar 4,28 persen, menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77

persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen.

Dari fakta situasional tersebut, maka aktualisasi tupoksi Polri baik pelayanan administrasi kepolisian, maupun tindakan operasional kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif dan penegakan hukum, Polda Lampung berupaya untuk menjaga kestabilan dalam pembangunan di Provinsi Lampung khususnya kontribusi terhadap mempertahankan dan meningkatkan sektor perekonomian. Memberikan *stressing* pada pemantauan perilaku pelaku ekonomi yang erat kaitannya dengan laju inflasi yang terjadi. Selanjutnya untuk menghadapi pembangunan berikutnya pada tahun 2023 dalam Renstra 2020-2024, maka Polda Lampung sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menuju Polri yang presisi dengan transformasi pada empat bidang mulai dari organisasi, operasional, pelayanan dan pengawasan, hal ini sebagai upaya yang terus menerus meningkatkan performa kinerja, guna memenuhi ekspektasi masyarakat. Terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan dan beragam keinginan masyarakat, khususnya dalam peningkatan pemeliharaan kamtibmas, peningkatan pelayanan kepolisian dan optimalisasi penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Polda Lampung untuk terus melakukan instropeksi, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan organisasi yang tepat dan memperkuat fungsi pengawasan, guna memantapkan jati diri Polri yang seutuhnya. Selanjutnya dengan disajikannya Laporan Kinerja Polda Lampung ini, menjadi representasi dari wujud pertanggungjawaban kinerja dari segenap personel Kepolisian Daerah Lampung pada tahun anggaran 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, di mana dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi kepolisian daerah, dan struktur organisasi Polda Lampung sebagai berikut :

1. Tugas

Tugas pokok Polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;

- b) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- c) menegakan hukum.

Selanjutnya Kepolisian Daerah sebagaimana Perpol Nomor 14 Tahun 2018 adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut :

- a) Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun di bidang represif.
- b) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang undangan lainnya.
- c) Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh alat/badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas berdasarkan undang-undang.
- d) Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengemban system kamtibmas yang bersifat Swakarsa.
- e) Melakukan tugas-tugas lain yang diemban oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Fungsi

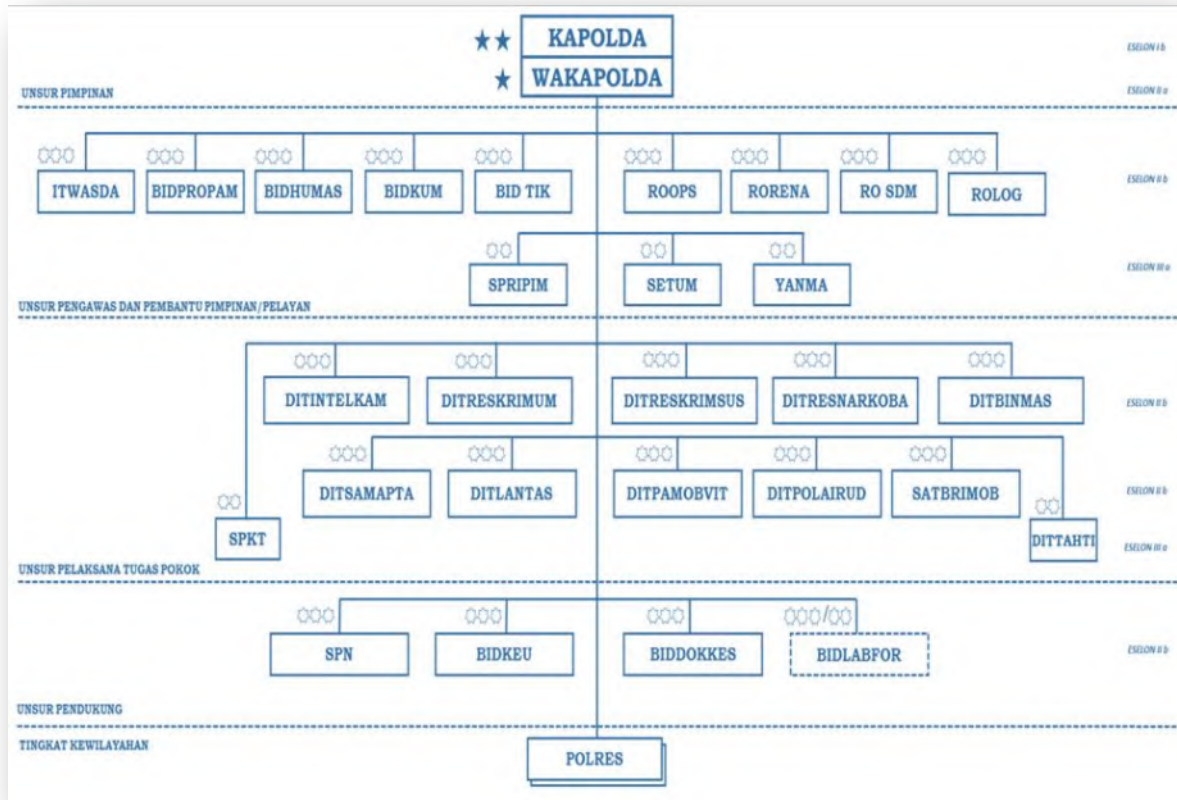
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perpol Nomor 14 Tahun 2018, maka Polda Lampung menyelenggarakan fungsi kepolisian sebagai berikut :

- a) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d) pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e) pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- f) pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue
- g) (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- h) pembinaan masyarakat, yang meliputi perpolisian masyarakat (polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

- i) pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi Polda Lampung



C. Peran Strategis.

Polda Lampung memiliki peran yang strategis dalam mendukung tugas fungsi institusi Polri, yakni sebagai satuan kewilayahan di pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang lalu lintas angkutan manusia, barang dan jasa dari dan antar Pulau Jawa-Sumatera, secara spesifik peran ini terkait dengan tugas mengawal, memelihara dan menjaga situasi kamtibmas mulai dari perjalanan angkutan manusia, barang dan jasa sepanjang melewati daerah hukum Polda Lampung. Tentunya dalam pelaksanaan tugas ini Polda Lampung memberikan kontribusi dalam merumuskan, mengkoordinasikan dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas kepolisian di daerah hukum Polda Lampung dan jajaran satuan kewilayahan yang terdiri dari satu Polresta, dan empat belas Polres, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tugas dalam menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis, karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan kewilayahan dalam mendukung institusi Polri dengan merealisasikan berbagai petunjuk dan arahan pelaksanaan tupoksi preemtif, preventif dan penegakan hukum di daerah hukum Polda Lampung. Oleh karena itu dalam menyiapkan

kebijakan dan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan kebijakan akan memiliki dampak yang besar bagi kegagalan pelaksanaan tugas sebagai mana tersebut di atas.

Sedangkan dalam perjalanan tupoksi tersebut berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta tidak kalah pentingnya adalah kualitas keberhasilan dari kebijakan kewilayahan tersebut dapat optimal diimplementasikan oleh semua satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di daerah Lampung harus mampu berperan optimal sebagai penggerak (*trigger mechanism*).

II. Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Polda Lampung tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polda Lampung merupakan bagian dari Polri sebagai institusi yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus meningkatkan sinegitas dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polda Lampung, guna mewujudkan personel Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi yang berkeadilan dalam melaksanakan tupoksi, dengan menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal, yang diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi

“Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib.”

Visi tersebut diatas merupakan turunan dari Visi Polri dan dioperasionalkan melalui penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut, mengandung makna:

- Daerah hukum Polda Lampung sebagai bagian wilayah negara Indonesia yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- Daerah hukum Polda Lampung sebagai wilayah negara Indonesia yang tertib.

B. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang telah diamanat UU Polri dan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK satuan kewilayahan tingkat Polda dan Perkap Nomor 12 Tahun 2017 tentang syarat dan tatacara pembagian daerah hukum Polri, serta penjabaran dari misi dan tujuan dari Renstra Polri 2020-2024, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi Polda Lampung yaitu:

- **Melindungi**, yakni:
Meningkatkan upaya pencegahan dari gangguan kamtibmas, guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat, pemerintah dan segenap sumber daya provinsi Lampung yang terbebas dari gangguan kamtibmas.

- **Mengayomi**, yakni:
Memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat Lampung dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya dukung dan kerja sama untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas.
- **Melayani**, yakni:
membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan kepolisian, baik dalam penegakan hukum maupun layanan dasar publik secara profesional dan berkeadilan.

Melindungi diartikan sebagai tanggung jawab preventif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Polda Lampung dalam memperkuat Polri (satuan induk) dalam melakukan pencegahan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban. **Mengayomi** diartikan sebagai tanggung jawab preemtif bahwa pengelolaan sumber daya Polda Lampung sebesar-besarnya untuk mewujudkan perlindungan pengayoman dan pelayanan dalam kehidupan masyarakat, dengan dukungan kesadaran hukum yang partisipatif. Maka dengan misi ini Polda Lampung berharap senantiasa memberikan perhatian penuh kepada seluruh *stakeholder*, mulai dari komunitas/pranata sosial masyarakat, instansi pemerintahan, dunia usaha, dan segenap sumber daya kehidupan yang ada. **Melayani** diartikan baik sebagai aparatur pengelola penegakan hukum yang berprinsip azas legalitas dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan pedoman hidup Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah bagi jati diri Polri untuk kepentingan bersama

C. Tujuan

Menjabarkan misi Polri menjadi tujuan Polda Lampung, maka tujuan Polda Lampung adalah:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum secara berkeadilan;
3. Mewujudkan Polda Lampung yang profesional.
4. Modernisasi pelayanan Polda Lampung.
5. Menerapkan manajemen yang terintegrasi dan terpercaya.

D. Sasaran Prioritas

1. Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas

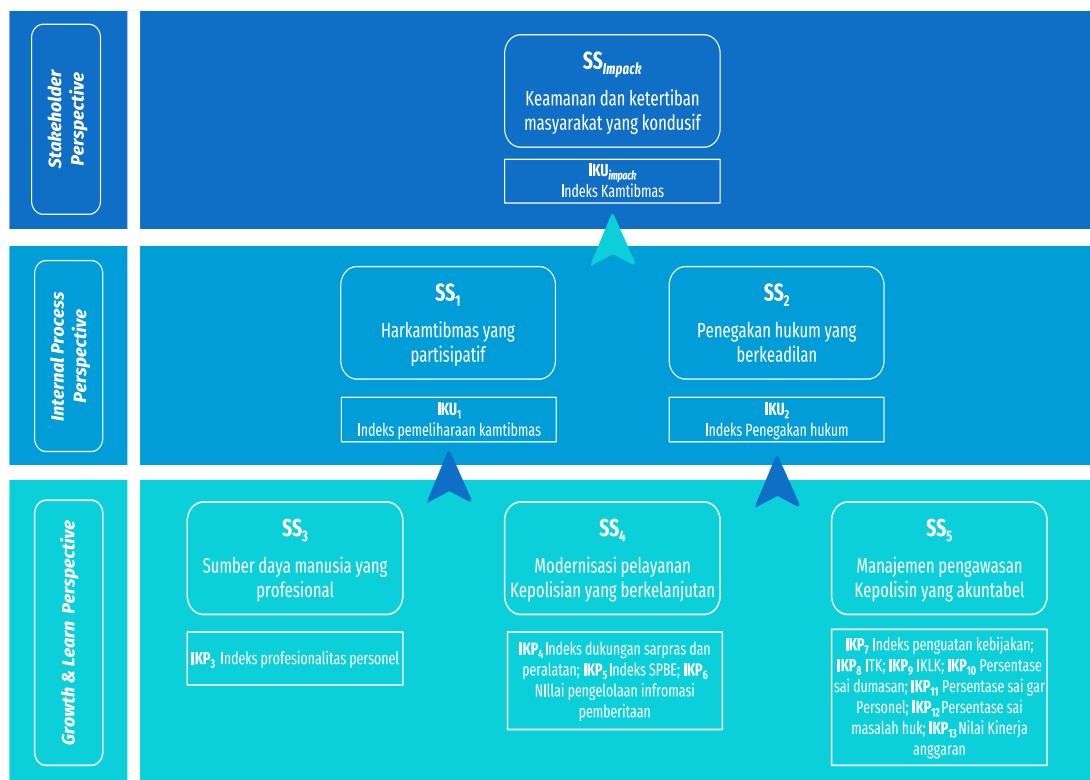
dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial;

2. Mengoptimalkan Pelayanan publik Polri;
3. Penegakkan hukum secara berkeadilan dan terpercaya;
4. Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
5. Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
6. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya;

E. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Polda Lampung sesuai dengan Kep Kapolda Lampung Nomor: Kep/464/IV/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Renstra Polda Polda Lampung 2020-2024, menggunakan pendekatan metode *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yakni *stakeholder perspective*, *customers prespective*, *internal process perspective* dan *innovation perspective* yang tergambar dalam peta strategis renstra Polda Lampung 2020-2024 sebagai berikut;

Gambar 1. Peta Strategi Polda Lampung tahun 2020-2024



Mengait dengan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Polda Lampung saling terkait satu dengan yang lainnya, untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Polri yang selaras dengan *Grand Strategi* Polri. Sasaran strategis (SS) Polda Lampung yang merupakan rumusan kalimat

pernyataan yang menggambarkan pernyataannya singkat, jelas dan mudah dipahami; merupakan sasaran-sasaran yang bersifat penting dan prioritas tinggi pada Renstra 2020-2024, merupakan kalimat pernyataan kondisional dan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif.

Peta Strategi yang telah disusun ini menggambarkan juga hubungan sebab akibat antar perspektif. **Pengecekan hubungan sebab akibat pencapaian SS pada satu perspektif mendukung pencapaian SS pada perspektif di atasnya, dilakukan dengan membaca dari bawah ke atas, yakni perspektif *growth and learn* harus menjawab "apa yang harus dimiliki Polda Lampung", perspektif *internal process* harus menjawab "apa yang harus dilakukan/dikerjakan Polda Lampung untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan keadilan masyarakat Lampung", dan perspektif *stakeholders* harus menjawab "apa yang diharapkan masyarakat dan negara, dalam hal ini masyarakat dan pemerintahan provinsi Lampung atas eksistensi Polda Lampung"**

Selanjutnya dalam SS tersebut tersusun atas indikator-indikator kinerja yang dipilih secara tepat, jelas dan terukur, yang menggambarkan pencapaian keberhasilan dari misi dan tujuan Polda Lampung melalui metodologi *Balance scorecard*. Pada metodologi *Balance scorecard* tersebut terbagi dalam dua jenis indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung/penunjang (IKP). Kemudian sasaran strategis pada tiga perspektif pada Peta Strategi Polda Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*: Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memenuhi harapan *stakeholder* atau Bagaimana Polda Lampung berorientasi pada ekspektasi masyarakat dan pemerintahan. Pada perspektif ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu:

(SS-*impack*) keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, dengan satu indikator kinerja *impack* "Indeks keamanan dan ketertiban".

2. *Internal Process Perspective*: Sudut pandang organisasi yang berfokus pada rangkaian proses tupoksi yang dikerjakan untuk memenuhi keinginan, baik dari pihak eksternal (masyarakat dan pemerintah) dan internal yang terkait langsung atas pelaksanaan tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung. dalam memelihara kamtibmas dan penegakan hukum. Pada perspektif ini terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

(SS1) pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif, dengan satu indikator kinerja, dengan indikator kinerja utama "Indeks harkamtibmas".

(SS2) penegakan hukum yang berkeadilan, dengan satu indikator

kinerja utama yaitu “Indeks penegakan hukum”.

3. *Learned and growth Perspective*: yakni sudut pandang Polda Lampung yang berfokus rangkaian proses pengelolaan kondisi sumber daya internal yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh Polda Lampung untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* yang sesuai dengan keinginan dan harapan baik dari *internal process* maupun *stakeholder* melalui pengembangan dan pembangunan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Pada perspektif ini terdiri dari tiga sasaran strategis yaitu:

(SS3) **sumber daya manusia yang profesional**”, dengan Indikator Kinerja Pendukung yakni; “**Indeks profesionalitas personel**”.

(SS4) **Modernisasi pelayanan Kepolisian yang berkelanjutan**, dengan tiga indikator kinerja pendukung yaitu;

- a) Indeks dukungan sarpras dan peralatan, .
- b) Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- c) Nilai pengelolaan informasi pemberitaan.

(SS5) **Manajemen pengawasan kepolisian akuntabel**, dengan tujuh indikator kinerja pendukung yaitu:

- a) indeks penguatan implementasi kebijakan;
- b) Indeks Tatakelola Kepolisian;
- c) Indeks kepuasan layanan Kepolisian.
- d) Persentase penyelesaian dumas;
- e) Persentase penyelesaian pelanggaran personel;
- f) Persentase penyelesaian masalah hukum.
- g) Nilai kinerja anggaran.

F. Penetapan Kinerja Polda Lampung T.A. 2022

Perjanjian Kinerja Polda merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kapolri tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Polri. Hal ini merupakan tekad dan janji akan dicapai antar pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja Polda Lampung T.A. 2021 secara terperinci:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polda Lampung T.A. 2022.

Kode SS/IKU/IKP	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Pendukung	Satuan	Polarisasi	Target 2022
<i>Stakeholder Perspective</i>				
SS _{impact}	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.			
IKU _{impact}	Indeks keamanan dan ketertiban	indeks	maximize	3,3
<i>Internal Process Perspective</i>				
SS ₁	Harkamtibmas yang partisipatif.			
IKU ₁	Indeks pemeliharaan kamtibmas	indeks	maximize	73
SS ₂	Penegakan hukum yang berkeadilan			
IKU ₂	Indeks penegakan hukum.	indeks	maximize	68
<i>Learned and growth Perspective</i>				
SS ₃	Sumber daya manusia yang profesional.			
IKP ₃	Indeks profesionalitas personel.	indeks	maximize	75
SS ₄	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan			
IKP ₄	Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	indeks	maximize	70,5
IKP ₅	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	indeks	maximize	2,3
IKP ₆	Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	indeks	maximize	52
SS ₅	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel			
IKP ₇	Indeks penguatan implementasi kebijakan.	indeks	maximize	73
IKP ₈	Indeks Tatakelola Kepolisian.	indeks	maximize	5,3
IKP ₉	Indek kepuasan layanan kepolisian.	indeks	maximize	81
IKP ₁₀	Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	persentase	maximize	67
IKP ₁₁	Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	persentase	maximize	83
IKP ₁₂	Persentase penyelesaian masalah hukum.	persentase	maximize	91,6
IKP ₁₃	Nilai kinerja anggaran.	indeks	maximize	76

Sumber : dokumen Rencana Kerja Polda Lampung T.A. 2022.

G. Anggaran DIPA T.A. 2022

Target Polda Lampung yang hendak dicapai pada T.A. 2022 merupakan target tahun ke-tiga dari Renstra Polda Lampung 2020-2024. Adapun jumlah anggaran yang tersedia untuk Polda Lampung menurut **DIPA T.A. 2022 adalah sebesar Rp.1.276.370.236.000,-** (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juga dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Anggaran tersebut terdiri dari atas 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Profesionalisme SDM Polri.
 - a) Tujuan: Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi.

- b) Kegiatan meliputi:
 - (1) dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri;
 - (2) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
 - (3) pengendalian pegawai Polri;
 - (4) pembinaan karier personel Polri;
 - (5) pelayanan psikologi anggota Polri.

2. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

- a) Tujuan: Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui penegakkan hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak asasi manusia;
- b) Kegiatan:
 - (1) penindakan tindak pidana perairan;
 - (2) penindakan tindak pidana lakalantas
 - (3) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - (4) penindakan tindak pidana umum;
 - (5) penindakan tindak pidana narkoba ;
 - (6) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
 - (7) penindakan tindak pidana korupsi;
 - (8) penindakan tindak pidana siber;
 - (9) penindakan tindak pidana tertentu;
 - (10) koordinasi dan pengawasan PPNS;
 - (11) pengawasan penyidikan.

3. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

- a) Tujuan: terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;
- b) Kegiatan:
 - (1) pengembangan peralatan Polri;
 - (2) dukungan manajemen dan teknik Sarpras;

(3) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri.

4. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

- a) Tujuan: terpelihara Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta integrasi lintas sektoral yang fokus pelaksanaan tugas fungsi preemtif dan preventif;
- b) Kegiatan:
- (1) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (2) analisis keamanan;
 - (3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
 - (4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
 - (5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
 - (6) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara.
 - (7) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
 - (8) kerjasama keamanan dan ketertiban K/L;
 - (9) pembinaan potensi keamanan;
 - (10) pembinaan pelayanan fungsi sabhara;
 - (11) penyelenggaraan pengamanan objek vital ;
 - (12) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalulintas ;
 - (13) penyelenggaraan kepolisian perairan;
 - (14) pengendalian operasi Kepolisian;
 - (15) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
 - (16) penanggulangan keamanan dalam negeri.

5. Program Dukungan Manajemen.

- a) Tujuan: terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian , sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan

anggaran dan integrasi lintas sektor.

- b) Kegiatan meliputi:
- (1) pelayanan administrasi keuangan Polri;
 - (2) penerangan masyarakat;
 - (3) penyelenggaraan teknologi informasi;
 - (4) pelayanan kesehatan Polri;
 - (5) dukungan pelayanan internal perkantoran polri;
 - (6) pengelolaan multimedia;
 - (7) penyusunan kebijakan Polri;
 - (8) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri;
 - (9) reformasi birokrasi Polri;
 - (10) manajemen anggaran;
 - (11) pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - (12) pertanggungjawaban profesi;
 - (13) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
 - (14) penegakkan tatatertib dan disiplin Polri;
 - (15) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
 - (16) pemberian bantuan dan nasehat hukum;
 - (17) penyusunan dan penyuluhan hukum.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Polda Lampung.

Akuntabilitas kinerja Polda Lampung merupakan kinerja secara kolektif yang diperoleh dari tiga puluh sembilan satuan kerja, dengan didasari atas Perjanjian Kinerja pada seluruh level satuan kerja yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sehingga diperoleh capaian kinerja Polda Lampung Tahun 2022 sebagai berikut ini:

Tabel 2. Dashboard Nilai Pencapaian sasaran strategis (NPSS) Polda Lampung 2022

Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS ¹	Skors NSS	NKP	Status NKP
Stakeholder	33,33%	SS0	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	1	120,00%		120,00%	40,00%	
Internal Proses	33,33%	SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	1	107,26%		113,63%	37,87%	
		SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	1	120,00%				
Learn and growth	33,33%	SS3	Sumber daya manusia yang profesional	1	98,14%		107,00%	35,66%	
		SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan	3	113,91%				
		SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	7	108,94%				
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis							113,53%		

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Polda Lampung selama tiga tahun terakhir dari 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 3. NPSS Polda Lampung 2019-2022

No	Kinerja	Tahun				Kenaikan 2021 Ke 2022
		2019	2020	2021	2022	
1.	NPSS	112,31%	114,60%	117,85%	113,53%	-3,67%
2.	Stakeholder Perspective	27,54%	39,99%	40,00%	40,00%	Stabil
3.	Internal Perspective	26,96%	36,82%	40,00%	37,87%	-5,33%
4.	Learned & growth Perspective	29,10%	37,79%	37,86%	35,66%	-5,81%

NPSS tahun 2022 sebesar 113,53%, hal ini lebih rendah dibandingkan NPSS tahun 2021, selanjutnya nilai perspektif *stakeholders* 2022 juga turun sebesar 3,67%, dibanding 2021, untuk perspektif *internal process* 2022 stabil, dan Perspektif *learned & growth* mengalami penurunan sebesar 5,81% dari tahun 2021. Secara terperinci capaian indikator kinerja Utama pada masing-masing Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Status NSS dan Status NKP adalah status yang menunjukkan ekspektasi dari pencapaian dari NSS dan NKP, yang dibagi dalam tiga warna status sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

Tabel 4. Capaian Kinerja Polda Lampung T.A. 2022

Kode SS/IKU/ IKP	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Pendukung	Satuan	Polarisasi	Target 2022	Realisasi	% Realisasi capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>						
SS.impact	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.					
IKU.impact	Indeks keamanan dan ketertiban	indeks	maximize	3,3	4,21	120%
<i>Internal Process Perspective</i>						
SS.1	Harkamtibmas yang partisipatif.					
IKU.1	Indeks pemeliharaan kamtibmas	indeks	maximize	73	78,30	107,26%
SS.2	Penegakan hukum yang berkeadilan					
IKU.2	Indeks penegakan hukum.	indeks	maximize	68	91,83	120,00%
<i>Learned and growth Perspective</i>						
SS.3	Sumber daya manusia yang profesional.					
IKP.3	Indeks profesionalitas personel.	indeks	maximize	75	73,60	98,14%
SS.4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan					
IKP.4	Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	indeks	maximize	70,5	85,81	120,00%
IKP.5	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	indeks	maximize	2,3	2,34	101,74%
IKP.6	Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	indeks	maximize	52	71,20	120,00%
SS.5	Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel					
IKP.7	Indeks penguatan implementasi kebijakan.	indeks	maximize	73	77,70%	106,44%
IKP.8	Indeks Tatakelola Kepolisian.	indeks	maximize	5,3	5,44	102,63%
IKP.9	Indek kepuasan layanan kepolisian.	indeks	maximize	81	87,40	107,90%
IKP.10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	persentase	maximize	67	99,08%	120,00%
IKP.11	Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	persentase	maximize	83	98,54%	118,71%
IKP.12	Persentase penyelesaian masalah hukum.	persentase	maximize	91,6	86,67%	94,61%
IKP.13	Nilai kinerja anggaran.	indeks	maximize	76	85,32	112,26%

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Analisa dan evaluasi capai kinerja dari masing-masing sasaran strategis pada setiap perspektif menggambarkan penjelasan dari keberhasilan maupun kendala kegagalan sebagaimana yang telah ditargetkan dalam pernyataan perjanjian kinerja T.A. 2022, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Stakeholder Perspective

0. Sasaran Strategis (SS-Impack) :

Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Sasaran Strategis (SS-Impack) Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, memiliki satu IKU (indikator kinerja utama) yakni Indeks keamanan dan ketertiban, yang merupakan sasaran dampak dari sasaran strategis pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang partisipatif dan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagai mana amanat Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 2, 4, 5 dan 13 yang

menunjukkan suatu situasi keamanan dimana masyarakat terjaga, terawat, terpelihara, selamat, terhindar dari mara bahaya serta tingkat terlindunginya masyarakat dari berbagai macam ancaman keamanan, perasaan aman nyaman masyarakat secara psikis dengan keberadaan atau kehadiran peran Polri di tengah masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung memberikan perhatian penuh pada *perspektif stakeholder* ini.

IKU 0 - Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat.

Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat² adalah suatu ukuran dalam mengelola situasi keamanan dan ketertiban yang disepakati Polri, guna mewujudkan situasi yang kondusif, nilai indeks ini diperoleh dari nilai komposit yang dihasilkan dari dampak keseluruhan tupoksi kepolisian berdasarkan dimensi harkamtibmas dan dan penegakan hukum. Kinerja ini bermanfaat baik bagi *stakeholder* internal sebagai masukan dalam meningkatkan aktualisasi tupoksi maupun bagi *stakeholder* eksternal dalam mendukung pembangunan di daerah Lampung. Adapun analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks keamanan dan ketertiban.

SS _{impack} Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.										
IKU _{impack} Indeks keamanan dan ketertiban.										
Realisasi			Tahun 2022			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
3,00	3,75	4,69	4,21	3,30	120%	-10,17%	3,40	120%	3,50	120%

Apabila dilihat dari realisasi TAB, maka capaian kinerja Polda Lampung yang berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polda Lampung yang diukur secara kuantitatif melalui Indikator kinerja utama *impack* (**IKU-*impack* Indeks keamanan dan ketertiban**), maka target TAB 2022 dapat tercapai dengan besaran 120%. Selanjutnya realisasi kinerja ini apabila dibandingkan dengan TAB-1, mengalami penurunan sebesar 10,17%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 maka capaian kinerjanya masih di atas 100%. Artinya **IKU-*impack*** yang tersusun atas nilai komposit IKU1 indeks harkatibmas dan IKU2 indeks penegakan hukum berhasil dengan gemilang dalam mencapai target kinerja sasaran strategis dampak Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang telah ditarget dalam Renstra 2020-2024 pada tahun ke-3 ini.

² Indeks kamtibmas berdasarkan Keputusan Kapolri No: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2022 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024, hal. 34.

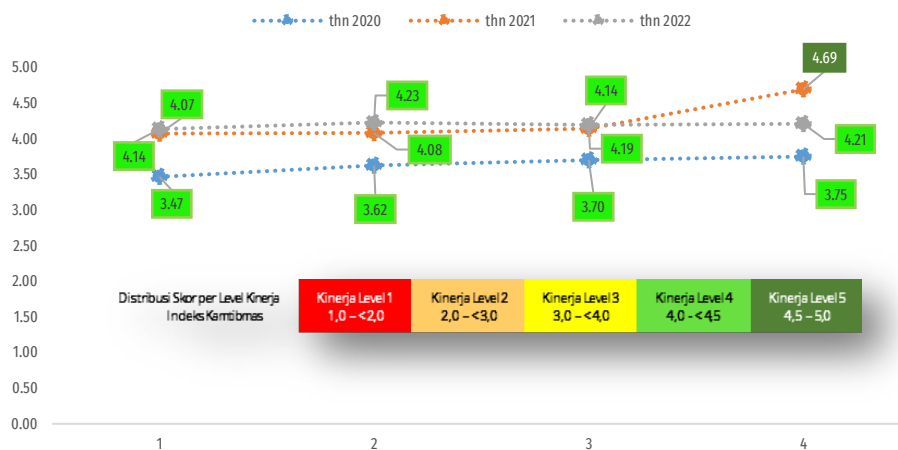
Keberhasilan pengelolaan situasi keamanan dan ketertiban ini, tentunya didukung oleh kiprah dari seluruh sumber daya satuan kepolisian di lingkungan Polda Lampung, dalam melaksanakan tupoksi dan kegiatan operasional kepolisian, baik preemtif, preventif dan penegakan hukum yang dihadapkan pada tantangan lingkungan strategis yang terjadi pada TAB. Hal ini juga memberi dampak positif bagi keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan

pemerintahan daerah Lampung, khususnya ditandai dengan apresiasi dari *stakeholder* kepada Polda Lampung dan jajaran.

Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks kamtibmas dalam triwulan selama tiga tahun terakhir ini sebagai berikut:

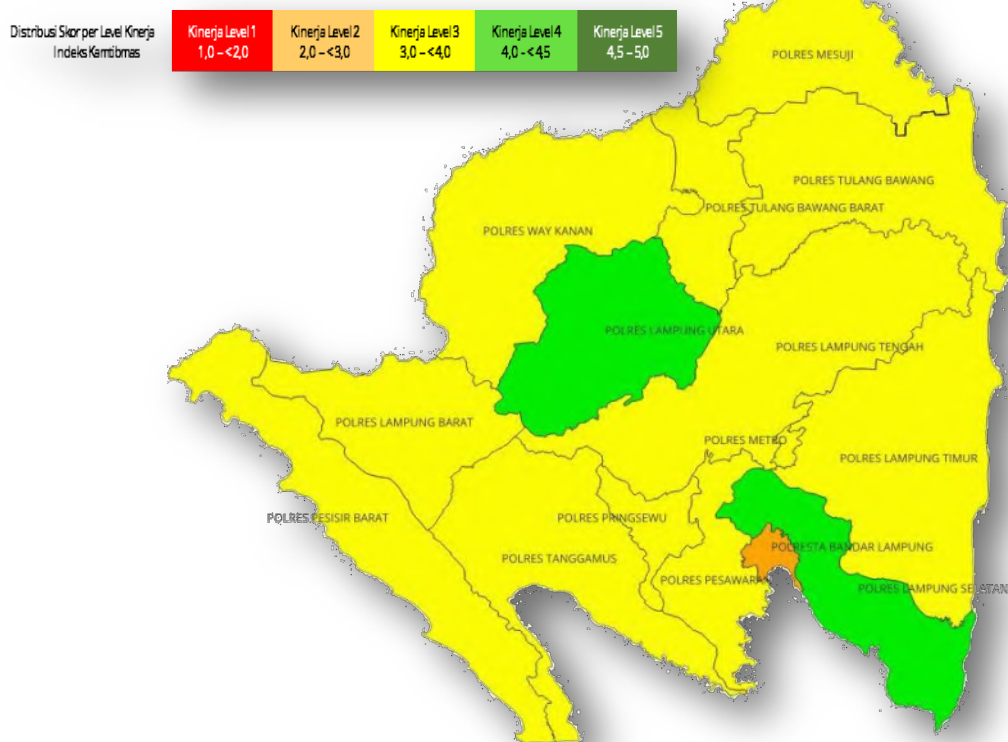
"Penghargaan dan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah hukum Polda Lampung. penghargaan dan apresiasi dari Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto atas penyelesaian Target Operasi Kejahatan Pertanahan selama 2022 di Wilayah Provinsi Lampung. Penghargaan dan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Lampung berupa anugerah keterbukaan informasi badan publik Tahun 2022. Penghargaan dari Gubernur Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/VI.08/HK/2022 tentang pemberian penghargaan Kepada Personil Kepolisian Daerah Lampung, Direktorat Jenderal Beacukai Sumatera Bagian Barat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, atas kerjasama dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Lampung. Penghargaan dari Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI) Lampung atas keberhasilan dan peran aktif dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung. Penghargaan/apresiasi dari ASDP Indonesia Ferry, atas keberhasilan Polda Lampung pada pelaksanaan pengamanan angkutan Lebaran Tahun 2022."

Gambar 2. Dinamika indeks kamtibmas tiga tahun terakhir



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks kamtibmas setiap triwulan berada pada level kinerja 4-4,69 yaitu pada rentang level kinerja 4-5 pada skala *likert* 1-5. Keberhasilan dari kinerja ini, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, dimensi harkamtibmas dan penegakan hukum yang diselenggarakan Polda Lampung dan jajaran secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam mengenai sebaran kondusivitas keamanan dan ketertiban, bersama ini disajikan peta situasi kamtibmas TAB 2022 dengan ilustrasi spektrum warna pada daerah hukum satuan Polres jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

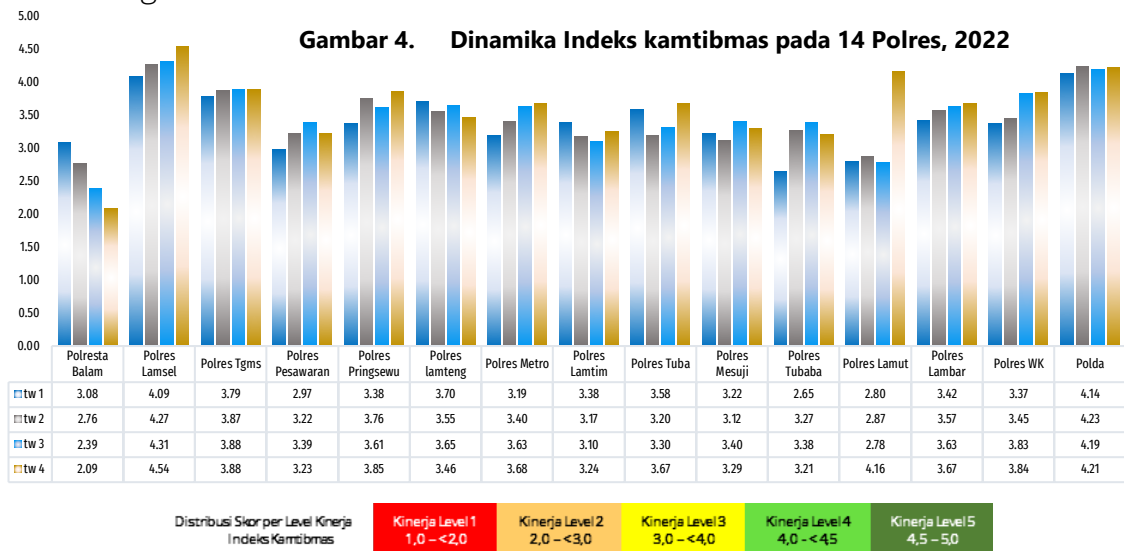
Gambar 3. Sebaran kinerja indeks keamanan dan ketertiban T.A. 2022.



Terlihat umum daerah hukum Polda Lampung berwarna kuning, menunjukkan berada pada level kinerja 3, artinya indeks keamanan dan ketertiban pada 14 satuan kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung berada pada kisaran angka indeks 3,0-4,0. Nampak Polres Lampung Utara dan Lampung Selatan sudah mencapai kinerja level 4. Sementara itu Polresta Bandar Lampung berada pada spektrum warna oranye/nila, yang menunjukkan level kinerja antara level 2-3.

Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap **keberhasilan** dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini adalah keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan dimensi harkamtibmas yang meliputi delapan komponen pendukung mulai dari pengelolaan kamseltibcar lintas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamseltibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung

untuk mengoptimalkan sinergit Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung **IKU-impact** ini, dapat dijelaskan pada **IKU-1 dan IKU-2** dalam LKIP ini. Tetapi untuk mengetahui sampai sejauh mana analisis perkembangan indeks keamanan dan ketertiban setiap triwulan pada 14 satuan Polres sebagai berikut:



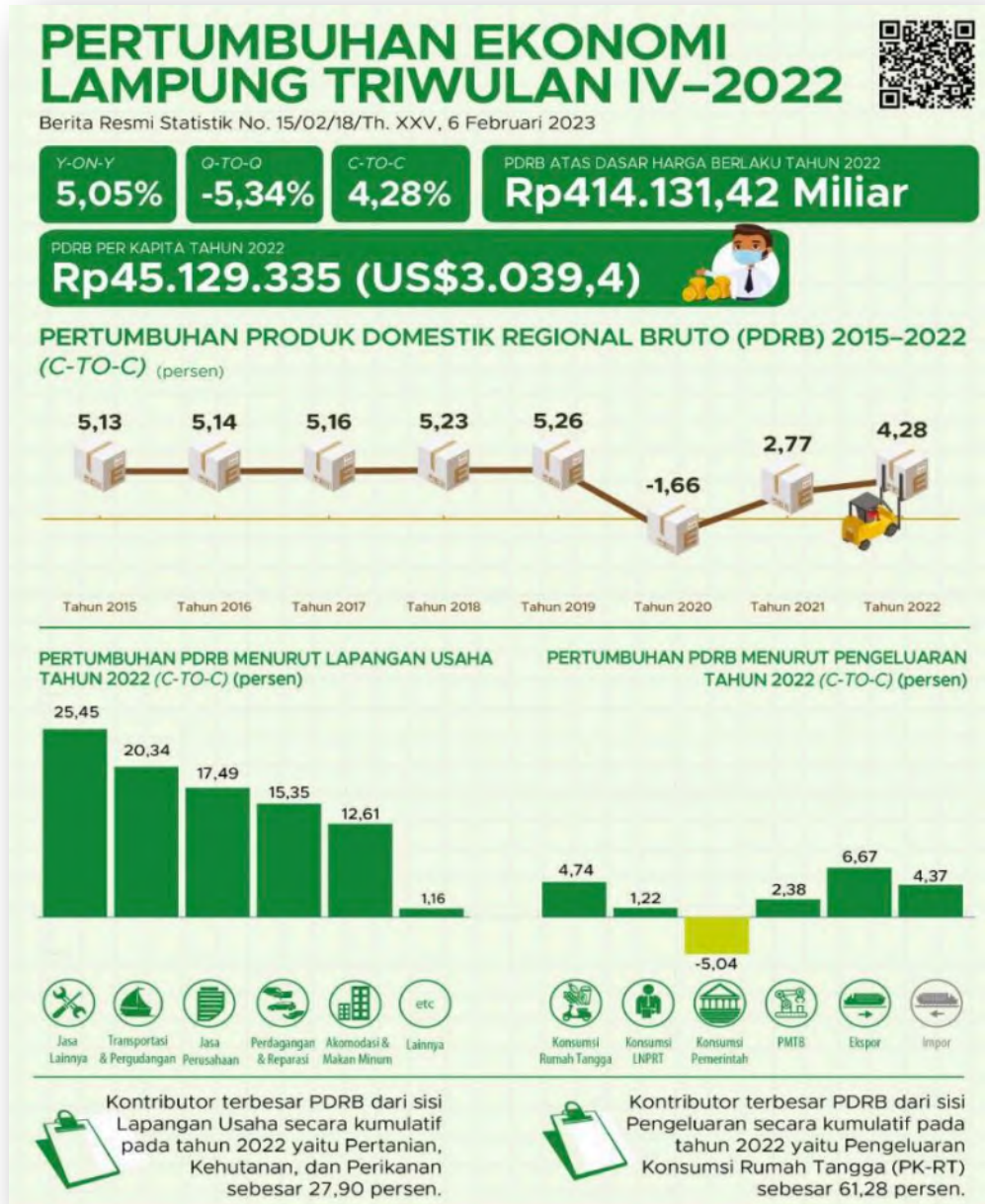
Dari 14 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat empat daerah hukum Polres yang berada pada **kinerja level 2 yakni Polresta Bandar Lampung, Polres Pesawaran, Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara**, sedangkan **Polres lainnya masing-masing pada kinerja level 3**. Memasuki **triwulan II Polresta Bandar Lampung berada pada kinerja level 2**, sedangkan Polres lainnya berada pada kinerja level 3 dan 4. Pada **triwulan III Polresta Bandar Lampung masih berada pada level 2 diikuti Polres Lampung Utara**, sedangkan yang lainnya pada kinerja level 3. Memasuki **kinerja triwulan IV kembali kinerja Polresta Bandar Lampung masih pada kinerja level 2**, sedangkan 13 Polres lainnya berada pada kinerja level 3 dan 4.

Secara umum mengakhiri tahun 2022, situasi kamtibmas di daerah hukum Polda Lampung kondusif, menunjukkan kontribusi positif baik terhadap pencapaian target indeks kamtibmas Polda Lampung maupun institusi Polri pada umumnya. Sebagai **evidence** keadaan dari situasi kamtibmas yang kondusif ini, maka sejurus dengan itu keadaan ekonomi di Provinsi Lampung, menurut data yang dilansir dari laman BPS³ diperoleh keterangan bahwa **menguatnya ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 telah tumbuh sebesar 4,28%, menguat dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77%. Kemudian ekonomi**

³ Berita resmi statistik BPS Provinsi Lampung No. 15/02/18/Th. XXV, 6 Februari 2023, yang diunduh melalui laman BPS <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/1124/pertumbuhan-ekonomi-provinsi-lampung-triwulan-iv-2022.html>

Provinsi Lampung triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sampai dengan sebesar 30,92%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88%. Sebagaimana infografis di bawah ini:

Gambar 5. Informasi ekonomi dari BPS, 2022



Mengakhiri tahun ke-tiga dari Renstra 2020-2024, Polda Lampung dan jajaran telah mengimplementasi amanat visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan ukuran **capaian Indeks kamtibmas melebihi target nasional 3,3 yang ditutup pada level indeks 4,2 sehingga capaian kinerja keamanan dan ketertiban masyarakat TAB 2022 adalah sebesar 120%.**

Internal Process Perspective

1. Sasaran Strategis (SS1) : Harkamtibmas yang partisipatif.

Sasaran Strategis (SS1) Harkamtibmas yang partisipatif, memiliki satu IKU yaitu Indeks pemeliharaan kamtibmas, sasaran kinerja ini merupakan sasaran yang ingin dihasilkan oleh Polda Lampung dalam menciptakan kondusivitas daerah hukumnya melalui pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif sepanjang Renstra 2020-2024 melalui pendekatan kamseltibcar lalu lintas, kegiatan *community policing*, pemenuhan kegiatan patroli, termasuk kegiatan harkamtibmas perairan yang khas, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, pengeolaan antisipasi potensi gangguan, pelayanan pengamanan objek vital dan pengelolaan tingkat kriminalitas pada 10.000 penduduk. Selanjutnya hasil capaian kinerja pada indikator kinerja pada sasaran strategis ini dijelaskan sebagai berikut:

IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.

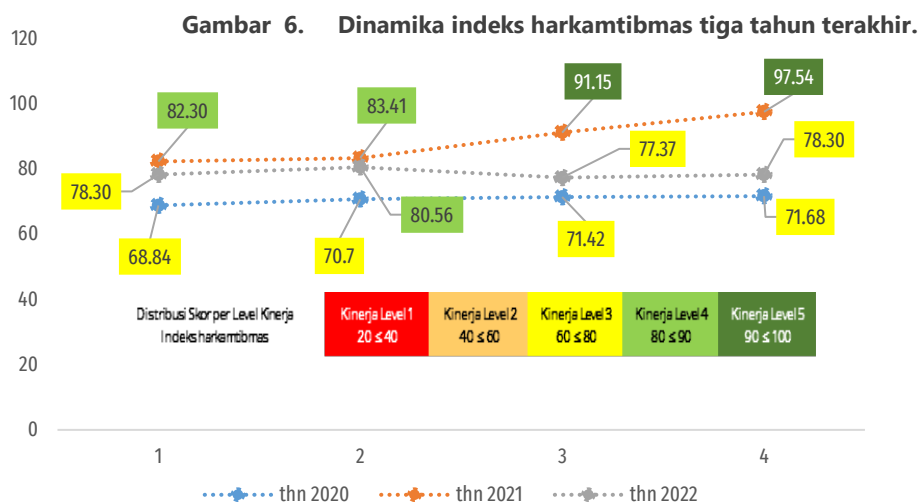
Pada indikator kinerja ini, penilaiannya didasari pada ukuran capaian kinerja yang disepakati Polda Lampung dalam memelihara kamtibmas dengan serangkaian pengelolaan sumber daya pencegahan terhadap gangguan kamtibmas ketertiban masyarakat, melalui perhitungan komposit dari delapan komponen yakni; *road savety index*, *Index community policing*, persentase pemenuhan kegiatan patroli, persentase pemenuhan aktivitas harkamtibmas perairan, kualitas penanggulangan keamanan berkadar tinggi, persentase antisipasi potensi gangguan, persentasi pelayanan pengamanan objek vital dan *crime rate*. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 6. Analisa dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif.

SS1, Harkamtibmas yang partisipatif										
IKU, Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban										
Realisasi			Tahun 2022			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	target 2023	% capaian terhadap target 2023	target 2024	% capaian terhadap target 2024
70,00	71,68	97,54	78,30	73,00	107,26%	-19,73%	74,00	105,85%	75,00	104,40

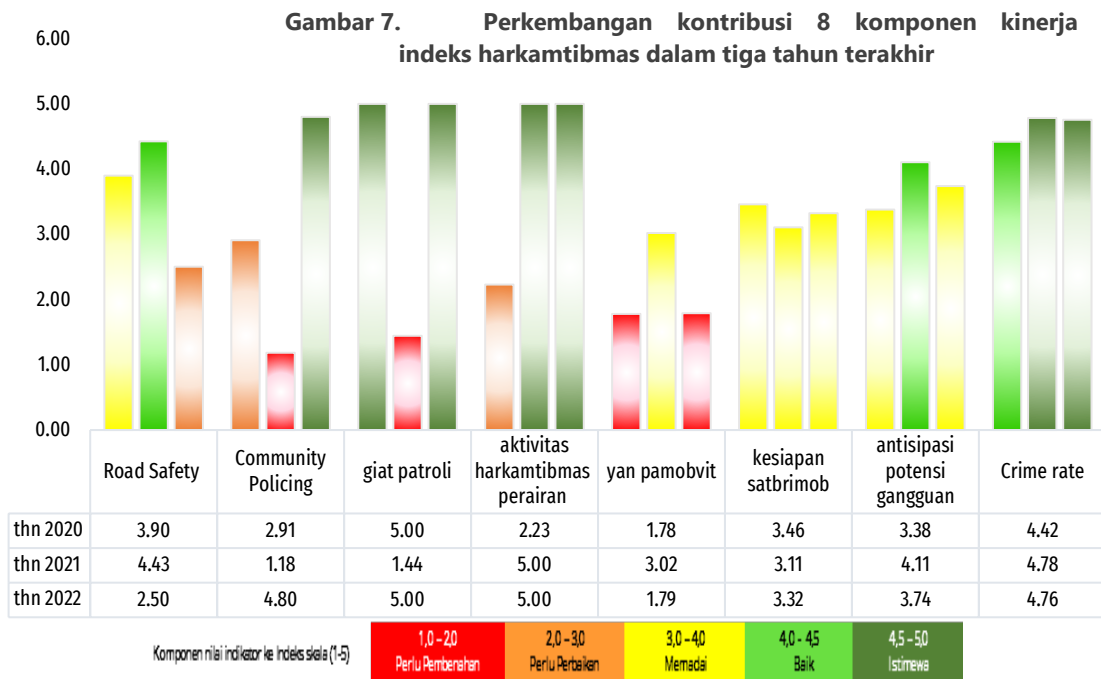
Apabila melihat realisasi tahun 2022, maka target kinerja pemeliharaan kamtibmas tercapai 107,26%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 19,73%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, maka capaian kerjanya masih di atas 100%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan

datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja yang diukur melalui **IKU₁ Indeks Harkatibmas**. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif ini adalah fungsi lalu lintas dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap *road savety index*, kegiatan *community policing* yang terselenggara selama TAB 2022 memberikan peran aktif masyarakat berpartisipasi dalam harkamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, kegiatan patroli sabhara dapat menekan daerah rawan gangguan kamtibmas, demikian pula aktivitas kegiatan kepolisian perairan secara preemtif dan preventif dapat melindungi, mengayomi masyarakat perairan. Pelayanan pengaman objek vital dapat diselenggarakan di samping dalam upaya meningkatkan PNBP, juga peran fungsi intelkam dalam memberikan informasi terkait kegiatan deteksi aksi yang harus diselenggarakan oleh fungsi kepolisian lainnya, termasuk memberikan masukan kepada *stakeholder* dalam mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan operasi kepolisian membantu dalam upaya menurunkan korban dari pelaku tindak pidana. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks harkamtibmas per triwulan dalam tiga tahun terakhir:



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks harkamtibmas setiap triwulan berada pada level kinerja 60-97 yaitu pada rentang level kinerja 3-5 pada skala *likert*. Keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, kegiatan preemtif dan preventif yang diselenggarakan fungsi lalu lintas, fungsi Binmas, fungsi Samapta, fungsi Polairud, fungsi Pamobvit, dan fungsi Intelkam, serta fungsi Brimob dan pelaksanaan operasi kepolisian secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya pemeliharaan situasi kamtibmas yang partisipatif. selanjutnya untuk lebih detail analisis

terhadap seberapa besar kontribusi kinerja yang diberikan dari **delapan komponen penyusun IKU₁ indeks harkamtibmas** dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sepanjang **tahun 2022 terdapat dua komponen penyusun Indeks harkamtibmas yang memerlukan upaya pembenahan dan perbaikan.**

Adapun komponen tersebut adalah kegiatan fungsi lintas pada komponen **road safety index** tahun 2022 menunjukkan nilai kinerja sebesar 2,50, hal ini memerlukan upaya perbaikan. Adapun faktor penyebabnya adalah tingkat fatalitas korban meninggal dunia akibat laka lintas baik ditinjau aspek per 100.000 penduduk atau per 10.000 kendaraan menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan TAB-1. Dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 7. Data korban kecelakaan lalu lintas 2021-2022

	2021	2022	tren
Jumlah korban laka meninggal dunia	603	737	naik 18,07%
Jumlah kendaraan	3.530.827	3.626.796	naik 2,64%
Jumlah penduduk	8.893.292	8.901.566	naik 0,09%

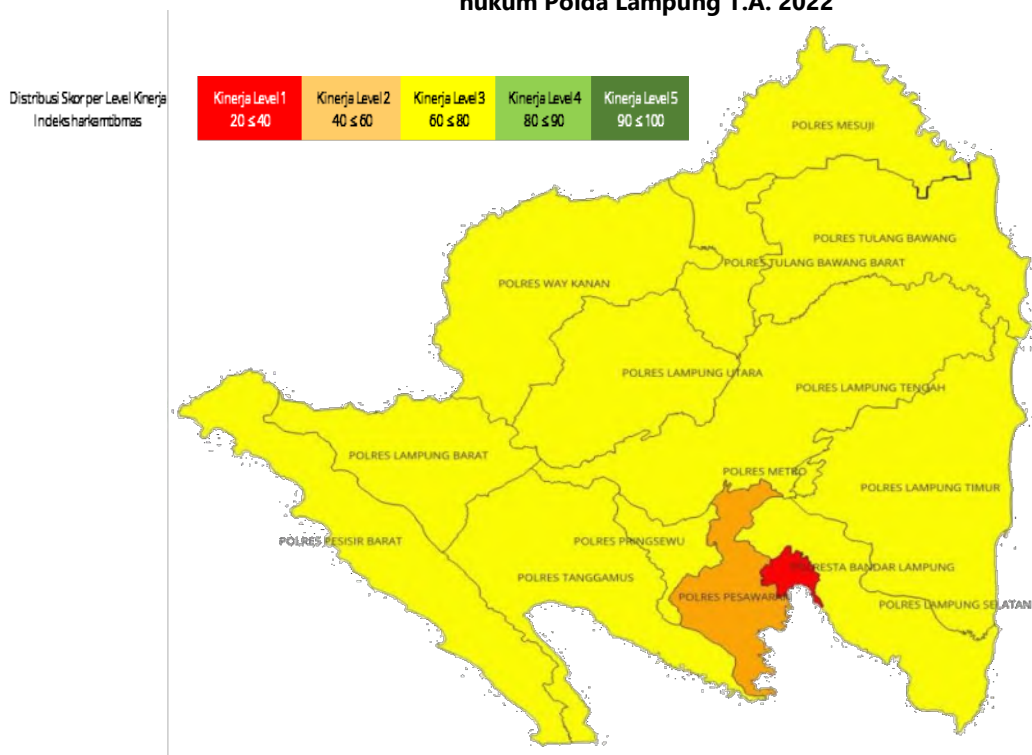
Berdasarkan data tersebut di atas, maka jumlah korban meninggal dunia tahun 2022 menunjukkan tren kenaikan sebesar 18,07% dari tahun 2021, sementara itu juga jumlah kendaraan 2022 naik sebanyak 2,64% dan jumlah penduduk naik sebesar 0,09%. Berdasarkan fakta data tersebut, diperlukan langkah dan upaya konstruktif untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan terutama menurunkan

korban meninggal dunia. **Langkah dan upaya perbaikan;** dimulai dari kegiatan jangka pendek melalui revitalisasi kegiatan rutin kamseltibcarlantas yakni turjawali penerangan lintas, dikmas lintas. Kemudian jangka menengah melalui penyelenggaraan kegiatan kerja sama, rapat koordinasi lintas sektoral terkait kamseltibcar lintas, muatan pendidikan tertib lalu lintas pada berbagai lembaga pendidikan formal, dan langkah jangka panjang berupa peninjauan terhadap regulasi di bidang lalu lintas pada skala daerah hukum Polda Lampung atau pun menginisiasi/memberi masukan terhadap regulasi terkait kamseltibcarlantas di Provinsi Lampung dalam rangka menekan fatalitas korban meninggal dunia. Membentuk forum bersama dengan pemerintahan daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat peduli lalu lintas menyelenggarakan kegiatan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan mulai dari pembinaan pada tahapan perencanaan; pengaturan; pengendalian; dan pengawasan penyelenggaraan kamseltibcarlantas.

Selanjutnya fakta data komponen pendukung lainnya dari kinerja harkamtibmas yang menunjukkan tren kinerja menurun adalah pengelolaan **pelayanan pamobvit**, dengan nilai kinerja sebesar 1,79, **fakta performa kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuatif, terdapat kecenderungan kinerja yang menurun.** Hasil analisis faktor yang menjadi penyebab, diantaranya menyangkut belum tergalinya pemahaman implementasi dari Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu, baik pada internal maupun di kalangan pengelola obvit dan objek tertentu di daerah hukum Polda Lampung. Kemudian faktor yang lainnya, berupa keadaan pengelola tupoksi fungsi pamobvit pada satuan Polres jajaran Polda Lampung, masih dalam bentuk unit organisasi di bawah Satsabhara yang dihadapkan pada tantangan tugas berupa situasi lingkungan strategis yang sedang dan akan terus berkembang. Sehingga memerlukan **upaya pembenahan** secara spesifik, berupa optimalisasi manajemen sistem pengamanan obvitnas dan objek tertentu, dengan latar belakang telah tergelarnya *baseline* pemetaan obvit dan objek tertentu yang belum diberdayakan secara efektif. Kemudian upaya pembenahan secara umum adalah dengan meningkatkan tupoksi fungsi pamobvit pada satuan Polres, melalui penguatan kelembagaan, dengan mengkaji terhadap pembentukan Satpamobvit Polres sebagaimana amanat dari Perkap Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi tertentu pada kesatuan kewilayahan. Selanjutnya didukung pula dengan upaya optimalisasi SOTK fungsi pamobvit melalui internalisasi proses penyusunan MoU dan pedoman kerja sama dalam sistem manajemen pengamanan sebagaimana ketentuan pada Perkap Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Panduan Penyusunan Kerja Sama Polri yang dilakukan oleh fungsi Bidkum dan Roops. Fokus upaya lainnya adalah dengan menajamkan tupoksi Pamobvit dalam mengimplementasi Perpol 3 Tahun 2019 dengan menyusun manual organisasi/proses bisnis dalam pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, guna memudahkan dalam menjabarkan Perpol Nomor 3 Tahun 2019 baik dalam sistem, proses dan prosedur kerja menjadi lebih jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Bersama ini disajikan peta kinerja harkamtibmas TAB 2022 dengan ilustrasi spektrum warna pada daerah hukum satuan Polres jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

Gambar 8. Sebaran kinerja indeks harkamtibmas pada daerah hukum Polda Lampung T.A. 2022

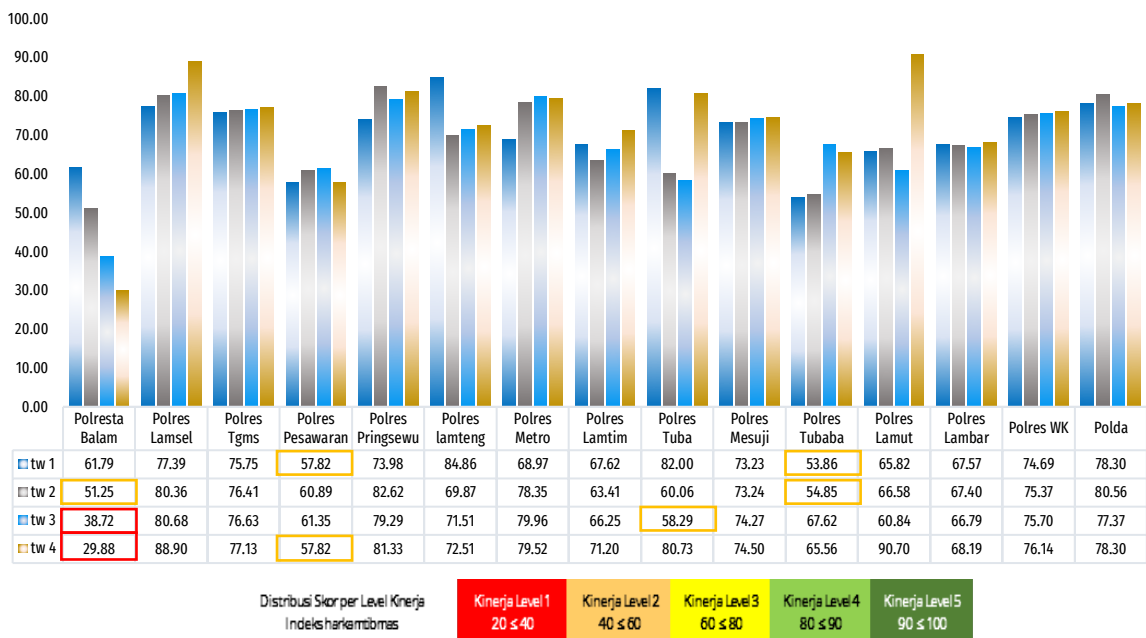


Terlihat daerah hukum Polda Lampung didominasi dengan warna kuning, hal ini menunjukkan bahwa kinerja harkamtibmas berada pada level 3, artinya indeks harkamtibmas pada 14 satuan kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung rata-rata berada pada interval angka indeks 60-80 atau kinerja level 3. Tetapi lain halnya secara khusus Polres Pesawaran berwarna oranye/nila menunjukkan level kinerja 2 dengan internal angka indeks pada 40-60, sedangkan Polresta Bandar Lampung berada pada spektrum warna merah, menunjukkan kinerja level 1 pada internal angka indeks 20-40.

Secara umum faktor yang mempengaruhi terhadap **keberhasilan** dalam pengelolaan harkamtibmas ini adalah keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan komponen indeks harkamtibmas yang meliputi delapan

komponen pendukung mulai dari pengelolaan kamseltibcar lintas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamtibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung untuk mengoptimalkan sinergitas Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung **IKU-1** ini, dapat dijelaskan pada dinamika kinerja indeks harkamtibmas pada 14 Polres setiap triwulan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9. Dinamika Indeks harkamtibmas pada 14 Polres



Dari 14 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat dua daerah hukum Polres yang berada pada **kinerja level 2 yakni Polres Pesawaran dan Tulang Bawang Barat**, sedangkan **Polres lainnya berada pada kinerja level 3-4**. Memasuki **triwulan II** kinerja level 2 terdapat pada Polresta Bandar Lampung dan Polres Tulanga Bawang Barat, sedangkan Polres lainnya berada pada **kinerja level 3 dan 4**. Pada **triwulan III** **Polresta Bandar Lampung dan Polres Tulang Bawang,**

yang lainnya pada kinerja level 3-4. Memasuki kinerja triwulan IV kembali kinerja Polresta Bandar Lampung terpuruk pada level 1, disusul Polres Pesawaran turun ke kinerja level 2 sedangkan Polres lainnya bertahan pada kinerja level 3 dan 4. Secara umum mengakhiri tahun 2022 kinerja kegiatan harkamtibmas memberikan kontribusi positif baik terhadap pencapaian target indeks kamtibmas Polda Lampung maupun institusi Polri pada umumnya.

Sebagai *evidence* pada TAB 2022 Polda Lampung berhasil mengelola keamanan dan ketertiban, khususnya agenda tahapan akhir dari pengamanan pilkada serentak yakni pelantikan kepala daerah/bupati delapan kabupaten/kota serta agenda lokal pemilihan kepala desa di jajaran kewilayahan. Pada tahun 2022 berhasil diidentifikasi seratus dua potensi konflik untuk direduksi melalui pengelolaan fungsi intelkam yang selanjutnya dilakukan deteksi aksi oleh masing-masing fungsi kepolisian agar tidak menimbulkan gangguan terhadap jalannya pembangunan baik skala nasional maupun Provinsi Lampung.

Tinjauan umum terhadap ***evidence*** penyelenggaraan dinamika operasional kegiatan pemeliharaan kamtibmas yang partisipatif di daerah hukum Provinsi Lampung telah menunjukkan kontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks agregat dari ukuran dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi hidup layak. IPM Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai angka 70,45 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, atau tumbuh 0,79% (meningkat 0,55 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. **IPM Provinsi Lampung berada pada status capaian pembangunan manusia “kategori tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).** Peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hal ini membuktikan bahwa setelah pandemi *Covid-19*, pembangunan manusia di Lampung terus meningkat, sebagaimana berita resmi statistik dari BPS¹ berikut ini:



¹ Berita resmi statistik BPS Provinsi Lampung No. 77/11/Th. VII, 15 November 2022, yang diunduh pada link <https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1060/ipm-lampung-tahun-2022-sebesar-70-45.html>

Seiring dengan meningkatnya IPM tersebut, hal ini berbanding lurus dengan IPM kabupaten/kota mengalami peningkatan. Dari sisi status capaian, terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian IPM di provinsi Lampung, sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 11. IPM Lampung Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2022



Apabila ditinjau dari IPM kabupaten/kota, terdapat satu kabupaten yang berubah status capaian IPMnya, yaitu Kabupaten Lampung Timur meningkat menjadi berkategori "tinggi". Dengan demikian, jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2022 adalah sebanyak 5, yaitu Kota Bandar Lampung (78,01), Kota Metro (77,89), Kabupaten Pringsewu (70,98), Lampung Tengah (70,80) dan Lampung Timur (70,58). Sedangkan 10 kabupaten lainnya berstatus "sedang" (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$), dan sudah tidak ada lagi yang berstatus "rendah" ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2016, tidak ada lagi kabupaten dengan status

2. IKU-2 Indeks penegakan hukum.

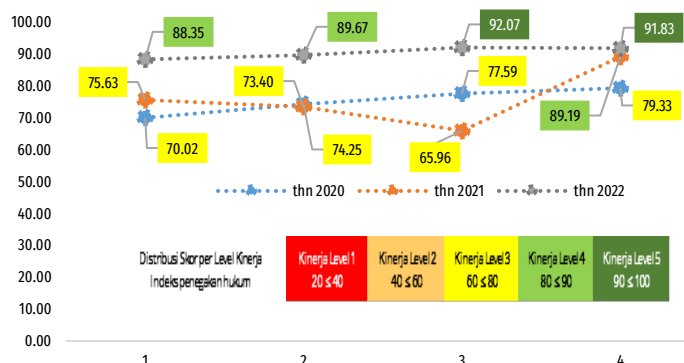
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian tindak pidana pada setiap jenis tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung (konvensional, transnasional, kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana perairan pada setiap TAB. Adapun hasil capaian kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 8. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU Indeks penegakan hukum.

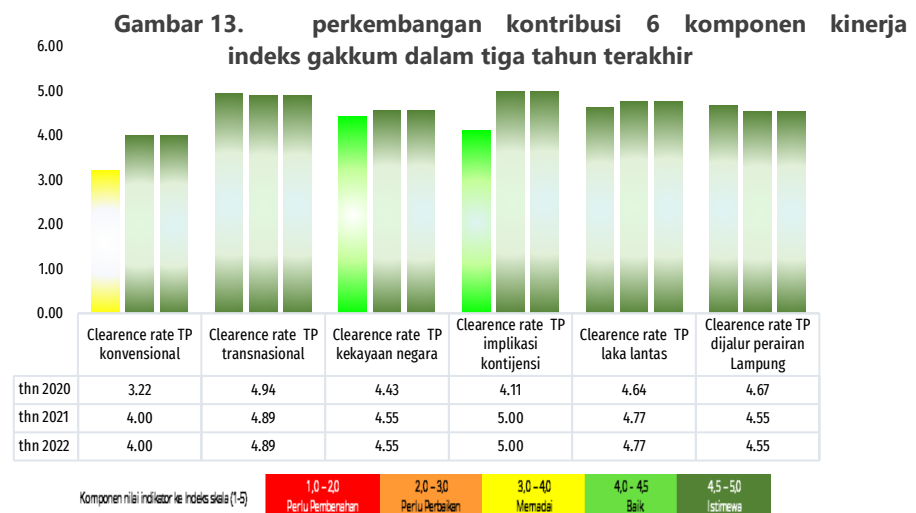
SS ₂ Penegakan hukum yang berkeadilan										
IKU: Indeks penegakan hukum										
Realisasi			Tahun 2022			Renstra Polda Lampung 2020-2024				
2019	2020	2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	target 2023	% capaian terhadap target 2023	target 2024	% capaian terhadap target 2024
65,00	79,33	89,18	91,83	68,00	120,00%	2,98%	69,00	120,00%	70,00	120,00%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2022, maka capaian indeks penegakan hukum pada target TAB 2022 tercapai 120,00%, dengan kenaikan realisasi kinerja sebesar 2,98% dari TAB-1. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 maka capaian kinerjanya masih di atas 100%. Artinya level kinerja penegakan hukum pada TAB+1 harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan peninjauan terhadap target kinerjanya pada Renstra 2020-2024. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam kinerja Indeks penegakan hukum ini menunjukkan fakta bahwa sepanjang tahun 2022, kegiatan penyelesaian tindak pidana mulai dari kasus konvensional, transnasional, kekayaan negara, kasus laka lantas dan penyelesaian tindak pidana perairan yang diselenggarakan fungsi reserse baik reskrim, reskrimsus, resnarkoba, gakkum lantas maupun gakkum polairud, secara komplemen berkontribusi dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Polda Lampung dan jajaran sesuai target yang telah ditentukan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks penegakan hukum per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

Gambar 12. Dinamika indeks penegakan hukum tiga tahun terakhir.



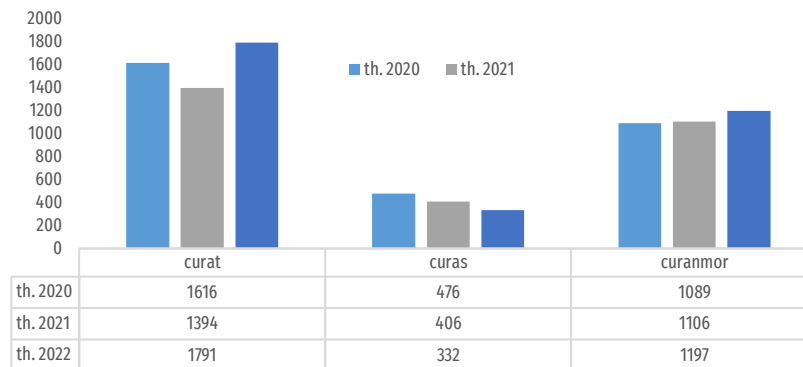
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks penegakan hukum setiap triwulan dalam tiga tahun terakhir ini, berada pada level kinerja 60-90, yaitu pada rentang level kinerja 3-5 pada skala *likert*. Pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan dinamika kinerja penegakan hukum terus mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat penurunan kinerja pada triwulan II walaupun masih dalam kategori aman pada kinerja level 3. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, kegiatan penegakan hukum yang diselenggarakan fungsi reserse baik reskrimum, reskrimsus, resnarkoba, gakkum lintas maupun gakkum polairud secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **enam komponen penyusun IKU₂ indeks penegakan hukum** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sepanjang **tahun 2022 terdapat kinerja enam komponen penyusun penegakan hukum dapat dikategorikan baik dan istimewa**. Semua komponen kinerja penyelesaian tindak pidana baik konvensional, transnasional, kekayaan negara, maupun penyelesaian kasus kontijensi, laka lintas dan penegakan hukum sepanjang perairan Lampung secara umum dapat diselesaikan melebihi target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 68. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja penegakan hukum sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi reskrim, lalu lintas dan kepolisian perairan baik di Polda maupaun Polres dan Polsek untuk berupaya meningkatkan kegiatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana, guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat/pelapor akan rasa keadilan korban atas perbuatan jahat/tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sebagai *evidence* kinerja pada TAB 2022 Polda Lampung berhasil mengungkap kasus yang

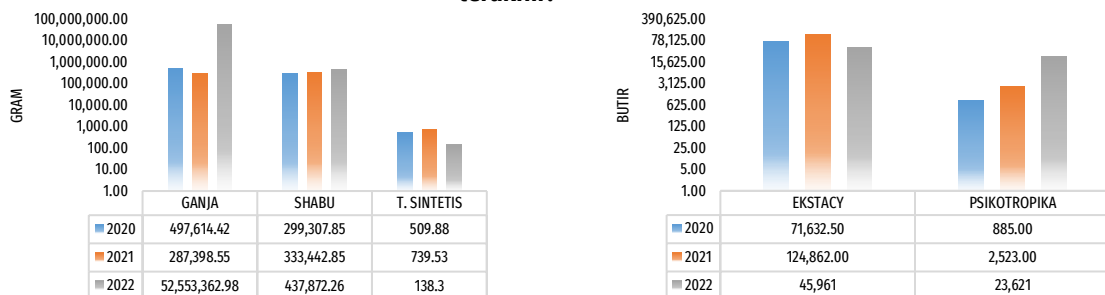
menjadi perhatian publik atau kasus menonjol mulai dari curat curas dan curanmor sebagai berikut:

Gambar 14. Dinamika kasus menonjol tiga tahun terakhir.

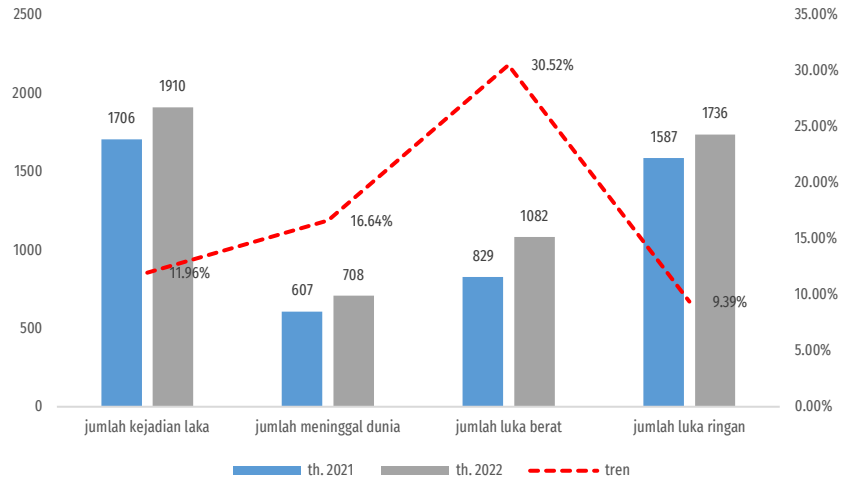


Dari kasus menonjol ini kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan sebesar 28,4%, kasus curas menurun sebesar 18,23%, sedangkan kasus pencurian kendaraan bermotor naik sebesar 8,23%. Berlanjut pada penanggulangan narkoba perkembangan tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 15. Dinamika kasus penyalahgunaan narkoba tiga tahun terakhir.

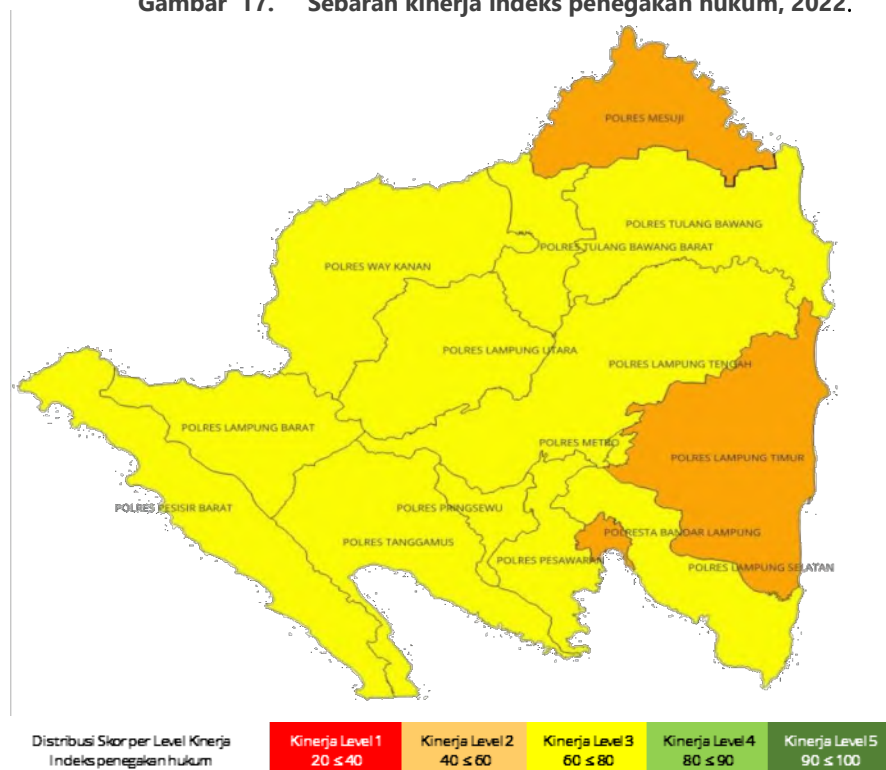


Penanganan kasus ganja meningkat besar dibanding tahun 2021 demikian juga kasus shabu meningkat dari tahun 2021, sedangkan kasus obat sintetis menurun. Berlanjut pada barangbukti ekstasi tahun 2022 menurun dibanding 2021 termasuk juga psikotropika. Penanganan kasus kekayaan negara, khususnya tindak pidana yang berhubungan dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sejak diundangkan maka pada tahun 2022 terdapat peristiwa menonjol terkait dengan pembelian BBM yang bersubsidi dengan menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ditambah lagi peristiwa adanya korban investasi bodong, pelaku judi online dan kegiatan pertambangan liar berupa pasir kuarsa di kecamatan Labuhan Maringgal yang melanggar UU RI 03 Tahun 2020 tentang Minerba. Kemudian penanganan kasus kecelakaan lalu lintas selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada skema gambar berikut ini:

Gambar 16. Dinamika penanganan kasus laka lintas, 2022

Dalam penanganan kasus laka lintas terdapat informasi bahwa tahun 2022 tren jumlah kejadian meningkat sebesar 11,96%, diikuti pula dengan meningkatnya korban meninggal dunia sebesar 16,64%, luka berat naik 30,52% dan luka ringan naik 9,29%. Upaya keamanan dan keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan baik kejadian laka maupun korban laka, terutama korban meninggal dunia, karena hal ini berhubungan dengan komponen **IKU₁ indeks harkamtibmas, yaitu road safety index.**

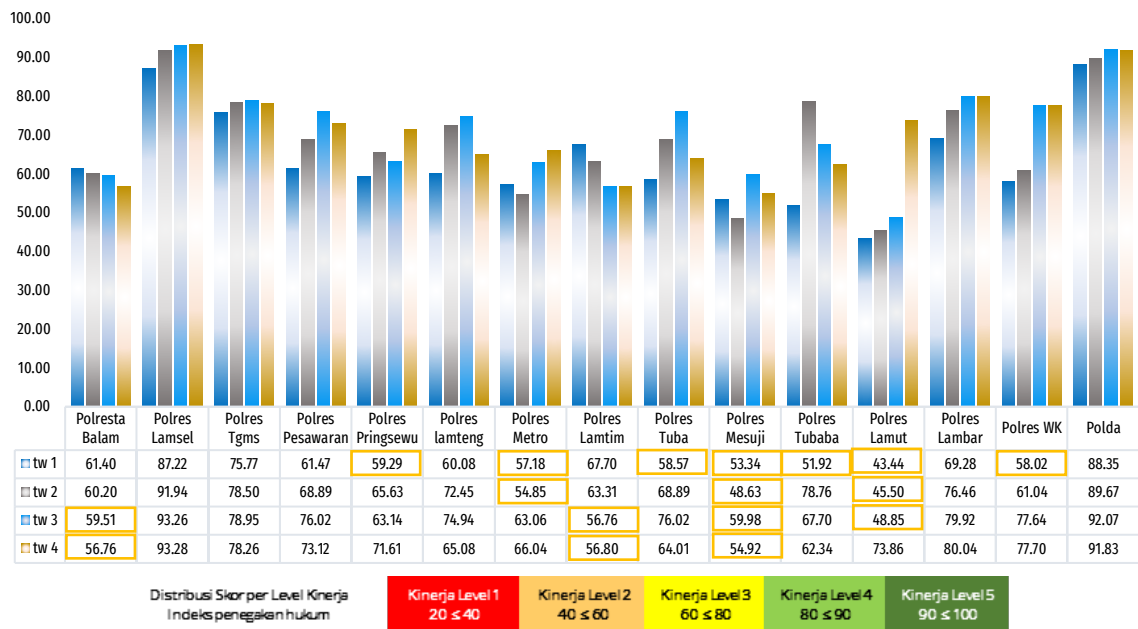
Poin penting lainnya adalah tentang sebaran kinerja penegakan hukum yang berkeadilan, yang tergambar pada spektrum warna indikator kinerja Indeks penegakan hukum pada peta daerah hukum Polda Lampung sebagai berikut:

Gambar 17. Sebaran kinerja indeks penegakan hukum, 2022.

Terlihat daerah hukum Polda Lampung didominasi dengan warna kuning, hal ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum berada pada kinerja level 3, artinya indeks gakkum pada hampir semua kewilayahan Polres jajaran Polda Lampung rata-rata berada pada interval angka indeks 60-80 atau kinerja level 3. Kecuali daerah hukum Polresta Bandar Lampung, Mesuji dan Polres Lampung Timur berwarna oranye/nila, hal ini menunjukkan level kinerja 2 dengan internal angka indeks pada 40-60. Kinerja ini berhubungan dengan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana/laka lantas yang dilakukan oleh fungsi Reskrim dan Lantas pada 14 Polres jajaran Polda Lampung.

Secara umum faktor yang mempengaruhi terhadap **keberhasilan** dalam pengelolaan penegakan hukum ini adalah keterpaduan dari penyelenggaraan dinamika operasional kepolisian; mulai dari pengelolaan komponen indeks harkamtibmas yang meliputi delapan komponen pendukung mulai dari pengelolaan kamseltibcar lantas, pengelolaan kegiatan *community policing*, pengelolaan kegiatan patroli pada daerah rawan, pengelolaan antisipasi terhadap potensi gangguan, pengelolaan harkamtibmas perairan, pengelolaan pelayanan pengamanan obvit dan objek tertentu, pengelolaan kualitas kekuatan Brimob dan pengelolaan operasi kepolisian serta pengelolaan dimensi penegakan hukum, yang berupaya untuk mewujudkan transparansi penyidikan yang berkeadilan. Di samping itu peran aktif penyelenggaraan kerjasama harkamtibmas guna menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan wawasan masyarakat terhadap kamtibmas setempat. Kemudian konsisten dan secara berkelanjutan mendukung untuk mengoptimalkan sinergitas Polda Lampung dengan program-program pembangunan baik pemerintahan pusat maupun daerah. Melalui peningkatan kualitas terhadap harmonisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan masyarakat di provinsi Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui dan analisis terhadap pendukung **IKU₁** ini, dapat dijelaskan pada dinamika kinerja indeks harkamtibmas pada 14 Polres setiap triwulan, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 18. Dinamika Indeks penegakan hukum pada 14 Polres, 2022



Dari 14 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat tujuh daerah hukum Polres yang berada pada **kinerja level 2 yakni Polres Pringsewu, Lamteng, Metro, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara**, sedangkan Polres lainnya berada pada **kinerja level 3-4**. Memasuki **triwulan II** kinerja level 2 terdapat pada Polres Metro, Mesuji dan Polres Lampung Utara, sedangkan Polres lainnya berada pada **kinerja level 3-4 dan 5**. Pada **triwulan III** kinerja level 2 terdapat pada **Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Timur, Mesuji dan Lampung Utara**, sedang Polres lainnya pada **kinerja level 3-4 dan 5**. Memasuki kinerja triwulan IV tinggal **Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Timur dan dan Polres Mesuji**, sedangkan Polres lainnya bertahan pada kinerja level 3-4 dan 5. Secara umum mengakhiri tahun 2022 kinerja penegakan hukum memberikan kontribusi positif baik terhadap pencapaian indeks penegakan hukum Polda Lampung maupun institusi Polri pada umumnya.

Learn and growth perspective

4. Sasaran Strategis (SS3)

Sumber daya manusia yang profesional.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang profesionalitas kinerja yang ingin diwujudkan melalui peningkatan kompetensi/ kemampuan, yang tidak hanya sebatas memiliki keterampilan (*skill*) tetapi lebih dari pemahaman tupoksi secara mendetail, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki Polda Lampung secara berkelanjutan dapat menguasai proses bisnis dan mampu mengetahui titik kelemahan organisasi dan cara mengatasinya. Hal ini ditujukan agar Polda Lampung secara optimal, efektif dan efisien memanfaatkan segenap sumber daya, terutama personel yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis organisasi. Selanjutnya terhadap capaian indikator kinerja pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP-3 Indeks profesionalitas personel.

Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada dimensi pemenuhan kebutuhan personel, dimensi manajemen kompetensi yang dipersyaratkan untuk mengisi kompetensi jabatan yang dibutuhkan pada struktur organisasi melalui penyelenggaraan *assessment center*, dimensi peningkatan kompetensi melalui diklat, dimensi pencapaian kinerja personel dan dimensi prestasi yang capai melalui pemberian penghargaan. Hal yang diharapkan dari indikator kinerja pendukung ini adalah adanya peningkatan kualitas kemampuan personel Polda Lampung yang dapat mengelola manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

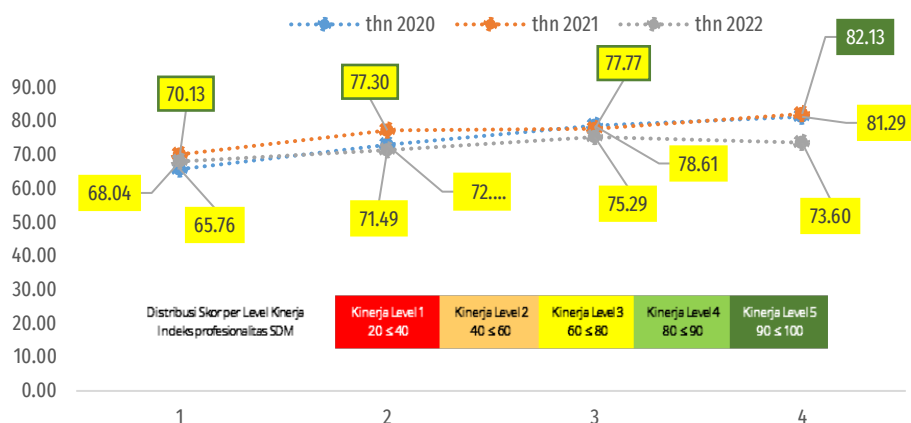
Tabel 9. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks profesionalitas personel.

SS ₃ Sumber daya manusia yang profesional										
IKP ₃ Indeks profesionalitas personel										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
2019	2020	2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	target 2023	% capaian terhadap target 2023	target 2024	% capaian terhadap target 2024
72,00	81,29	82,13	73,60	75,00	98,14%	-10,38%	76	96,84%	77	95,59%

Apabila dilihat dari realisasi TAB 2022, maka capaian dari target indeks profesionalitas personel, sebesar 98,14%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 10,18%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 tercapai 96,84% dan 95,59% untuk tahun 2024. Artinya level kinerja profesionalitas personel pada TAB+1 harus terus berupaya untuk meningkatkan dan mengakselerasi kegiatan pendukung dari indikator

kinerja profesionalitas personel, mengingat target kinerja untuk tahun 2022 tidak tercapai terlebih akan mendekati akhir Renstra 2020-2024 terdapat kecenderungan menurun, ataupun mempersiapkan diri dengan merumuskan indikator kinerja baru, untuk keberlanjutan perencanaan kinerja lima tahun yang akan datang dengan menjalin koordinasi pembina fungsi SSDM Polri dan Lemdiklat Polri, melalui peninjauan terhadap target kinerjanya pada Renstra 2025-2029. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap kegagalan dari kinerja Indeks profesionalitas personel ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, dari kelima komponen penyusun IKP ini mulai** kegiatan penerimaan personel sudah berjalan dengan baik, dibarengi dengan penyediaan personel untuk menduduki jabatan dalam SOTK, baik di Polda, Polres dan Polsek melalui kegiatan *assessment center*, penyelenggaraan diklat Di SPN sesuai indikasi kebutuhan organisasi serta terakomodirnya personel yang berprestasi melalui pemberian penghargaan, mulai menunjukkan penurunan kinerja sehingga secara komplementer berdampak pada pencapaian target indeks profesionalitas personel. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks profesionalitas personel per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut:

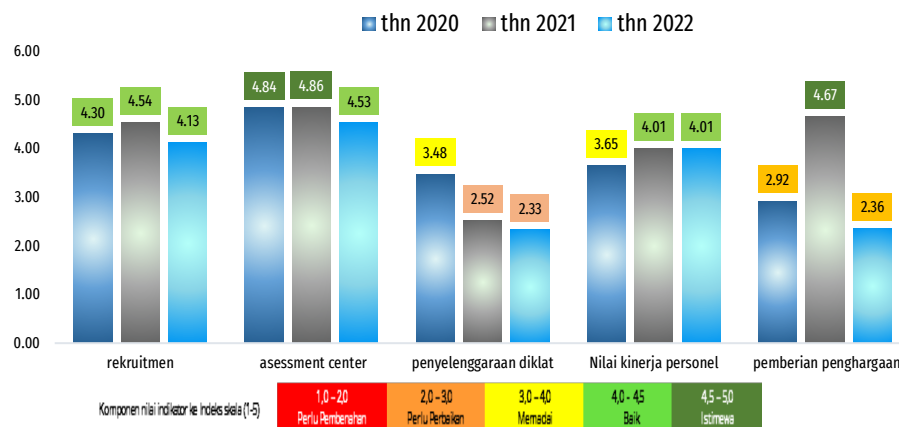
Gambar 19. Dinamika indeks profesionalitas personel dalam tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks profesionalitas personel setiap triwulan dalam tiga tahun ini, berada pada level kinerja 60-90 yaitu pada rentang level kinerja 3-4 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 dinamika kinerja profesionalitas personel menunjukkan kecenderungan menurun dibanding tahun 2020-2021. Terlihat dari realisasi kinerja setiap triwulannya, terus menurun dibanding tahun 2021, walaupun masih dalam kinerja level 3. Secara umum penurunan kinerja ini akan berdampak pada pencapaian target tahun 2022, fakta ini menunjukkan kegiatan pembinaan sumber daya manusia yang diselenggarakan Biro SDM dan SPN Polda Lampung, mulai dari proses penyediaan personel, pembinaan personel,

peningkatan kompetensi, perawatan baik jasmani, rohani dan mental mengalami penurunan dibanding dengan kegiatan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk lebih detail mengenai sampai sejauh mana kontribusi **lima komponen penyusun IKU₃ indeks profesionalitas personel** dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 20. perkembangan kontribusi 5 komponen kinerja indeks profesionalitas personel dalam tiga tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2022 terdapat kinerja lima komponen penyusun kinerja profesionalisme personel dapat dikategorikan beragam mulai dari perlu perbaikan; memadai; baik dan istimewa.** Berdasarkan data tersebut di atas diperoleh fakta bahwa kinerja **penyelenggaraan diklat nilai kerjanya pada tahun 2021-2022 ini berada pada kinerja level 2, atau perlu perbaikan.** Hasil analisis data



Gambar 21. Perkembangan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes dalam tiga tahun terakhir.

pendukung kinerja ini, diperoleh informasi bahwa yang menjadi faktor penyebab menurunnya realisasi kinerja Indeks profesionalitas personel adalah menurunnya alokasi peserta pelatihan dan peserta pendidikan pengembangan spesialis (dikbangspes). Karena alokasi yang diturunkan dari Lemdiklat Polri ke SPN Polda Lampung dalam tiga tahun terakhir ini terus mengalami penyusutan, sementara itu SPN belum merekonstruksi kebutuhan pelatihan dan dikbangspes, mengingat alokasi anggaran penyelenggaraan diklat Polri terus menurun. Hal ini apabila tidak dilakukan upaya mengusulkan kebutuhan pelatihan dan dikbangspes, maka akan berpengaruh pada realisasi pencapaian target pada tahun berikutnya. Oleh karena itu menjadi catatan tersendiri untuk pencapaian pada target pada tahun 2023-2024. Selanjutnya **upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan diklat ini,** di samping nilai kinerja ini diperoleh secara komposit bersama komponen kinerja

profesionalitas personel lainnya, **maka untuk komponen penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya SPN harus melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan penambahan alokasi peserta pelatihan dan dikbangpes ke Mabes Polri dan Rorena mengusulkan penambahan anggaran, ataupun SPN bersama dengan Rorena berinisiatif mengusulkan tambahan anggaran pelatihan yang dibiayai dari pendapatan hibah dari pemerintah daerah, yang sebelumnya menyusun analisa kebutuhan pelatihan fungsi kepolisian berdasarkan masukan dari satker dan Polres jajaran.** Selanjutnya memberikan **atensi terhadap menurunnya pemberian penghargaan bagi personel yang berprestasi, melalui upaya para kasatker secara konsisten dan berkesinambungan selalu memberikan dorongan kepada personel melalui membangun kerja sama dan menjalin hubungan yang harmonis dalam rangka merangsang personel untuk berprestasi.** Konsep pemberian penghargaan adalah merupakan bentuk stimulan pemimpin kepada personel, agar bekerja dengan baik, bersemangat, berdedikasi dan terpeliharanya loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan yang digeluti. Untuk dimensi profesionalitas personel yang lainnya, cukup memadai dan performa kinerjanya patut untuk dipertahankan.

Secara umum pencapaian kinerja dari Indeks profesionalitas personel tahun 2022 ini perlu dilakukan revitalisasi komitmen dari segenap sumber daya Polda Lampung dalam melakukan transformasi organisasi menuju SDM Polri yang siap menghadapi tantangan tugas di masa yang akan datang. Poin penting lainnya adalah kegiatan penyelenggaraan diklat di SPN memang sangat vital, mengingat kebutuhan kompetensi dan pengetahuan untuk menghadapi tantangan tugas dan lingkungan strategis yang terus berkembang. Sehingga upaya ke depan, perbaikan peningkatan kebutuhan peserta pelatihan dan pendidikan pengembangan spesialis menjadi suatu keharusan untuk dilakukan penguatan, di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas Gadik dan Gadikan. Kegiatan *assessment center* secara umum dapat memberikan masukan pada penempatan personel terhadap jabatan yang tepat. Kendala dan hambatan yang dihadapi selama penyelenggaraan *assessment center* ini, adalah masalah teknis mengenai jadwal kegiatan para *assessor* dengan tugas rutin yang ada. Karena hal ini berhubungan dengan analisa beban kerja masing-masing *assessor*. Hal lain yang dapat menjadi kendala lainnya, adalah berupa *update tools* yang perlu disiapkan secara tepat dengan jabatan yang akan dilakukan *assessment*. Upaya yang pernah dilakukan agar terus ditingkatkan dengan mengefektifkan proses bisnis pembinaan karier personel yang tepat, diantaranya melalui forum komunikasi *assessor* dengan admin, guna memastikan waktu yang tepat pelaksanaan *assessment*. Karena

semangat terbitnya Perpol Nomor 14 Tahun 2018, adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kegiatan *assessment center* pada tingkat Polda.

**4. Sasaran strategis (SS4)
Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.**

Sasaran ini memberikan gambaran tentang kapasitas dan kondisi fasilitas gedung dan sarana angkut sebagai bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan kegiatan tupoksi kepolisian yang dimiliki Polda Lampung sebagai komponen dasar dalam menentukan keberhasilan tugas. Adapun lingkup kinerja dalam indikator kinerja pendukung ini adalah menyangkut dimensi kondisi gedung layak pakai, dimensi kondisi alat angkut layak pakai, dimensi penambahan fasilitas gedung hasil rehab dan usulan pengadaan baru dan dimensi penambahan alat angkut dan usulan pengadaan baru.

Dengan pengembangan modernisasi sarpras dan peralatan kepolisian yang berkelanjutan diharapkan diperoleh kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas. Seiring dengan itu kesiapan sarana prasarana dan peralatan kepolisian dapat selaras dengan tantangan dalam dinamika lingkungan strategis, sehingga memerlukan sistem modernisasi sebagai dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang harus dimiliki Polda Lampung dan jajaran. Selanjutnya terhadap hasil capai kinerja Indeks dukungan sarpras dan peralatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKP-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan.

Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitas barang tidak bergerak berupa gedung (perkantoran dan rumah dinas) dan alat angkut berupa kendaraan, karena dengan penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana barang tidak bergerak (BTB) dan penambahan alat angkut sangat menunjang bagi keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Maka dengan indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana dukungan fasilitas baik gedung perkantoran /rumah dinas dan alat angkut menunjang terhadap keberhasilan tupoksi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

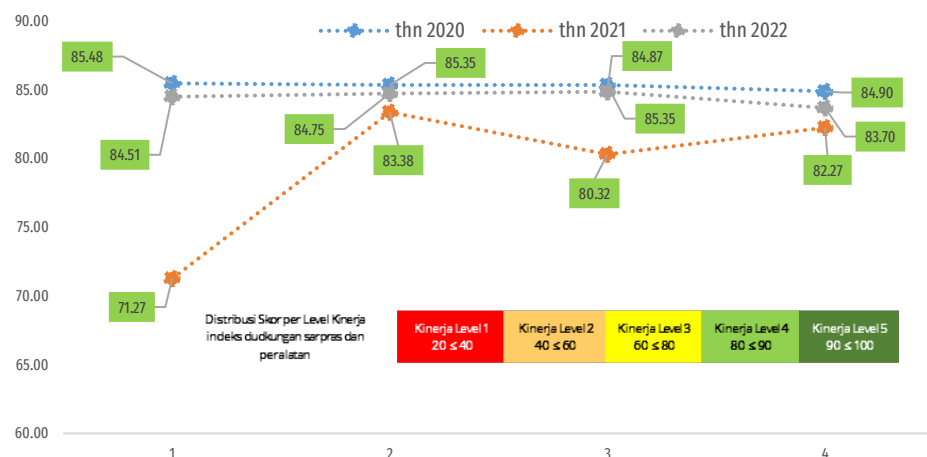
Tabel 10. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks dukungan Sarpras dan peralatan.

SS4 Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan										
IKP, Indeks dukungan sarpras dan peralatan										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
69,00	84,90	82,27	85,81	70,50	120,00%	4,30%	71,00	120,00%	71,50	120,00%

Apabila melihat realisasi TAB, maka target dukungan sarpras dan peralatan tercapai 120,00%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi

kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar 4,30%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 maka capaian kinerjanya masih tetap di atas 100%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu kewaspadaan mengingat pertama daerah Lampung merupakan *ring of fire* di Indonesia terdapat kerawanan dari bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi yang akan berpengaruh pada kondisi bangunan. Demikian juga sarana angkut apabila tidak dipelihara dengan baik, maka akan menurunkan fungsi dan nilai guna kendaraan itu sendiri. Berikut ini gambaran dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan per triwulan dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

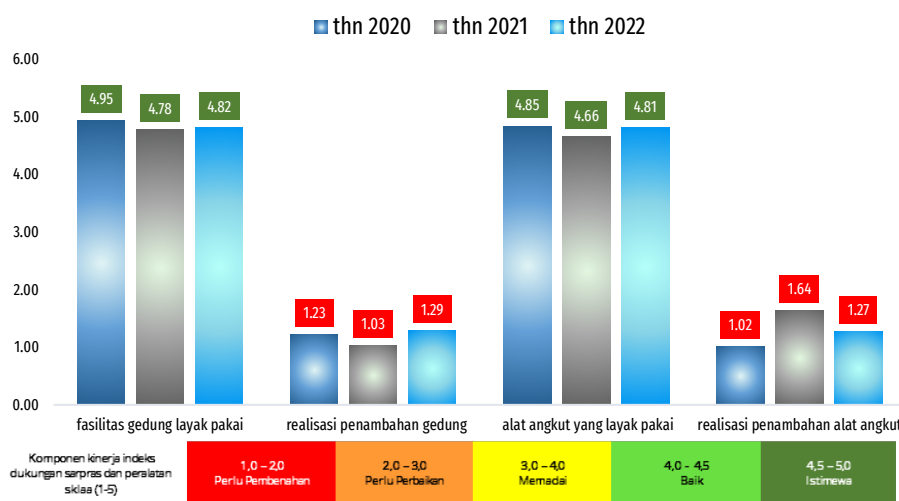
Gambar 22. Dinamika indeks dukungan sarpras dan peralatan tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks dukungan sarpras dan peralatan setiap triwulan berada pada level kinerja 70-90 yaitu pada rentang level kinerja 3-4 pada skala *likert*. Keberhasilan dari kinerja modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan ini adalah konsistensinya pelaksanaan kegiatan pembinaan siklus logistik yang secara komplementer berkontribusi dalam penguatan modernisasi sarpras dan peralatan yang berupaya harus dimiliki Polda Lampung. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan ini fungsi logistik dan perencanaan berupayan untuk selalu mengkaji kebutuhan logistik yang disesuaikan dengan tantangan dinamika lingkungan strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Polda Lampung 2020-2024. Faktor pendukung lainnya adalah harmonisasi dengan *stakeholder* dalam pengelolaan harkamtibmas, sehingga bantuan hibah dimanfaatkan dan diawasi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sarana bangunan dan sarana angkut. Kemudian juga di samping itu tetap idealnya memetakan kebutuhan dan pengusulan ke Mabes Polri. Selanjutnya untuk lebih detail analisis terhadap seberapa besar

kontribusi kinerja yang diberikan dari **empat komponen penyusun IKU₁ indeks dukungan sarpras dan peralatan** dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 23. Perkembangan kontribusi 4 komponen kinerja indeks dukungan sarpras dan peralatan dalam tiga tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2022 empat komponen penyusun kinerja dukungan sarpras dan peralatan diperoleh informasi bahwa realisasi penambahan gedung dan realisasi penambahan alat angkut tahun 2020-2022 perlu pembenahan**, Berdasarkan data di atas tahun 2022 terdapat penambahan gedung dan alat angkut. Untuk gedung terdapat pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, yang teralisasi pada lima Polres yaitu Polres Pringsewu, Lampung Timur, Tulang Bawang, tulang Bawang Barat dan Polres Tanggamus, baik yang bersumber dari DIPA 2022 maupun hibah dari Pemda seperti pembangunan gedung kantin di Polres Lampung Timur dan pembangunan gedung kantor dan rumdin di Polres Tanggamus. Kemudian untuk penambahan alat angkut yang terealisasi pada empat Polres yaitu Polres Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah dan Polres Tulang Bawang Barat. Alat angkut ini merupakan hasil pengadaan Mabes Polri yang didistribusi ke Polda Lampung berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. **Keberhasilan** dari Indeks dukungan sarpras dan alat angkut adalah merupakan komitmen bersama Polda Lampung dalam mengimplementasikan transformasi organisasi menuju peralatan kepolisian yang modern, siap menghadapi tantangan tugas pada masa yang akan datang. Adapun kendala dan

Gambar 24. Perkembangan penambahan gedung/rumdin, 2022



hambatan yang dihadapi pemenuhan dukungan fasilitas barang tidak bergerak, adalah pada kebutuhan yang mendesak dan prioritas, proses usulan yang harus lengkap dan memenuhi kriteria untuk dibangun, mulai dari status lahan, kondisi lahan dan dukungan satuan tingkat atas.



Gambar 25. Perkembangan penambahan gedung/rumdin, 2022

Masalah minimnya realisasi dari setiap usulan pengadaan baik pembangunan gedung/rumdin dan alat angkut, hal ini bergantung dari kebijakan Mabes Polri dalam prioritas pembangunan sesuai dengan tema dari rencana kerja yang ada setiap tahunnya. Oleh karena itu **upaya Polda Lampung dalam meningkatkan indeks**

dukungan sarpras, setiap tahunnya mengoptimalkan forum komunikasi pimpinan daerah dan menjalin koordinasi lintas sektoral dengan *stakeholder* lainnya, dalam menjalan proses bisnis pengelolaan harkamtibmas melalui penyelenggaraan hubungan kerja sama. Sehingga permasalahan kekurangan sarana gedung dan alat angkut walaupun dalam persentase kecil setiap tahunnya secara prioritas terpenuhi. Selanjut **upaya lain untuk meningkatkan kinerja dukungan sarpras dan peralatan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam pengetahuan tata cara hibah sebagai mana yang diatur dalam Perkap 11 Tahun 2013** tentang mekanisme hibah di lingkungan Polri **dan sertifikasi pejabat pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan oleh fungsi Logistik Polda Lampung.** Kemudian secara rutin **asistensi terhadap proses siklus logistik dalam rangka** memelihara **nilai guna dan masa pakai dari pada gedung/rumdin dan alat angkut.**

IKP-5 Indeks sistem Pemerintahan berbasis eletronik

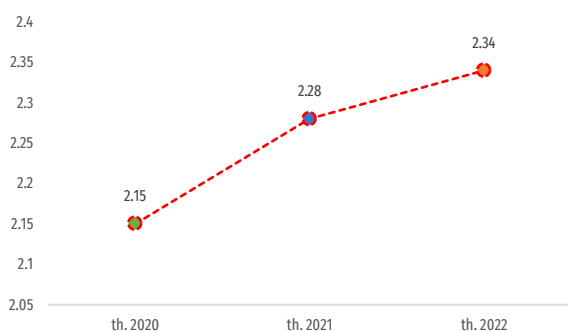
Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada tata kelola yang meliputi: kelembagaan, strategi dan perencanaan, tekonologi informasi dan komunikasi, layanan yang meliputi, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan kebijakan yang meliputi: tata kelola dan layanan. Adapun konsep tingkat kematangan SPBE meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses yang terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, optimum, selanjutnya tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri dari lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimalisasi.

Untuk mendapat nilai dari SPBE berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada proses penilaian terdiri dari empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE, dengan delapan aspek dan empat puluh tujuh indikator. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

SS, Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan										
IKP, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	target 2023	% capaian terhadap target 2023	target 2024	% capaian terhadap target 2024
2,00	2,15	2,29	2,34	2,30	101,74%	2,18%	2,40	97,50%	2,50	93,60%

Apabila melihat realisasi tahun 2022, maka target SPBE tercapai 101,74%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar 2,18%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, maka capaian kinerjanya mulai menurun berada pada 97,50% dan 93,60%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang realisasi dibandingkan dengan target tahun 2023 dan 2024, maka perlu akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas dari implementasi SPBE sebagai suatu sistem yang harus dimiliki dan dikuasai serta dimanfaatkan, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal krusial untuk digunakan dalam pengelolaan tupoksi kepolisian. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pengelolaan SPBE di Polda Lampung adalah fungsi TIK harus menjadi



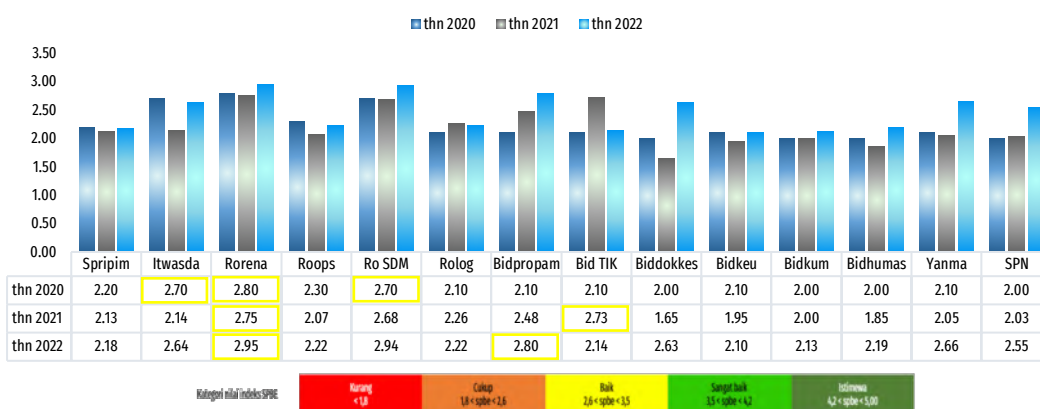
Gambar 26. Dinamika indeks SPBE Polda Lampung dalam tiga tahun terakhir.

terdepan dalam memberikan pembinaan mengenai tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Sedangkan Satker Rorena harus melakukan pembinaan menyangkut kebijakan internal SPBE. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir:



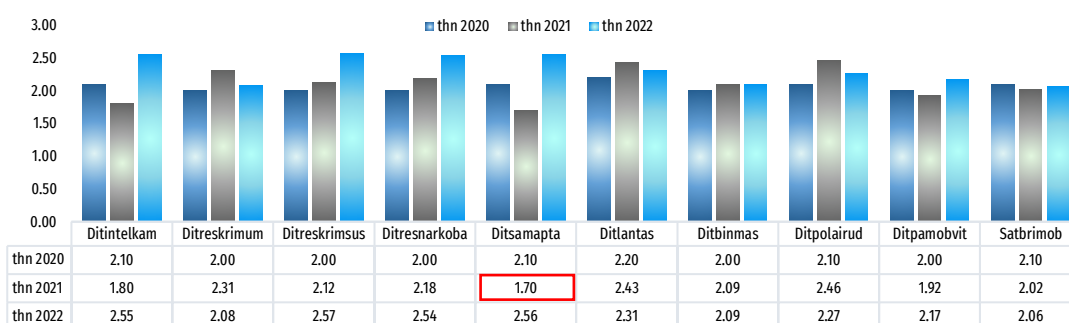
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan indeks SPBE setiap tahunnya berada pada kategori cukup yaitu pada internal nilai 1,8-2,6), penilaian ini berdasarkan dari evaluasi internal Polda Lampung yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kapolda Lampung nomor: Sprin/.../2022 tentang tim pokja evaluasi SPBE di lingkungan Polda Lampung T.A. 2022). Selanjutnya untuk lebih detail analisis terhadap hasil evaluasi mandiri SPBE satker di Polda Lampung, maka hasil penilaian dibagi dalam tiga klaster, masing-masing kelompok satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, kelompok satker pelaksana tugas pokok dan kelompok satwil yaitu Polres jajaran Polda Lampung, sbagai berikut:

Gambar 27. Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, 2022



Dari 14 satker unsur pengawas/pembantu/pendukung pada tahun 2022 terdapat dua satker yakni Rorena dan Bidpropam yang nilai SPBEnya berada pada kategori baik, sementara 13 satker lainnya pada posisi kategori cukup. Kemudian nilai SPBE pada satker unsur pelaksana tugas pokok hasilnya sebagai berikut:

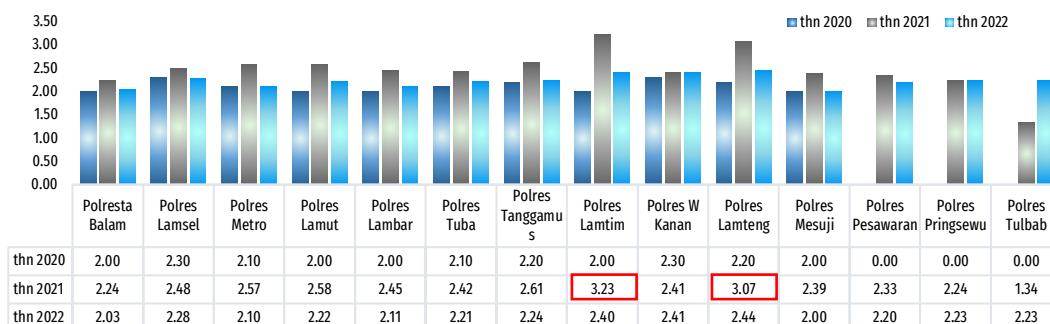
Gambar 28. Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, 2022.



Untuk satker pelaksana tugas pokok sebanyak 10 satker hampir semuanya berada pada posisi nilai SPBE kategori cukup dari nilai terendah penilaian 1,80 – 2,57, hanya satker Ditsamapta pada tahun

2021 nilai SPBE kategori kurang yaitu dengan nilai 1,7. Untuk nilai SPBE satuan Polres sebagai berikut:

Gambar 29. Hasil evaluasi SPBE satker unsur pengawas dan pembantu pimpinan, 2022



Untuk satuan Polres diperoleh hasil nilai SPBE dengan kategori baik pada tahun 2021 adalah Polres Lampung Timur dan Lampung Tengah, sedangkan penilaian SPBE tahun 2022 semua Polres berada pada kategori cukup. Dengan tercapainya target kategori cukup, Polda Lampung berharap, secara bertahap satker-satker dapat mengerti memahami serta mengimplementasikan program SPBE sebagai suatu tuntutan dalam sistem pemerintahan Indonesia, Kendala umum dari penerapan kebijakan SPBE adalah proses yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar satker terlebih antar instansi pemerintah; infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh satker dan pengelolaan keamanan informasi dan masih lemah pemahaman satker maupun instansi pemerintah. Kendala lainnya berupa Sumber daya manusia yang mumpuni dalam upaya penerapan digitalisasi pemerintahan, masih menjadi persoalan pelik yang dialami satker. Terutama langkanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Saat ini Polda Lampung sedang berupaya memecahkan masalah tentang bagaimana penerapan SPBE ini diharapkan meningkatkan kinerja, dengan adanya Perkap 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE di Polri, guna menunjang satu data Polri sebagaimana amanat dari Perkap 4 Tahun 2022. Adapun upaya yang telah sedang dan akan dilakukan Polda Lampung adalah tetap secara berkelanjutan melakukan pembinaan penguatan SPBE, kegiatan asistensi, bimteks, koordinasi, *benchmarking* dengan instansi di daerah Lampung atau dengan kesatuan kewilayahan lainnya.

IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

Pada indikator kinerja ini merupakan indikator dalam mengelola media informasi sebagai *evidence*/bukti pendukung dalam mengetahui

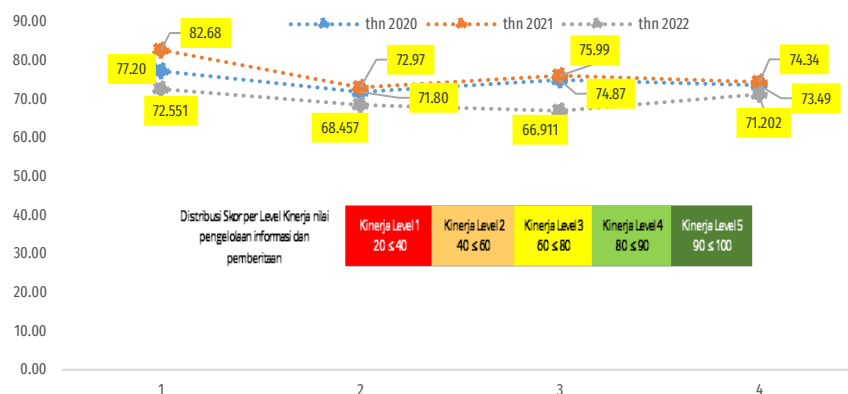
outcome/hasil dari pelaksanaan tupoksi Polda Lampung yang terdokumentasikan baik di internal dan di masyarakat melalui media *online*, sehingga menjadi alat ukur dari ekspektasi masyarakat atas kepercayaan atas aktualisasi Polda Lampung dari kegiatan legalitas menjadi sebuah legitimasi dari masyarakat. Adapun penilaian didasari pada dimensi kegiatan intelijen media management, dimensi produksi *release* berita dan *ekspose* serta dimensi kegiatan peliputan, dokumentasi dan monitoring pemberitaan media pemberitaan. Adapun capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

Tabel 12. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.

SS. Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan										
IKP. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
50,00	74,34	73,49	71,20	52,00	120,00%	-3,11%	52,50	120,00%	53,00	120,00%

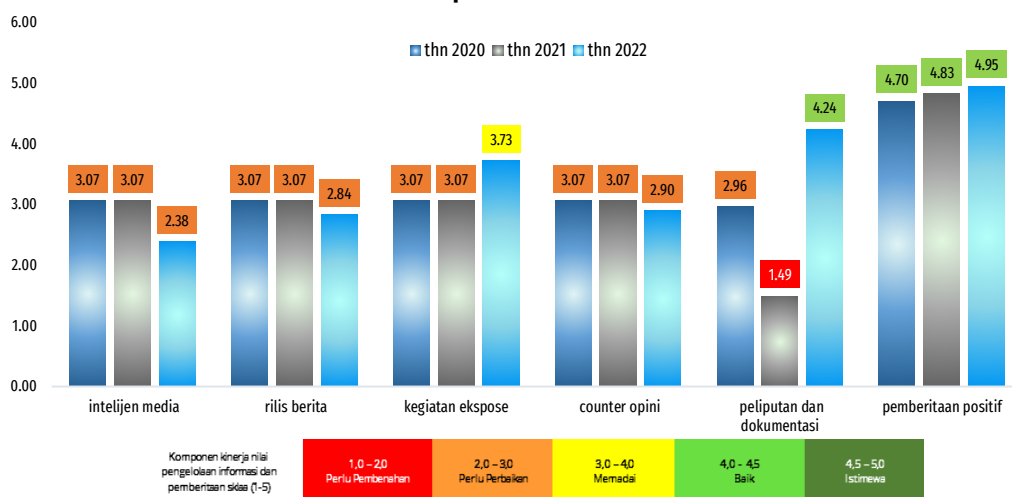
Apabila melihat realisasi tahun 2022, maka target kinerja pengelolaan informasi pemberitaan tercapai 120,00%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 3,11%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, maka capaian kinerjanya masih di atas 100%. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas untuk masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi mulai dari pengelolaan informasi dan dokumentasi, penerangan masyarakat serta pengelolaan konten multimedia, yang menyajikan kinerja Polda Lampung dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Secara umum beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pengelolaan informasi pemberitaan saat ini adalah akselerasi dalam penyusunan, penyajian dan menyebarkan berita serta *counter* opini yang efektif. Demikian juga pengelolaan media dan media sosial yang berkelanjutan. Berikut ini gambaran dinamika kinerja indeks harkamtibmas pertriwulan dalam tiga tahun terakhir:

Gambar 30. Dinamika nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan nilai pengelolaan informasi pemberitaan setiap triwulan berada pada level kinerja 60-80, yaitu pada rentang kinerja level 3 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 menunjukkan dinamika kinerja pengelolaan informasi dan pemberitaan terus mengalami penurunan setiap triwulannya apabila dibandingkan dengan tahun 2021. walaupun demikian penurunan ini masih aman berada di atas target yang telah disepakati pada Resntra 2020-2024. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, kegiatan pengelolaan informasi pemberitaan yang dilaksanakan fungsi humas Polda Lampung dan jajaran secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya manajemen media yang mendukung terhadap tupoksi Polda Lampung. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut dari pada kontribusi **enam komponen penyusun IKP Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 31. Kontribusi kinerja komponen nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.



Sepanjang **tahun 2022** terdapat **tiga komponen penyusun Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan yang memerlukan upaya**

perbaikan. Adapun komponen tersebut adalah kegiatan pada komponen **intelijen media, rilis berita dan counter opini** yang menunjukkan nilai kinerja pada interval 2,0-3,0. Adapun faktor penyebabnya adalah karena hubungan paralelnya peristiwa pada institusi Polri, juga berimbas pada satuan di kewilayahan, kita ketahui bersama selama tahun 2022 hasil survey salah satu lembaga survey nasional telah melansir hasil survey kepercayaan publik sampai



Gambar 32. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

pada poin 53%, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun. Opini publik terhadap institusi Polri juga berdampak pada kesatuan kepolisian yang ada termasuk Polda Lampung dan jajaran. Hal ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi preseden buruk. **Upaya yang dilakukan Polda Lampung sekaligus sebagai satuan kewilayahan untuk meningkatkan nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan dengan memanfaatkan momentum digelarnya program quick wins presisi,** yang terdiri dari sembilan program mulai dari; meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial; optimalisasi pelayanan publik; pengembangan SDM unggul; perbaikan interaksi Polisi dengan masyarakat di jalan atau di area publik; optimalisasi pemolisian masyarakat; penguatan kerja sama dengan pihak eksternal; penerapan budaya integritas dan anti korupsi; respon problem akut; dan digitalisasi penegakan hukum lalu lintas.

Program pertama menjadi tanggung jawab fungsi humas yakni meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial, segera melakukan akselerasi dengan strategi terselenggaranya amplifikasi konten positif Polri melalui media sosial dan media *online*. Dengan direktif Surat Telegram Kapolda Lampung No: ST/21/XI/Hum.1.4./2022 tanggal 15 November 2022 tentang peningkatan kepercayaan masyarakat melalui media sosial dan ST/22/XI/Hum.1.4./2022 tanggal 30 November 2022 tentang setiap satker memiliki akun resmi media sosial serta aktif melakukan interaksi terhadap akun resmi Bidhumas Polda Lampung. mengoptimalkan pembuatan artikel/berita sentiment positif dan *counter* opini untuk berita sentiment negatif. Kemudian membuat konten dan narasi berita/artikel yang didesain lebih variatif dan menarik, baik secara visual dan audio. Unggahan konten yang positif dan menarik diposting secara masif setiap hari. Penggunaan kata kunci setiap konten pada *platform* media sosial, disertai identitas kesatuan baik Polda maupun Polres/ta. Demikian juga penyampaian kasus

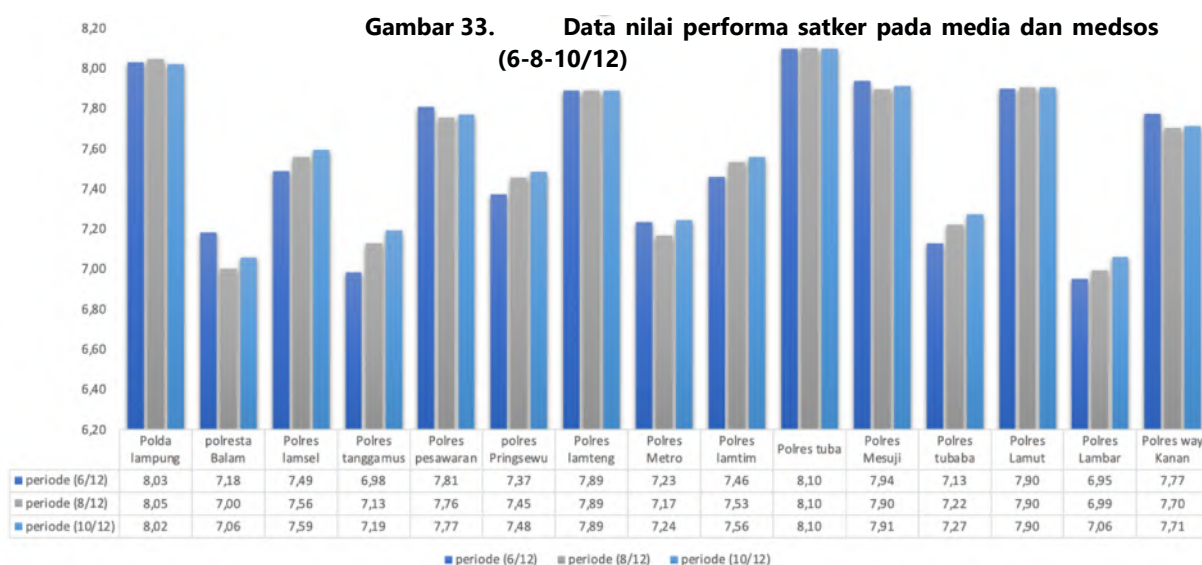
internal, agar dilokalisir dan melakukan mitigasi proses penyelesaian pelanggaran dan secara elegan untuk dipublikasikan pada media dengan porsi tepat, tidak menjadi *issue* yang blunder, disertai dengan membangun kerja sama dengan media dan *influencer* dengan mengangkat tema yang kreatif dan menarik.

Dari hasil program *Quick Wins* Presisi yang berlangsung 40 hari dari akhir Oktober sampai dengan 10 Desember 2022, berdasarkan **penilaian mandiri** terhadap performa satker pada media dan media sosial diperoleh data pendukung untuk perhitungan **indeks performa satker pada media dan medsos** di lingkungan Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel 13. Data mentah penyusun nilai performa satker pada media dan media sosial (10/12)

no.	satker	jumlah ekpose/berita di media	jumlah ekpose/berita di medsos	jumlah sentimen pada media			jumlah sentimen pada medsos			jumlah keterikatan dengan medsos
				sentimen positif +	sentimen negatif -	sentimen netral	sentimen negatif +	sentimen negatif -	sentimen netral	
1	Polda Lampung	4764	267	2485	3	2282	220	3	190	267098
2	Polresta Balam	214	171	101	2	121	71	1	130	1655
3	Polres Lamsel	155	158	72	0	97	57	0	120	2054
4	Polres Tanggamus	154	94	104	0	101	36	0	88	1841
5	Polres Pesawaran	108	248	68	0	80	77	0	111	3970
6	polres Pringsewu	160	87	100	0	101	52	0	65	2924
7	Polres Lamteng	242	382	158	0	116	63	2	335	2524
8	Polres Metro	103	215	81	0	80	35	0	210	1373
9	Polres Lamtim	228	102	134	0	135	48	0	84	3274
10	Polres Tuba	189	266	144	0	134	60	0	230	2534
11	Polres Mesuji	145	228	70	0	103	40	0	210	2390
12	Polres Tubaba	216	70	157	0	137	36	0	64	2194
13	Polres Lamut	183	230	125	0	140	53	2	207	9250
14	Polres Lambar	105	75	58	0	90	40	0	66	5890
15	Polres Way Kanan	150	245	108	0	100	40	3	235	2473

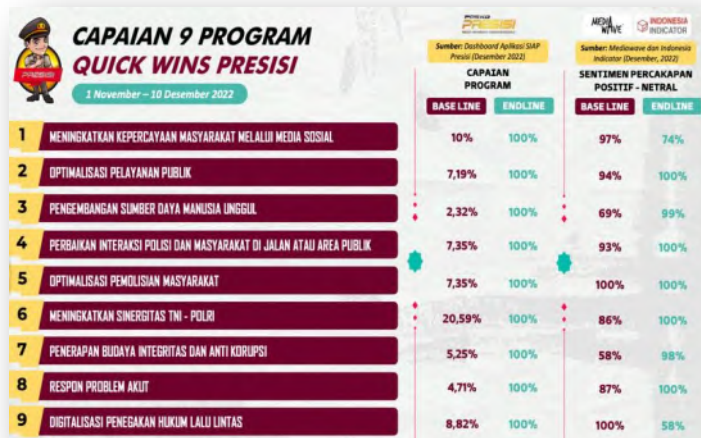
Adapun hasil pengolahan indeks ekspos media (IEM), indeks ekspos medsos (IES), indeks sentimen positif media, indeks sentimen negatif media; indeks sentimen positif medsos, indeks sentimen negatif medsos dan indeks *engagement*/keterikatan medsos (ENS) yang dipantau pada lima hari terakhir dari tanggal 6-8-10 Desember 2022, sebagai sebagai berikut:



Dari data tersebut di atas, maka diperoleh nilai perfoma satker pada medsos yang tertinggi sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 adalah Polres Tulang Bawang dan Polda Lampung berada pada interval nilai 8,00-8,99 disusul 13 Polres lainnya yang berada pada interval nilai 7,0-7,99. Sampai dengan tanggal 10 Desember ini, sudah tidak ada lagi nilai performa satker di nilai 7,00. Dengan melihat hasil anev nilai performa satker terhadap medsos, dapat menjadi bahan masukan bagi satker dan Polres di lingkungan Polda Lampung, untuk terus meningkatkan aktualisasi kegiatan dan dinamika operasional yang selalu diekspos dan *diengagement* melalui media dan medsos, dibarengi dengan peningkatan kualitas kegiatan peliputan, penyusunan rilis berita, ekspos di media dan medsos, melalui peningkatan kemampuan kapasitas dan kapabilitas personel dalam berliterasi, tidak hanya untuk personel fungsi kehumasan, tetapi juga untuk semua personel Polda Lampung, agar dapat memanfaatkan media *online* dan media sosial yang efektif.

Selanjutnya tiba akhirnya evaluasi dari Mabes Polri terhadap implementasi program *Quick Wins* presisi 2022, berdasarkan hasil **analisis dampak akhir dari program Quick Wins Presisi 2022**, penilaiannya yang meliputi; **pertama self assesment** (seperti data

yang ditampilkan di atas, **kemudian kedua** diperoleh hasil secara nasional mengenai *media monitoring and sentiment analysis* yang menggambarkan jumlah percakapan publik dan sentimen berita tentang program *Quick Wins* Presisi, dimana Polri bekerja sama dengan sebuah lembaga monitoring yang bernama *mediawave*, yakni sebuah *platform* monitoring dan



Gambar 34. Data hasil media monitoring and sentiment analysis, 2022

analisis media sosial, yang melakukan analisis percakapan dan pemberitaan media sosial terkait program *quick wins* presisi 2022. Diperoleh informasi dari *mediawave* terkait program meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial dari baseline 97% kemudian digulirkan program *quick wins* selama 10 hari dengan hasil 74%, cukup baik untuk mendokrak dari survey tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya ketiga berupa **public opinion survey** Menggambarkan tentang kepercayaan publik terhadap Polri, *awareness* publik terhadap Program *Quick Win* Presisi dan kepercayaan publik

terhadap Polri, dan lain-lain yang berhubungan institusi Polri. Adapun pertanyaan dalam survey tersebut adalah “menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara di antara lembaga tinggi negara di bawah ini (Polri). Apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali? Dalam survey ini Polri bekerja sama dengan lembaga survey charta politica, dengan hasil untuk Polda Lampung dengan skor 83,33 masyarakat menyatakan percaya dan sangat percaya, kemudian 16,67% masyarakat menyatakan kurang percaya dan tidak percaya sama sekali. Selanjutnya Polda Lampung untuk tahun berikutnya tetap mengoptimalkan dalam pengelolaan informasi dan pemberitaan dengan tetar meningkatkan performa kinerja kehumasan.

KEPERCAYAAN PUBLIK POLRI PER POLDA (CROSSTAB)

Menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara di antara lembaga tinggi negara di bawah ini (Polri), apakah Bapak/Ibu/Saudara sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali?

No.	Wilayah	Persentase Sangat Percaya	Kurang percaya & Tidak percaya sama sekali	T1/T2
1	Bengkulu	87.50%	2.50%	
2	Sulawesi Utara	80.00%	10.00%	
3	Sulawesi Selatan	83.33%	16.67%	
4	Lampung	83.33%	16.67%	
5	Jambi	80.00%	17.50%	2.50%
6	Sulawesi Barat	75.00%	25.00%	
7	Kalimantan Tengah	75.00%	25.00%	
8	Sumatera Selatan	75.33%	26.67%	
9	Maluku	72.50%	27.50%	
10	Jawa Tengah	71.11%	28.33%	0.56%
11	Papua Barat	70.00%	30.00%	
12	Nusa Tenggara Timur	70.00%	30.00%	
13	Papua	67.50%	30.00%	2.50%
14	Kep. Bangka Belitung	67.50%	30.00%	2.50%
15	DKI Jakarta	65.71%	31.43%	2.86%
16	Kalimantan Utara	65.00%	32.50%	2.50%
17	Gorontalo	65.00%	35.00%	
18	D.I. Yogyakarta	65.00%	35.00%	
19	Aceh	65.00%	35.00%	
20	Sulawesi Tengah	62.50%	37.50%	
21	Maluku Utara	60.00%	40.00%	
22	Kepulauan Riau	60.00%	40.00%	
23	Kalimantan Timur	60.00%	40.00%	
24	Sumatera Utara	58.75%	41.25%	
25	Riau	58.00%	42.00%	
26	Bali	57.50%	42.50%	
27	Jawa Timur	53.33%	43.33%	5.79%
28	Jawa Barat	49.01%	48.20%	2.86%
29	Banten	48.57%	51.43%	
30	Sulawesi Tenggara	47.50%	52.50%	
31	Kalimantan Selatan	45.00%	40.00%	15.00%
32	Nusa Tenggara Barat	42.50%	35.00%	22.50%
33	Kalimantan Barat	42.50%	57.50%	
34	Sumatera Barat	26.00%	56.00%	18.00%

Sumber: Charta (Desember, 2022)
Responden 2000

Gambar 35. Data hasil survey kepercayaan publik charta

5. Sasaran Strategis (SS5)

Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.

Sasaran ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kegiatan proses bisnis yang harus dimiliki oleh Polda Lampung secara manajerial pengawasan kepolisian guna memanfaatkan sumberdaya secara efektif untuk mengimplementasikan tupoksi organisasi dalam mengelola kebijakan pimpinan Polri, melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas organisasi; tata kelola kepolisian; memperhatikan kepuasan masyarakat atas layanan kepolisian; penanganan dumas, penyelesaian pelanggaran personel dan penanganan masalah hukum serta mengelola kinerja anggaran, sehingga dapat diketahui faktor keunggulan dan potensi kelemahan serta berupaya untuk merumuskan bagaimana cara mengatasi dan memperbaikinya.

Kegiatan proses bisnis ini berupa internalisasi pembelajaran pertumbuhan yang dilaksanakan oleh Satker pembina fungsi dalam SOTK mulai unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang) dan unsur pelaksana tugas pokok (Direktorat dan Satuan Brimob). Sehingga manajerial pengawasan kepolisian ini dapat meningkatkan kinerja, yang dalam implementasinya berorientasi pada keberhasilan pencapaian apa yang harus dikerjakan (*internal process business perspective*) dan ekspektasi masyarakat (*stakeholder perspective*) sebagai suatu langkah konstruktif untuk meningkatkan kemampuan individu, unit, organisasi serta menganalisa objek tupoksi, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, kendala, hambatan, kesempatan dan peluang-peluang yang diformulasikan menjadi langkah/usaha/strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, serta memanfaatkan peluang dan kesempatan yang relevan, merancang ide/gagasan dan rencana aksi untuk digunakan secara efektif atas dasar sumber daya yang berkesinambungan yang diimplementasikan secara nyata, dimonitor dan dievaluasi serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan.

Pada indikator kinerja pendukung ini penilaian didasari pada penguatan organisasi melalui implementasi kemampuan dalam memberikan petunjuk arahan dan daya kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan kebijakan pimpinan Polri sebagai suatu yang harus dimiliki dan dijalankan satker pembina fungsi kepolisian mulai dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan (Inspektorat, Biro dan Bidang), unsur pelaksana tugas Pokok (Direktorat dan Satuan Brimob), agar kapabilitas dan kapasitas organisasi menjadi efektif dan optimal, melalui rekapitulasi jumlah kegiatan kapabilitas dan

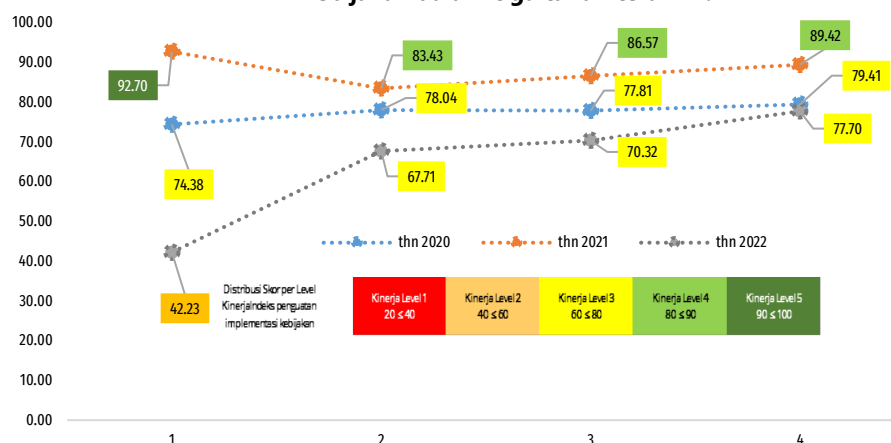
kapasitas organisasi yang efektif selama TAB. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dimensi penguatan kapabilitas dan dimensi penguatan kapasitas organisasi. Ruang lingkup dalam penguatan kapabilitas menyangkut kemampuan satker pembina fungsi memberikan petunjuk dan arahan dalam bentuk surat, surat telegram, aturan dalam bentuk keputusan, peraturan dan penyelenggaraan MoU untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan penguatan kapasitas organisasi menyangkut peningkatan daya tampung kemampuan organisasi melalui sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis dan rapat teknis. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 14. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks penguatan implementasi kebijakan.

SS, Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP, Indeks penguatan implementasi kebijakan										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
70,00	79,41	89,43	77,70	73,00	106,44%	-13,11%	74,00	105,00%	75,00	103,60%

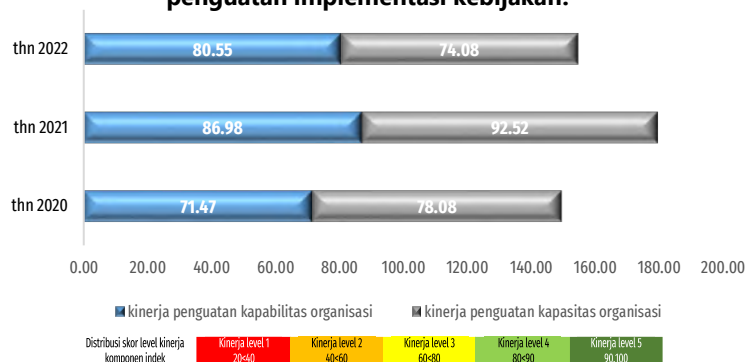
Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja Indeks penguatan implementasi kebijakan tercapai 106,44%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 13,11%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 ,maka capaian kinerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu dilakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas implementasi kebijakan kepolisian dalam mendukung kinerja sasaran strategis manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel. Secara umum terdapat beberapa **hal-hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penguatan implementasi kebijakan Polri** di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah akselerasi monitoring terhadap kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang dilakukan satker pembina, baik unsur pengawas/pembantu pimpinan maupun unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Polda, bagaimana agar aturan, kebijakan program pimpinan, dapat diimplementasi oleh semua satker di lingkungan Polda Lampung. Berikut ini gambaran dinamika indeks penguatan implementasi kebijakan per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut.

Gambar 36. Dinamika kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan dalam tiga tahun terakhir.



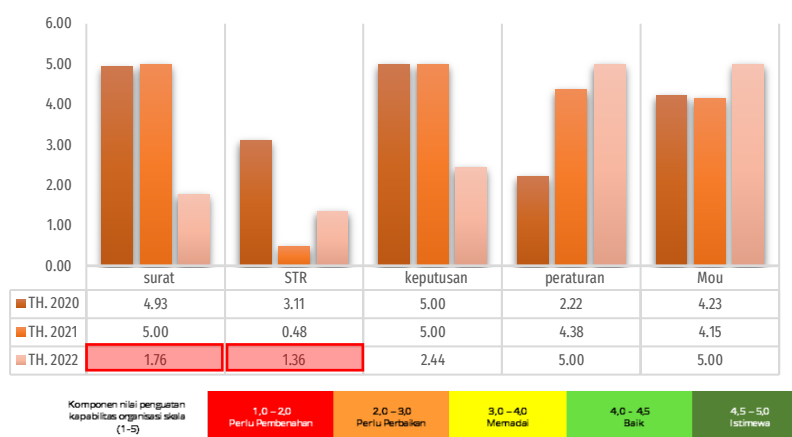
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penguatan implementasi kebijakan, dalam setiap triwulan selama tiga tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 3-5, yaitu pada rentang kinerja 60–100 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 perbandingan kinerja pada triwulan I diawali pada kinerja level 2, kemudian pada triwulan II sampai dengan triwulan IV berada pada kinerja level 3. Pada tahun ke tiga Renstra ini kinerja penguatan implementasi kebijakan setiap triwulannya kinerjanya berada di bawah tahun 2020 dan 2021, tetapi tetap menjaga realisasi kinerjanya masih dapat mencapai target. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2022, kinerja penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi yang diselenggarakan unsur baik fungsi pengawas/pembantu pimpinan maupun unsur pelaksana tugas pokok secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penguatan implementasi kebijakan, yang patut dibanggakan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **dua komponen penyusun IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 37. Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja indeks penguatan implementasi kebijakan.



Sepanjang **tahun 2022 terhadap kinerja dua komponen penyusun kinerja penguatan implementasi kebijakan berada pada kinerja level 3** Semua komponen kinerja penguatan implementasi kebijakan baik penguatan kapabilitas organisasi maupun penguatan kapasitas organisasi. Terlihat kinerja komponen tahun 2022 mengalami kuantitas penurunan dibanding dua tahun sebelumnya, tetapi secara umum dapat mendukung terhadap pencapaian target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 77,07. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja** komponen indikator IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan sampai dengan saat ini, adalah berkaitan dengan upaya pelaksanaan kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas yang lebih selektif prioritas, sehingga kegiatannya lebih pada kualitas, sehingga mengalami penurunan kuantitas kegiatan, melainkan memperbanyak kegiatan monitoring dan evaluasi oleh setiap satker pembina fungsi. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana kontribusi kinerja sub komponen dari masing-masing komponen nilai penguatan kapabilitas dan penguatan kapasitas organisasi selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

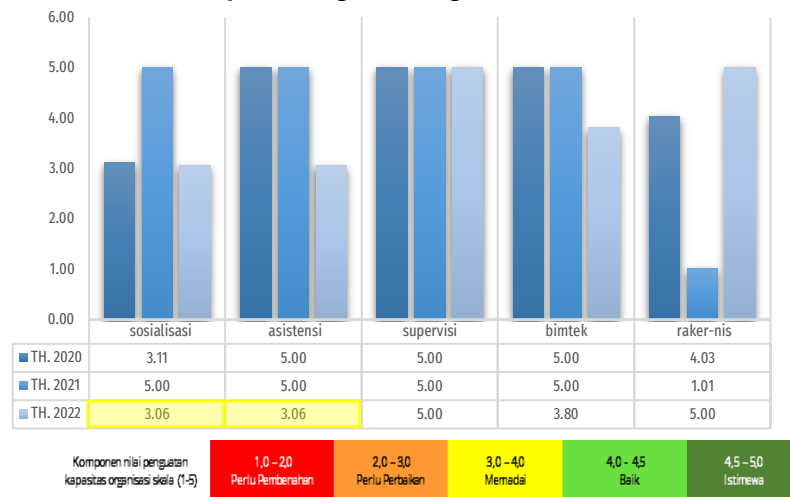
Gambar 38. Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapabilitas organisasi tiga tahun terakhir



Pada tahun 2022 kinerja Nilai penguatan kapabilitas organisasi yang terdiri lima subkomponen, masing-masing penerbitan direktif baik melalui surat dan surat telegram, penetapan aturan melalui surat keputusan Kapolda dan Peraturan Kapolda serta penyelenggaraan MoU. Terlihat kinerja penerbitan direktif surat dan surat telegram mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan situasi yang berkembang dalam mendukung pencapaian target perspektif di atasnya pada peta strategi Polda Lampung. Kemudian apabila melihat kinerja Nilai penguatan kapasitas organisasi yang terdiri dari lima subkomponen mulai dari penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, aisitensi, supervisi, bimbingan teknis/TOT dan rapat-rapat teknis mulai

dari kegiatan rapat staf, rapat kerja dan gelar operasional dan pembinaan sebagai berikut:

Gambar 39. Kontribusi kinerja subkomponen nilai penguatan kapasitas organisasi tiga tahun terakhir.



Terlihat kinerja subkomponen Nilai penguatan kapasitas organisasi pada tahun 2022 kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimtek nilainya cukup memadai dan terdapat kecenderungan menurun dibanding tahun 2021, sedangkan kegiatan supervisi dan rakernis berada pada nilai 5, menunjukkan pelaksanaan kegiatannya optimal. Secara keseluruhan kegiatan penguatan kapasitas organisasi tahun 2022 tidak terdapat nilai kinerja yang perlu diperbaiki, tetapi perlu ditingkatkan dengan menggali bagian-bagian dari tupoksi pada SOTK

Penguatan Kapabilitas Organisasi						
No.	Usur dalam SOTK Polda	Surat	TR/STR	Kep	Peraturan Kapolda	MoU
1.	Unsur Pengawas/ Pembantu Pimp.	3551	1049	1038	1	32
2.	Unsur Pelaks Tupoksi	3074	721	106	Series *thn 2020* Legend Entry	
3.	Unsur Pendukung	1042	34	68	0	8
Penguatan kapasitas organisasi						
No.	Usur dalam SOTK Polda	Sosialisasi	Asistensi	Supervisi	Latnis/ Bimtek/Tot	Rapatstaf Rakernis, Go
1.	Unsur Pengawas/ Pembantu Pimp.	381	49	34	29	246
2.	Unsur Pelaks Tupoksi	92	62	144	86	28
3.	Unsur Pendukung	15	4	2	18	18

Tabel 15. Kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi, 2022

Bidhumas); unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari 11 satker (Ditintelkam, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditpolairud, Ditlintas, Ditpamobvit, Satbrimob, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Dittahti) serta 4 satker unsur pendukung (Biddokkes, Bidkeu, Bid TIK dan SPN), hasil rekapitulasi kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa baik kegiatan penguatan kapabilitas maupun kapasitas organisasi yang dilakukan satker unsur pengawas/pembantu pimpinan adalah yang terbanyak,

Polda yang dirasakan perlu direvitalisasi. Selanjutnya banyaknya kegiatan penguatan kapabilitas dan kapasitas organisasi berdasarkan SOTK Polda Lampung, mulai dari unsur pengawas/pembantu pimpinan terdiri dari 10 satker (Itwasda, Roops, Rorena, Rolog, Ro SDM, Bidpropam, Bidkum, Yanma, Spripim,

Untuk jenis indikator dalam penilaian ITK ini masing-masing terdapat indikator umum, yang merupakan indikator yang ada pada semua satker, dan digunakan untuk mengukur seluruh satker dan terdapat 25 indikator generik pada satker Polda yang dalam hal ini sepekat dari tahun 2020 yang dilakukan penilaian ITK Polda Lampung yaitu padan 12 Polres. Sedangkan indikator penilaian lainnya yang spesifik yaitu yang hanya berlaku pada satker/satfung tertentu saja sesuai tupoksi. Adapun untuk penilaian ITK TAB 2022 merupakan penilaian mandiri yang dilakukan khususnya pada 12 Polres di Polda Lampung. Selanjutnya hasil capaian dari indikator kinerja pendukung ini sebagai berikut:

Tabel 16. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Indeks tatakelola Kepolisian TAB 2022.

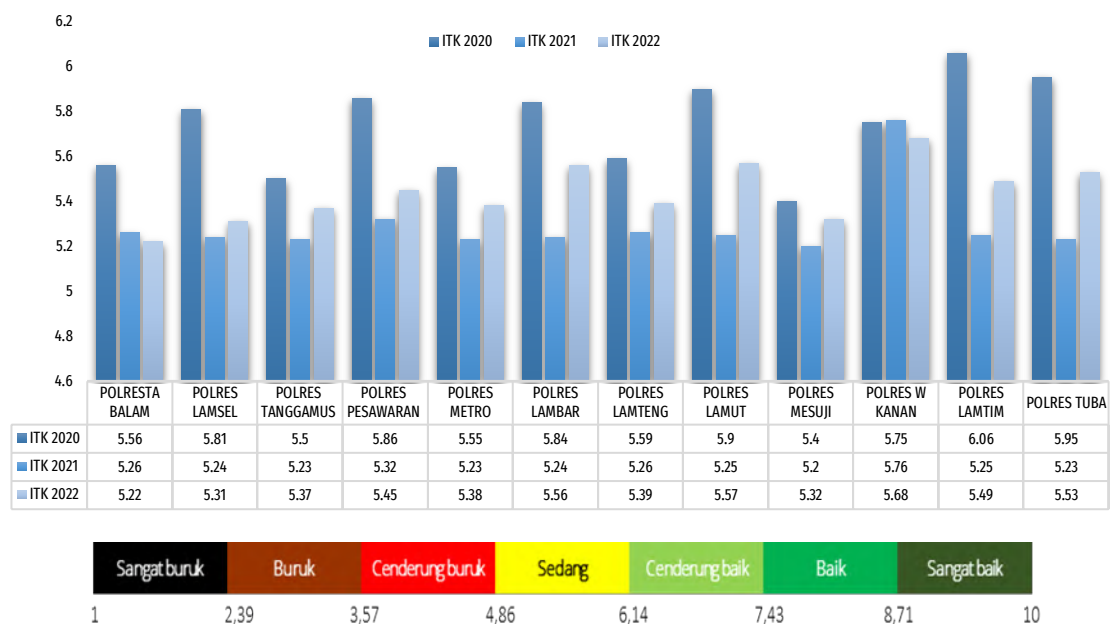
SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP ₃ Indeks tata kelola Kepolisian (ITK)										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
5,00	5,73	5,25	5,44	5,30	102,63%	3,60%	5,40	100,73%	5,50	98,89%

Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja indeks Tata Kelola Kepolisian tercapai 102,63%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 3,62%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 masih dapat tercapai 100,73% dan dengan target 2024, maka capaian kinerjanya turun menjadi 98,89%**. Artinya kinerja tata kelola kepolisian yang telah dilaksanakan selama TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas pelayanan publik dasar pada masa yang akan datang, yang penuh dengan dinamika, maka masih perlu untuk ditingkatkan performa kinerja yang diiringi dengan usaha perbaikan dalam penataankelolaan fungsi kepolisian yang ada sesuai dengan indikator penilaian sebagai mana amanat dari Perkap Nomor 5 Tahun 2018. Hasil dari realisasi kinerja indeks tata kelola kepolisian Polda Lampung samapai dengan saat ini berdasarkan penilaian terhadap 12 Polres yang dijadikan role model dalam penatakelolaan fungsi kepolisian sebagai mana yang telah disepakati dalam Renstra 2020-2022.

Keberhasilan kinerja ini tentunya merupakan upaya bersama baik dari pembina fungsi Rorena maupun 12 Polres yang ditunjuk dalam meningkatkan pemahaman bersama terhadap implementasi indeks tatakelola kepolisian sebagai fondasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Polri. Fungsi RBP Rorena Polda Lampung perlu terus meningkatkan penguatan dalam implementasi ITK pada satker lainnya. Karena dalam penilaian ITK ini, terdapat pertanyaan indikator-indikator

yang harus detail yang disertai dengan jawaban yang lengkap dengan bukti pendukungnya, hal ini guna menambah skor nilai yang sesuai dengan ekspektasi sebagai mana metodologi AHP (*analitical Hierarchy process*). Metodologi AHP merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisi dengan pemilihan-pemilihan sebagai alternatif dalam penilaiannya. Hal ini menyangkut tujuh prinsip (kompetensi, keadilan, perilaku, transparansi, efektivitas, responsif dan akuntabilitas), yang harus ada pada satker yang dinilai, kemudian masing-masing prinsip tersebut terdapat indikator lengkap dengan pengukurannya menyangkut isu pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, (indikator tentang SDM, sarpras, anggaran, pengawasan, sistem dan metode, inovasi dan sistem pelaporan). Berikut ini disajikan gambar sebaran skor hasil penilaian ITK TAB 2022 sebagai berikut:

Gambar 42. Dinamika skor ITK pada 12 Polres Polda Lampung tiga tahun terakhir.



Terlihat hasil skor penilaian ITK pada dua belas Polres yang ditunjuk berada kisaran skor 5 dengan kategori sedang dalam sistem penilaian indeks tatakelola kepolisian. Selanjutnya upaya untuk meningkatkan nilai indeks tata kelola kepolisian ini; pertama bahwa dalam mengimplementasikan tatakelola kepolisian ini diperlukan komitmen bersama baik dari unsur pimpinan maupun seluruh personel, untuk bersama-sama memperbaiki pelaksanaan tugas melalui tujuh prinsip tata kelola; kedua harus selalu siap siaga melakukan penguatan melalui langkah konstruktif dengan ekspektasi yang jelas, sudah jelas terjalin komunikasi mengenai harapan dari setiap anggota Satker dengan hasil yang diinginkan; ketiga setiap anggota satker menyadari dan memahami mengapa berpartisipasi dalam tata kelola kepolisian keempat setiap personel satker memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dan

mengambil area tanggung jawab yang diberikan dan menyusun strategi dalam menyelesaikan tugasnya; kelima setiap personel satker memahami batasan-batasan yang jelas, seberapa jauh anggota boleh memberikan solusi; keenam setiap personel satker bersedia berkolaborasi dalam bekerja yang efektif; tujuh jalin komunikasi yang baik antar personel satker disertai dengan kreativitas, bertanggung jawab, **fokus** dan terarah menuju budaya kerja yang harmonis.

IKP.9 **Indek kepuasan pelayanan kepolisian**

Indikator kinerja ini memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan administrasi kepolisian di lingkungan Polda Lampung dan jajaran, dalam mengakomodir layanan dasar publik (pelayanan yang umumnya dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian secara umum. Personel Polri yang prediktif, responsibilitas, transparan berkeadilan yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi harapan masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang paripurna. Hal ini sejalan dengan program Kapolri transpormasi Polri menuju presisi program yang keempat yaitu tranformasi pelayanan publik. Hal yang diharapkan dari IKU ini adalah adanya ekspekstasi yang baik dan positif dari masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian, khususnya pelayanan pada fungsi SPKT, satpas SKCK, satpas SIM dan pelayanan satu atap terhadap STNK dan BPKB. Indikator kinerja ini diukur melalui penyebaran kuisiner Indeks Kepuasan Masyarakat secara *online* pada 54 sentra pelayanan administrasi Kepolisian, yang meliputi SPKT, Satpas SKCK, Satpas SIM dan Samsat. Berikut ini tabel analisa dan evaluasi capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian sebagai berikut:

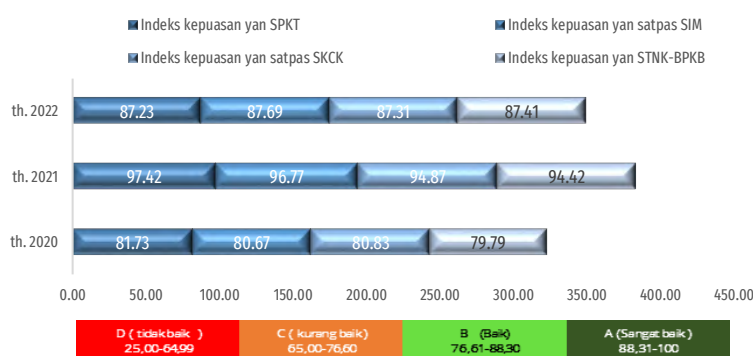
Tabel 17. Analisi dan evaluasi capaian kinerja IKP indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepolisian.

SS ₇ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP, Indek kepuasan layanan kepolisian										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
78,00	80,91	96,19	87,40	81,00	107,90%	-9,14%	82,00	106,59%	83,00	105,30%

Apabila melihat **realisasi tahun 2022**, maka **target kinerja indeks kepuasan masyarakat tercapai 107,90%**, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar **9,14%**. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah

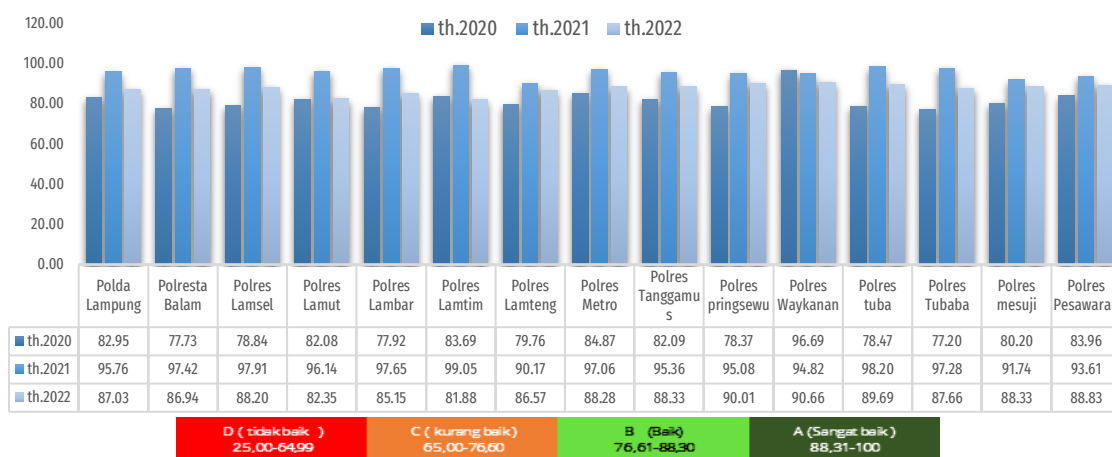
tahun 2023 dan 2024, maka capaian kinerjanya masih di atas 100%. Artinya kinerja pelayanan administrasi kepolisian melalui pencatatan registrasi yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas pelayanan publik dasar pada masa yang akan datang, yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu untuk menjaga performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas dalam melakukan pelayanan dasar publik secara lebih kompleks dan integral dengan pelayanan publik pemerintahan daerah. Secara umum beberapa **hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelayanan dasar publik yang diselenggarakan di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah tetap konsentrasi sentra-sentra pelayanan publik dasar kepolisian yang ditujukan kepada masyarakat Provinsi Lampung dan sekitarnya yang tergelar pada satuan Polres jajaran dan terus melakukan melakukan inovasi, guna meningkatkan pelayanan dengan memperhatikan mekanisme proses bisnis yang sesuai dengan amanat UU no. 25 Tahun 2009 yang dijalankan melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012.** Terutama menyangkut implemtnasi Pasal 21 UU RI Nomor 25 Tahun 2009. Dimana pada Pasal tersebut diterangkan, bahwa yang menjadi komponen dasar dalam standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat tentang dasar, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana/fasilitas, kompetensi petugas, pengawas internal, penanganan pengaduan/saran dan masukan, jumlah petugas, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan prosedur, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko dari keragu-raguan, dan terdapat evaluasi kinerja terhadap petugas pelaksana pelayanan. Ditambah lagi aspek ruangan/tempat dan petugas berikut kelengkapan dalam pelayanan menjadi penentu dari kualitas pelayanan, sehingga memberikan kesan positif bagi masyarakat pengguna layanan dasar kepolisian, demikian juga memberikan kontribusi bagi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Berikut ini gambaran dinamika kinerja kepuasan layanan kepolisian per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut.

Gambar 43. Dinamika kinerja komponen indeks kepuasan layanan kepolisian dalam tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar kepolisian setiap tahunnya terus berada pada kategori baik, terdapat lonjakan indeks pada tahun 2021 semua komponen indeks kepuasan layanan kepolisian berada pada kategori sangat baik pada interval skor 88-100 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai indeks walaupun masih diatas nilai target. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2022, kinerja kepuasan layanan kepolisian yang diselenggarakan 54 unit layanan dasar publik yang ada pada jajaran Polda Lampung memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sasaran strategis manajemen pengawasan yang akurat. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi satker pada **kinerja IKP-9 Indeks kepuasan layanan kepolisian** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 44. Dinamika kontribusi satker pada Indeks kepuasan layanan kepolisian tiga tahun terakhir.



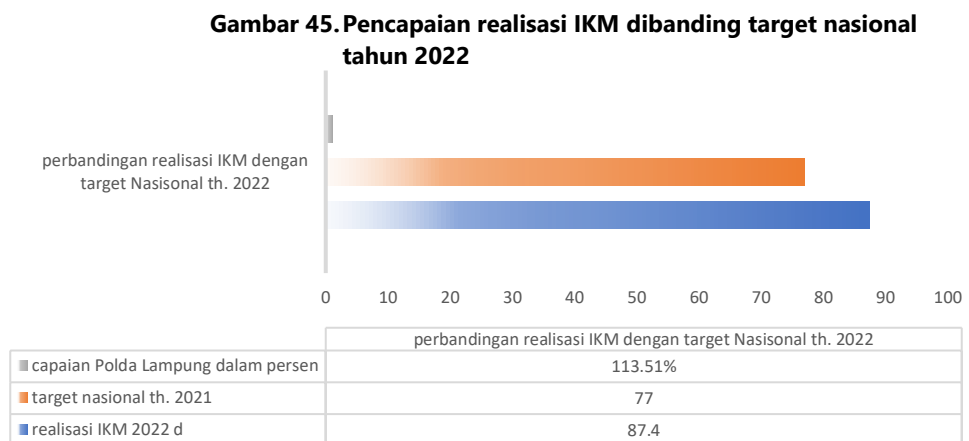
Sepanjang **tahun 2022 terhadap kinerja satker terhadap pencapaian target IKP-9 indeks kepuasan layanan kepolisian berada pada kategori B (baik), kecuali Polres Pringsewu, Way Kanan dan Pesawaran telah masuk pada kategori A (sangat baik).** Semua komponen kinerja indeks kepuasan layanan kepolisian, secara umum realisasi kinerjanya melebihi dari target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 81. Adapun **faktor yang**

Tabel 18. Hasil Kajian IKM Polda Lampung, 2022

NO	SATKER	NILAI IKM				NILAI IKM SATKER	NILAI MUTU IKM (kinerja unit pelayanan)
		SPKT	SKCK	SIM	STNK/ BPKB		
1	SPKT Polda Lampung	90,40			90,40	90,40	A SANGAT BAIK
2	Ditintelkam		86,32		86,32	86,32	B (BAIK)
3	Ditlantas			88,11	84,36	86,24	B (BAIK)
4	Polresta Balam	89,40	86,15	85,27	86,94	86,94	B (BAIK)
5	Polres Lamsel	91,04	84,67	88,88	88,20	88,20	B (BAIK)
6	Polres Lamtim	64,10	91,41	91,54	82,35	82,35	B (BAIK)
7	Polres Metro	83,59	83,64	88,21	85,15	85,15	B (BAIK)
8	Polres Lamteng	85,90	83,59	76,15	81,88	81,88	B (BAIK)
9	Polres Tuba	88,34	88,64	82,73	86,57	86,57	B (BAIK)
10	Polres Mesuji	88,08	87,05	88,21	88,28	88,28	B (BAIK)
11	Polres Lamut	87,65	86,85	90,50	88,33	88,33	A SANGAT BAIK
12	Polres Waykanan	90,36	88,18	91,50	90,01	90,01	A SANGAT BAIK
13	Polres Lambar	90,98	90,89	90,10	90,66	90,66	A SANGAT BAIK
14	Polres Tanggamus	90,04	89,47	89,97	89,69	89,69	A SANGAT BAIK
15	Polres Pesawaran	88,81	87,28	86,90	87,66	87,66	B (BAIK)
16	Polres Pringsewu	90,63	87,73	86,63	88,33	88,33	A SANGAT BAIK
17	Polres Tubaba	87,61	88,23	90,65	88,83	88,83	A SANGAT BAIK
	Nilai IKM per jenis yan	87,23	87,31	87,69	87,41	87,41	B (BAIK)
	Nilai IKM Polda Lampung 2022					87,40	B (BAIK)

mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja IKP-9 indeks kepuasan layanan kepolisian sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran yang menjalankan tupoksi pelayanan langsung kepada masyarakat mampu mengimplementasikan dari kriteria dan persyaratan pelayanan dasar publik kepolisian. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat akan layanan dasar publik kepolisian. Hal ini karena terdapat upaya perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan, mulai aspek personel; menyangkut kompetensi, responsif dan perilaku, kemudian aspek sarpras menyangkut ruang kerja dan almatsus pendukung pelayanan. Sedangkan aspek sistem dan metode menyangkut efektivitas, transparansi, keadilan dan akuntabilitas. Dari evidence ini nyata telah ada upaya peningkatan dalam mengimplementasikan standar pelayanan yang jelas, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU pelayanan publik.

Selanjutnya realisasi kepuasan masyarakat atas pelayanan kepolisian Polda Lampung apabila dibandingkan dengan target nasional 2022 sebesar nilai 78, maka hasil capaiannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Dari gambar di atas apabila realisasi IKM Polda Lampung tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional, maka diperoleh capaian sebesar 113,51%. Keberhasilan ini dimungkinkan terjadi dikarenakan, pertama perbedaan metode yang digunakan Polda Lampung dalam memperoleh nilai IKM dengan mengadopsi Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, sedangkan Mabes Polri menggunakan metode tersendiri melalui Puslitbang Polri. Tetapi dalam kenyataan realisasinya tidak menunjukkan perbedaan realisasi hasil penelitian berada pada kategori baik.

IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

Pada indikator kinerja pendukung ini, penilaian kinerja didasari pada penanganan pengaduan masyarakat atas kinerja satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dan jajaran dalam memberikan pelayanan tupoksi kepada masyarakat selama TAB, yang dilakukan monitor dan dievaluasi oleh Apip dalam hal ini Polda Lampung sebagaimana amanat dalam Perkap 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggara sistem pengendalian instansi pemerintahan (SPIP) di lingkungan Polri. Maka Polda Lampung mengukur sampai sejauh mana penanganan dumasannya memberikan dampak pada peningkatan kinerja tupoksi Polda Lampung dan jajaran. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

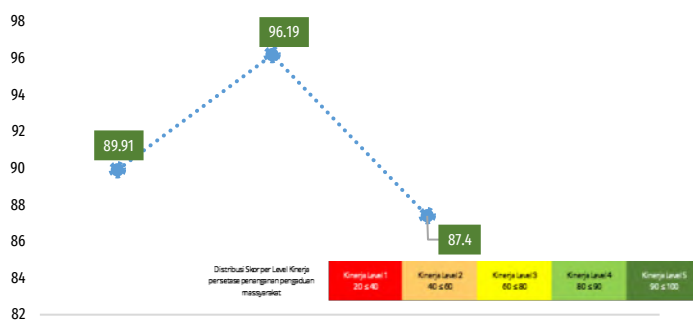
Tabel 19. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penanganan pengaduan masyarakat.

SS ₇ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP ₁₀ Persentase penanganan pengaduan masyarakat										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
58%	91,64%	72,82%	99,08%	67%	120,00%	36,06%	70%	120,00%	73%	120,00%

Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat tercapai 120,00%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami kenaikan sebesar 36,06%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, maka capaian kerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu untuk menjaga performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk tetap mempertahankan kinerja tupoksi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pada internal Polda Lampung. Secara umum beberapa **hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penanganan dumasannya di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah tetap konsentrasi melakukan pengawasan terhadap adanya dumasannya yang ditujukan kepada satker di lingkungan Polda Lampung dan jajaran dan terus melakukan monitoring sampai mekanisme proses bisnis yang dijalankan satker yang diadukannya berjalan sesuai dengan alur pekerjaannya. Faktor keaktifan fungsi dumasannya Itwasda melakukan monev yang optimal, sehingga memberikan kepastian keterangan terbukti atau tidak terhadap tuduhan dalam dumasannya tersebut, demikian memberikan jaminan solusi yang akuntabel dan objektif dalam pelaksanaan tupoksi.** Berikut ini gambaran dinamika kinerja

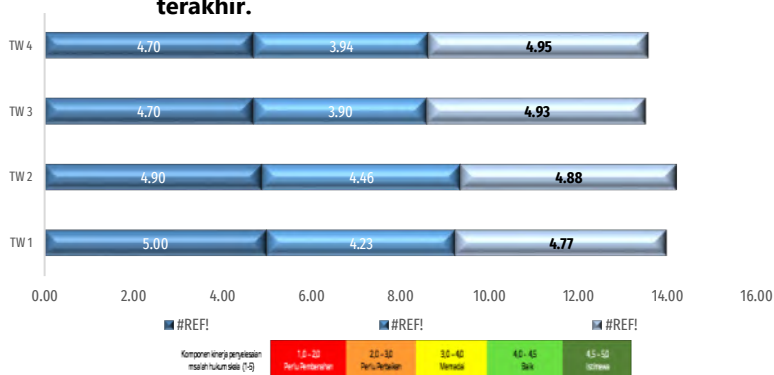
penanganan dumsan per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut.

Gambar 46. Dinamika kinerja persentase penanganan dumsan dalam tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penanganan dumsan setiap triwulan selama tiga tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 4-5, yaitu pada rentang kinerja 80–100 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV menunjukkan dinamika kinerja yang stabil dibanding tahun 2021. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2022, kinerja penanganan dumsan yang diselenggarakan fungsi Itwasda dengan kontribusi dari satker yang mendapat pengaduan secara komplemen memberikan kontribusi terhadap terwujudnya manajemen pengawasan yang akutabel. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **kinerja IKP-10 Persentase penanganan dumsan** pada tiga tahun terakhir pada *skala likert* 1-5 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 47. Perbandingan kinerja penanganan dumsan tiga tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2022 terhadap kinerja kinerja penanganan dumsan dikategorikan istimewa**. Semua komponen kinerja penanganan dumsan, secara umum realisasi kinerja melebihi dari target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai indeks 99,08. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja** IKP-10 persentase penanganan dumsan sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi Itwasda dan

satker yang diadakan untuk bergerak cepat melakukan upaya memberikan penjelasan yang akuntabel dan objektif, mulai dari kegiatan verifikasi, audit kinerja, revidu, sampai pada pendalaman pengawasan khusus dan rekomendasi terjadinya penyimpangan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh fungsi Propam dan fungsi Reskrim. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi sebagai tempat untuk menjamin kualitas kinerja tupoksi kepolisian yang diselenggarakan Polda Lampung dan jajaran. Bersama ini disajikan perkembangan dumasian dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 48. Perkembangan dumasian dalam tiga tahun terakhir.



Data jumlah dumasian tiga tahun terakhir, secara umum terus mengalami penurunan, demikian juga jumlah satker yang diadakan terus menurun, sementara itu pada tahun 2022. Terdapat Polres yang tidak ada dumasian yaitu Polres Metro dan Pringsewu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor menurunnya dumasian, menunjukkan bahwa kinerja dari satuan kerja di lingkungan Polda Lampung dari sisi akuntabilitas dan perbaikan pelayanan mulai menampilkan hasil yang baik. Selanjutnya **upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kinerja penanganan dumasian adalah di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas fungsi itwasda, juga peningkatan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam dari pada Apip dengan satker yang diadukannya terjalin harmonis dan sinergi untuk bersama-sama memberikan penjelasan yang akuntabel terhadap objek yang diadukannya, sehingga menjadi objektif dan akuntabel. Peningkatan kemampuan tersebut juga didukung dengan optimalisasi proses bisnis dalam pengawasan dan pengendalian organisasi di lingkungan Polda Lampung. Fungsi Itwasda selaku Apip juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap dumasian baik yang terbukti maupun tidak terbukti, untuk dijadikan atensi bagi satker agar tetap menjaga kualitas tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya.**

Hasil monev maka dapat dilokalisir daerah hukum Polda Lampung yang mendapat dumas tahun 2022 berada pada 12 Polres kecuali Polres Metro dan Pringsewu. Selanjutnya

adapun data pengaduan masyarakat tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel diatas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2022 jumlah dumas yang ditangani sebanyak 104 dari total 108 dumas sehingga realisasi persentase penanganan

dumas adalah sebesar 99,07%. Sementara dumas yang tidak terbukti sebanyak 1 dumas. Data-data di atas menjadi atensi bagi penguatan kapasitas dan kapabilitas pada tahun berikutnya. Terutama sekali bagi satker-satker yang mendapat pengaduan masyarakat, agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksinya, untuk memberikan pelayanan yang paripurna, objektif dan akuntabel, sambil terus membenahi proses bisnis organisasi, apabila ditemukan kelemahan.

Gambar 49. Daerah hukum Polda yang terdapat dumas, 2022



Tabel 20. Data dumas pada satker yang terjadi TAB 2022.

No.	satuan kerja	jumlah sisa dumas tab-1	jumlah dumas baru	jumlah terbukti	jumlah tidak terbukti	sisa dumas/dalam proses	Persentase penanganan dumas TAB
1	Satker di mapolda	2	56	4	54		100,00%
2	Polresta Balam		16		16		100,00%
3	Polres Lamsel		3	1	1	1	66,67%
4	Polres Tanggamus		1		1		100,00%
5	Polres Pesawaran		1		1		100,00%
6	Polres Lamteng		8		8		100,00%
7	Polres Lamtim		5		5		100,00%
8	Polres Tuba		6		6		100,00%
9	Polres Mesuji		2		2		100,00%
10	Polres Tubaba		1		1		100,00%
11	Polres Lamut		3		3		100,00%
12	Polres Lambar		1		1		100,00%
13	Polres W. Kanan		3		3		100,00%
	jumlah	2	106	5	102	1	1270,24%

terkesan dari yang berperkar merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang dimanifestasikan dengan mengirim surat pengaduan kepada lembaga Kopolnas, Kemenkumham, Sekretaris Negara, atau LSM maupun lembaga lainnya dan perorangan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian yang antisipatif mutlak diperlukan dengan mengedepankan transformasi menuju Polri yang presisi; selalu prediktif dalam menangani perkara, resposibilitas terhadap perkara yang disedang dihadapi dan mengedepankan transparansi yang berkeadilan.

Kendala umum yang terjadi selama ini terjadinya dumas adalah menyangkut transparansi dalam proses penyidikan fungsi reskrim, sehingga

IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.

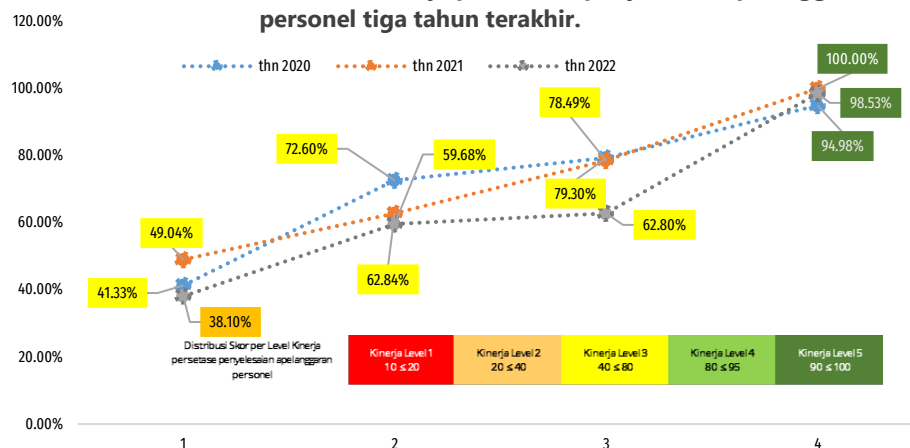
Pada indikator kinerja ini penilaian didasari pada penyelesaian pelanggaran personel di lingkungan Polda Lampung yaitu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri pada setiap TAB, guna menjamin kepastian hukum dan terpeliharanya etos kerja, dedikasi dan loyalitas terhadap organisasi. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 21. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase pelanggaran personel.

SS, Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP ₁₁ Persentase penyelesaian pelanggaran personel										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
80%	94,98%	100%	98,53%	83%	118,71%	-1,47%	84%	118,71%	85%	115,92%

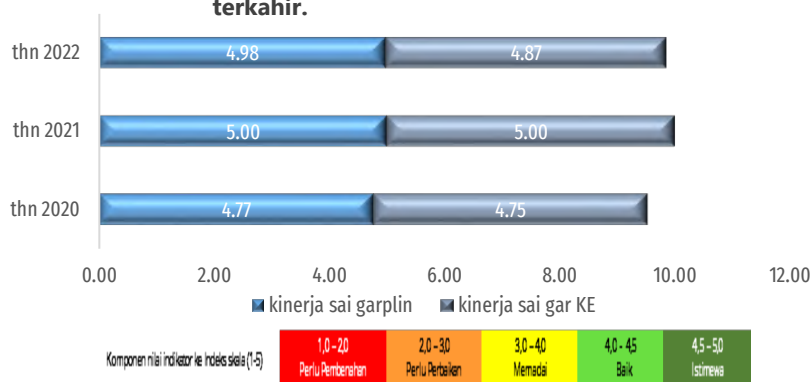
Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tercapai 118,71%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 1,47%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 ,maka capaian kinerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu melakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja penyelesaian pelanggaran personel. Secara umum beberapa **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam penyelesaian pelanggaran personel** di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah akselerasi mitigasi terhadap pelanggaran personel yang dilakukan oleh fungsi Propam. Faktor keaktifan fungsi Propam memproses penyelesaian dan harmonisasi peran optimal dari atasan pemberi hukuman (ankum) untuk memberikan kepastian hukuman, serta pemberian bantuan hukum dalam upaya memperoleh hukuman yang objektif bagi personel yang melanggar. Berikut ini gambaran dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut.

Gambar 50. Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penyelesaian pelanggaran personel setiap triwulan selama tiga tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 2-5, yaitu pada rentang kinerja 30–100 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan III menunjukkan dinamika kinerja yang menurun dibanding tahun 2021, tapi untuk triwulan III mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Secara umum keberhasilan dari kinerja ini, menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2022, kinerja penyelesaian pelanggaran personel yang diselenggarakan fungsi Propam dan jajaran secara komplementer memberikan kontribusi terhadap terwujudnya penyelesaian pelanggaran personel yang patut dibanggakan. Selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya, sampai sejauh mana kontribusi **dua komponen penyusun IKP-11 Persentase penyelesaian personel** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

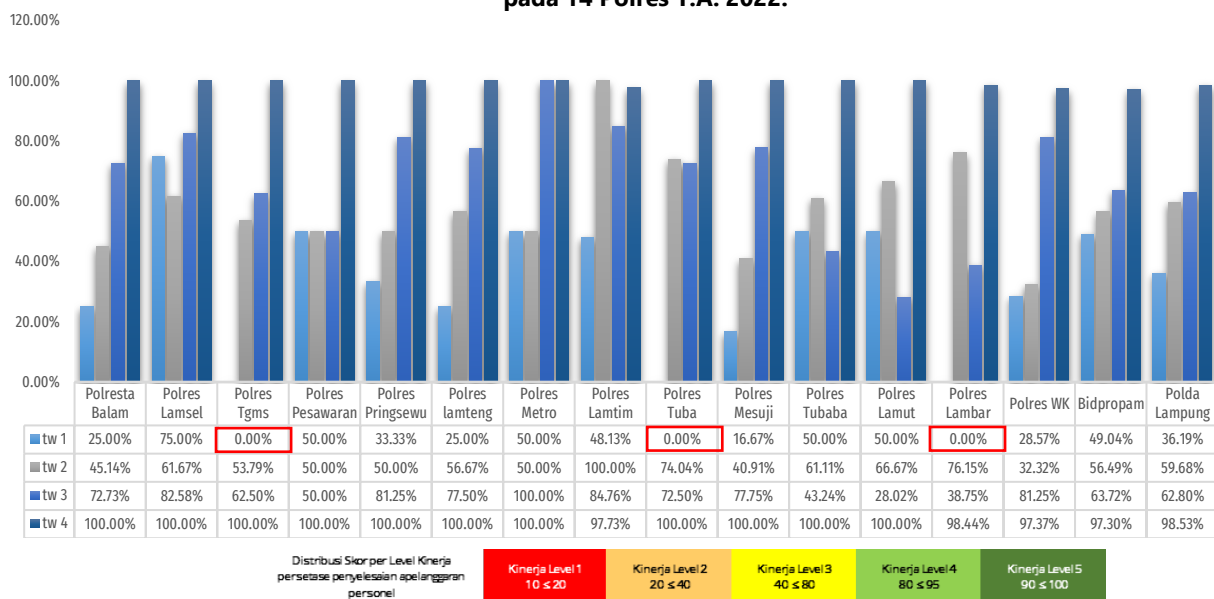
Gambar 51. Perkembangan kontribusi 2 komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personel dalam tiga tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2022 terhadap kinerja dua komponen penyusun kinerja penyelesaian pelanggaran personel dikategorikan istimewa**. Semua komponen kinerja penyelesaian pelanggaran personel baik penyelesaian pelanggaran disiplin maupun penyelesaian pelanggaran kode etik Polri, secara umum dapat diselesaikan melebihi target pada angka indeks yang telah disepakati pada Renstra 2020-2024 pada nilai

indeks 98,53. Adapun **faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan kinerja** komponen indikator IKP-11 persentase penyelesaian pelanggaran personel sampai dengan saat ini, adalah upaya kerja keras dari jajaran fungsi Propam Polda Lampung untuk bergerak cepat melakukan upaya pengungkapan pelanggaran yang dilakukan personel Polda Lampung dan jajaran, mulai dari kegiatan pengamanan, penyelidikan, penyelesaian pelanggaran, pencatatan dan penelitian personel, rehabilitasi sampai pada pembinaan disiplin dan pembinaan etika profesi. Hal ini dilakukan guna mewujudkan ekspektasi kepercayaan dan harapan masyarakat kepada institusi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hakiki sebagai manusia akan rasa aman, tertib dan rasa adil. Bersama ini disajikan kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada TAB 2022 pada satuan Polres jajaran Polda Lampung sebagai berikut:

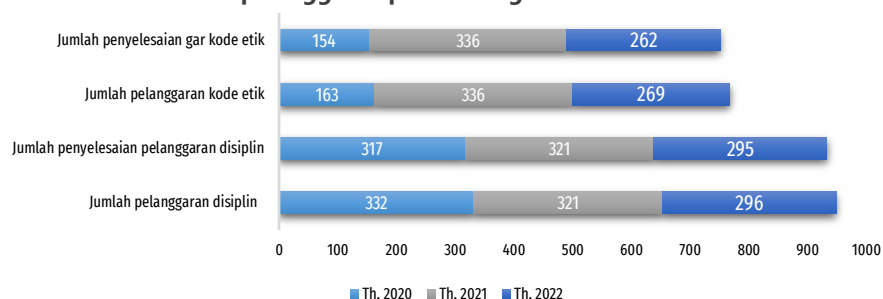
Gambar 52. Dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel pada 14 Polres T.A. 2022.



Dari 14 satuan Polres yang ada, pada **triwulan I** terdapat tiga daerah hukum Polres yang belum ada sama sekali pelanggaran personel, tetapi 11 Polres lainnya ada kinerja penyelesaian pelanggaran personel, seperti yang ditunjukkan oleh Polres Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, sedangkan Polres Mesuji kinerja pada level 1 bersama Polres Pringsewu dan Way Kanan pada level 2. Memasuki **triwulan II** umum Polres berada kinerja level 3, terdapat Polres Lampung Timur pada kinerja level 5 sementara Polres Way Kanan pada level 3. Kinerja pada **triwulan III** Polres Metro mencapai level 5 disusul Polres Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Timur dan Way Kanan pada kinerja level 4, sedangkan enam Polres lainnya berada pada kinerja level 3, disusul yang mengalami penurunan kinerja yaitu Polres tulang Bawang Barat,

Lampung Utara dan Lampung Barat berada di level 2. Memasuki kinerja **triwulan IV** semua Polres berada pada kinerja level 5. Secara umum mengakhiri tahun 2022 kinerja penyelesaian pelanggaran personel memberikan kontribusi positif bagi kesehatan organisasi dalam mendukung pencapaian target kinerja dampak yaitu indeks kamtibmas. terlihat dalam grafik dinamika realisasi kinerja penyelesaian Polda Lampung terus meningkat setiap triwulannya. Adanya kecenderungan meningkat ini diharapkan terus dipertahankan melalui konsolidasi kapasitas dan kapabilitas fungsi propam. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana **eviedence yang diperoleh dari kinerja fungsi Propam selama tiga tahun terakhir** dapat dianalisis dari data jumlah pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel sebagai berikut:

Gambar 53. Perbandingan kuantitas pelanggaran dan penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir.



Perbandingan kuantitas pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri dan penyelesaian selama tiga tahun terakhir, terlihat pada tahun 2022 kuantitas pelanggaran disiplin mengalami tren penurunan sebesar 7,79% dan penurunan penyelesaiannya sebesar 8,10%. Sedangkan untuk kuantitas pelanggaran kode etik Polri juga mengalami tren penurunan yaitu sebesar 19,94% dan tren penurunan penyelesaiannya sebesar 22,02%. Dari data ini menunjukkan bahwa kegiatan penegakan disiplin dan pembinaan etika profesi yang dijalankan oleh fungsi propam berdampak pada kualitas disiplin dan etika profesi yang dijalankan personel Polda Lampung.

Dari tabel tersebut **apabila diklasifikasikan berdasarkan pelanggaran**

satker	tahun 2020				tahun 2021				tahun 2022			
	garpln	sai garpln	gar KEP	sai KEP	garpln	sai garpln	gar KEP	sai KEP	garpln	sai garpln	gar KEP	sai KEP
Polresta Balam	21	20	10	9	23	23	32	32	14	14	15	15
Polres Lamsel	32	32	11	11	28	28	15	15	13	13	8	8
Polres Tigris	15	9	16	15	25	25	11	11	18	18	7	7
Polres Pesawaran	18	18	6	10	6	6	6	6	8	8	6	6
Polres Pringsewu	20	20	3	5	12	12	13	13	9	9	10	10
Polres Lamtang	25	25	13	9	17	17	22	22	14	14	24	24
Polres Metro	8	8	9	10	16	16	15	15	5	5	4	4
Polres Lamtim	40	39	10	10	22	22	26	26	21	21	22	21
Polres Tuba	18	18	8	8	6	6	9	9	20	20	35	35
Polres Mesaji	39	37	16	12	37	37	17	17	16	16	13	13
Polres Tubaba	11	11	6	6	15	15	11	11	18	18	11	11
Polres Lamut	14	14	5	5	25	25	23	23	33	33	18	18
Polres Lambar	15	14	6	7	16	16	17	17	42	42	32	31
Polres WK	12	12	17	14	14	14	29	29	29	29	19	18
Bidpropam	34	31	21	18	49	48	58	58	30	30	37	35
Polda Lampung	332	317	163	154	321	321	336	336	296	295	269	262

Tabel 22. Perbandingan kuantitas pelanggaran personel pada tiga tahun terakhir

disiplin dan Kode Etik Polri lebih dari 20 perkara dalam satu tahun dapat dilihat sebagai berikut; tahun **2020 terdapat 7** kesatuan yang pelanggaran personelnnya diatas 20 perkara, dengan jumlah total perkara pelanggaran personel sebanyak 495 perkara. Tahun **2021 terdapat 9** kesatuan

dengan 657 perkara, kemudian tahun **2022 dengan kesatuan** 565 perkara pelanggaran personel. Dari data ini maka dapat menjadi materi kinerja bagi fungsi propam dalam menentukan prioritas pembinaan disiplin dan pembinaan etika pada tahun berikutnya.

IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum.

Pada indikator kinerja ini penilaiannya didasari pada permasalahan hukum yang berakibat terjadinya gugatan (pra peradilan/perdata/TUN) kepada Polda Lampung dan satuan kerja baik di mapolda maupun Polres, atas kesalahan proses bisnis atau tindakan maladministrasi pada TAB. Adapun komponen-komponen yang dibutuhkan dalam penilaian Persentase penyelesaian masalah hukum adalah rekapitulasi kegiatan pemberian bantuan hukum kepada satker dan personel Polda Lampung yang mendapat gugatan baik praperadilan, perdata maupun gugatan TUN baik dari masyarakat maupun dari gugatan TUN dari personel Polda Lampung. Perhitungan persentase gugatan baik yang dimenangkan Polri maupun yang kalah dibatasi pada hasil putusan pengadilan pada TAB. Selanjutnya dari hasil kinerja ini, Polda Lampung menunjukkan profesionalisme yang didukung dengan kompetensi yang dimiliki personelnnya yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan dalam melaksanakan tupoksi. Berikut ini capaian dari **IKP-12 persentase penyelesaian masalah hukum** sebagai berikut:

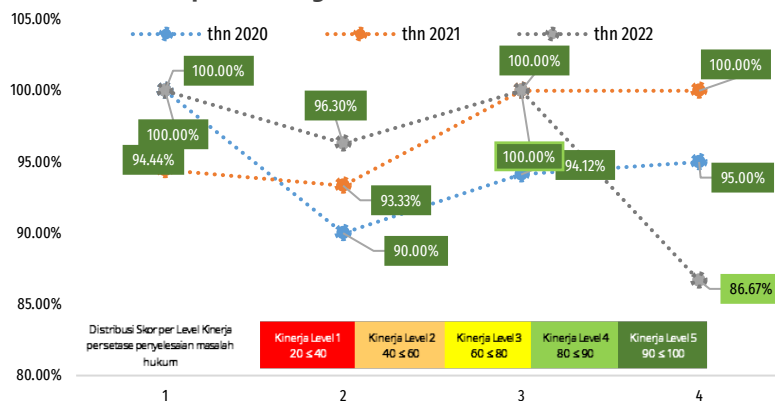
Tabel 23. Analisis dan evaluasi capaian kinerja IKP Persentase penyelesaian masalah hukum.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP ₁₂ Persentase penyelesaian masalah hukum										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
91%	95%	100%	86,67%	91,60%	94,61%	-13,33%	91,80%	94,41%	92%	94,20%

Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja persentase penyelesaian masalah hukum tercapai 94,61%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami penurunan sebesar 13,33%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, maka capaian kinerjanya dibawah 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB tidak berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih perlu melakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tupoksi dalam mendukung kinerja penyelesaian

masalah hukum, terutama dalam hal ini adalah fungsi reskrim yang mempunyai kerawanan terjadinya permasalahan hukum. Secara umum beberapa **hal-hal yang mempengaruhi terhadap kegagalan dalam penyelesaian masalah hukum di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah proses bisnis tidak dijalankan dengan baik, tidak mengikuti perkembangan peraturan yang ada sehingga menjadi celah hukum bagi tersangka ataupun pihak yang berperkara dengan satuan kepolisian mengajukan gugatan peradilan karena proses administrasi yang diselenggarakan kepolisian tidak terdapat kepastian hukum.** Berikut ini gambaran dinamika kinerja penyelesaian pelanggaran personel per-triwulan dalam tiga tahun terakhir berdasarkan skala *likert* 1-5 sebagai berikut.

Gambar 54. Dinamika kinerja persentase penyelesaian pelanggaran personel tiga tahun terakhir.



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan penyelesaian pelanggaran personel setiap triwulan selama tiga tahun terakhir ini, berada pada kinerja level 4-5, yaitu pada rentang kinerja 80–100 pada skala *likert*. Pada tahun 2022 perbandingan kinerja mulai dari triwulan I sampai triwulan III berada pada kinerja level 5, tapi untuk triwulan IV mengalami penurunan berada pada level 4, **hal ini disebabkan karena adanya kekalahan pada proses praperadilan.** Hasil analisis, ternyata terdapat perkara tindak pidana yang sudah lama dan berlarut-larut, yang belum ada kepastian hukum, sehingga membuka peluang bagi masyarakat yang berperkara untuk mengajukan gugatan kepada Polda Lampung dan jajaran. Pada tahun 2022 ini terdapat tiga perkara masing-masing dua perkara tindak pidana pada Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan satu perkara pada Ditreskrim yang mengantung tanpa kepastian hukum terhadap tersangka, sampai akhirnya mengajukan upaya hukum praperadilan. Adapun hasil pendalaman fakta hukum diperadilan penyidik tidak dapat melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk JPU selama lebih dari ketentuan yang diatur dalam peraturan bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung, ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Ham. Selanjutnya untuk mengetahui secara terperinci, sampai sejauh

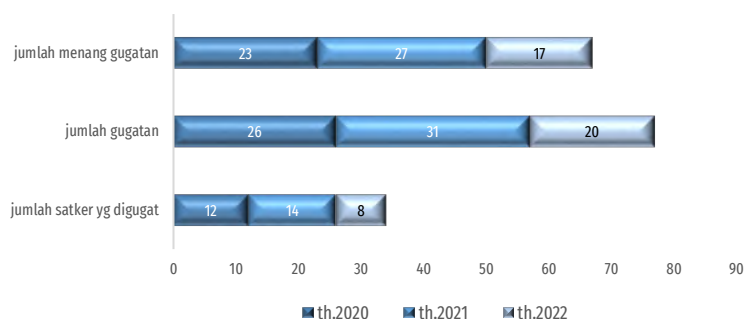
mana kontribusi **tiga komponen penyusun IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum** pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 55. Perkembangan kontribusi 3 komponen kinerja penyelesaian masalah hukum dalam tiga tahun terakhir.



Sepanjang **tahun 2022 terdapat kinerja tiga komponen penyusun penyelesaian masalah hukum dapat dikategorikan memadai sampai dengan istimewa.** Semua komponen kinerja menunjukkan performa yang istimewa. Kinerja memenangkan gugatan praperadilan berada pada kinerja 3-4, hal ini turun dari kinerja tahun sebelumnya. Penyelesaian masalah hukum ini yang fungsi yang dikedepankan adalah fungsi Bidkum selaku kuasa hukum tergugat, tentunya dalam melakukan pembelaan diperlukan adanya kerja sama dan kolaborasi dengan satker tergugat, dalam hal ini adalah penyidik yang menangani perkara yang digugat. Apabila penyidik tidak terbuka dengan kuasa hukum maka akan terjadi pertentangan dalam peradilan yang berujung pada kekalahan. Hasil analisis perkembangan gugatan selama tiga tahun terakhir dipeoleh data sebagai berikut:

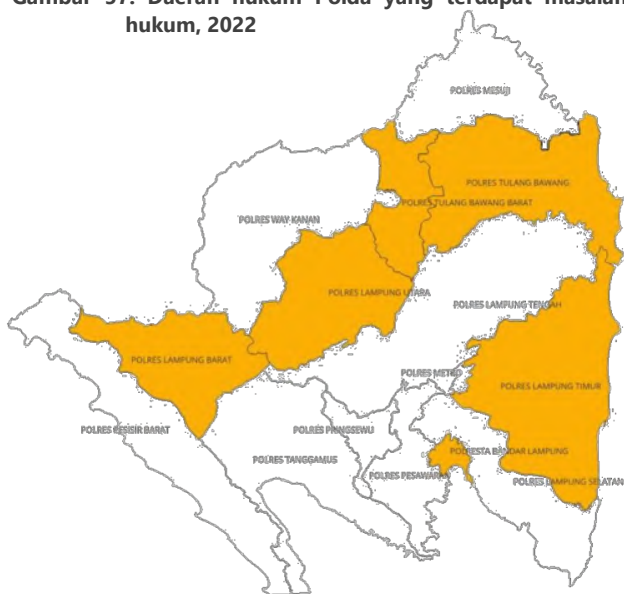
Gambar 56. Perkembangan jumlah gugatan peradilan selama tiga tahun terakhir



Dari data ini kuantitas dari jumlah gugatan tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, sementara itu jumlah gugatan yang dimenangkan selama tiga tahun, hanya tahun 2021 yang turun satu digit. Kemudian jumlah satker yang digugat juga terus mengalami penurunan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor kekalahan adalah terletak pada kelemahan penyidik yang tidak mengikuti perkembangan aturan yang berkembang dalam penegakan hukum. Selanjutnya **upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja**

penyelesaian masalah hukum adalah di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari para penyelidik dan penyidik dalam memahami aturan yang berhubungan teknis penyidikan, disamping

Gambar 57. Daerah hukum Polda yang terdapat masalah hukum, 2022



juga peningkatan kemampuan fungsi hukum. Peningkatan kemampuan tersebut didukung pula dengan optimalisasi dalam pengawasan penyidikan dan sertifikasi terhadap penyidik. Fungsi Bidkum selaku kuasa hukum institusi juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap gugatan peradilan yang kalah, untuk dijadikan atensi bagi penyidik untuk tetap menjaga kualitas profesi yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga apabila dilokalisir, maka permasalahan hukum tahun 2022 berada pada enam Polres yaitu Polresta Bandar Lampung,

Polres Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Polres Lampung Barat. Selanjutnya data permasalahan hukum tahun 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 24. Data jumlah masalah hukum pada satker yang terjadi TAB 2022.

No	Satker	Jumlah gugatan			Jumlah menang gugatan			Jumlah kalah gugatan			Persentase gugatan menang		
		pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN	pra peradilan	Perdata	TUN
1	Ditreskrimum	2	2		1	2		1			50%	100%	
2	Ditpolair	1			1						100%		
3	Polresta Balam	5			3			2			60%		
4	Polres Lamut	2			2						100%		
5	Polres Lambar	1			1						100%		
6	Polres Lamtim	1			1						100%		
7	Polres Tuba	2	1		2	1					100%	100%	
8	Polres Tubaba	1			1						100%		
	jumlah	15	3	0	12	3	0	3	0	0	88,75%	100,00%	0

Dari data tersebut diatas dapat dianalisa, bahwa sepanjang tahun 2022 jumlah gugatan praperadilan yang dimenangkan Polri sebanyak 15 dari total 18 gugatan sehingga realisasi gugatan praperadilan sebesar 88,75%. Sementara gugatan praperadilan yang kalah, terjadi pada perkara tindak pidana yang ditangani Ditreskrimum dan Polresta Bandar Lampung. Data-data di atas menjadi atensi bagi penguatan kapasitas dan kapabilitas pada tahun berikutnya. Terutama sekali bagi penyidik yang menangani kasus yang kalah digugat tersebut dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis penyidikan yang telah dilakukan apabila terdapat kelemahan, maka perlu dilakukan evaluasi sampai pada pemberian sanksi hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku. **Kendala umum** yang terjadi selama ini, fungsi Bidkum dalam memberikan bantuan

hukum bagi Satker yang digugat, menyangkut koordinasi dengan termohon yang kurang terbuka/jujur dengan fungsi Bidkum selaku kuasa hukum sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembelaan. Maka patut diperhatikan dalam upaya mengeliminir gugatan adalah dengan mengedepankan transformasi menuju Polri yang presisi; selalu prediktif dalam menangani perkara, resposibilitas terhadap perkara yang disedang dihadapi dan mengedepankan transparansi yang berkeadilan.

IKP-13 Nilai Kinerja Anggaran

Penilaian indikator kinerja pendukung ini didasari proses untuk menghasilkan suatu capaian kinerja anggaran pada setiap indikato kinerja pendukung, dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai kinerja anggaran ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukan oleh 39 satker Polda Lampung ke dalam aplikasi *SMART* Kemenkeu yang berbasis *website*. Adapun capaian dari indikator kinerja ini sebagai berikut:

Tabel 25. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja IKP Nilai Kinerja Anggaran.

SS ₅ Manajemen pengawasan Kepolisian yang akuntabel										
IKP ₁₃ Nilai Kinerja anggaran (NKA)										
Realisasi			Tahun 2022			Restra Polda Lampung 2020-2024				
tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	realisasi	target	% capaian	% kenaikan 2021-2022	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% capaian terhadap target 2024
70	87,10	85,10	85,32	76	112,26%	0,26%	78	109,38%	80	106,65%

Apabila melihat **realisasi tahun 2022, maka target kinerja Nilai kinerja anggaran tercapai 106,44%, dan apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja TAB-1, maka mengalami keanikan sebesar 0,26%. Selanjutnya dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dan 2024 ,maka capaian kerjanya masih di atas 100%**. Artinya kinerja yang telah dilaksanakan pada TAB berhasil mencapai target, dan tentunya apabila memandang tantangan tugas masa yang akan datang yang penuh dengan dinamika, maka masih tetap perlu dilakukan akselerasi performa kinerja yang diiringi dengan usaha dan kreativitas untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dan kuantitas implementasi kebijakan kepolisian dalam mendukung kinerja sasaran strategis manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel. Secara umum terdapat beberapa **hal-hal yang terus menjadi konsentrasi terhadap keberhasilan dalam nilai kinerja anggaran** di lingkungan Polda Lampung dan jajaran adalah mengakselerasi dan monitoring terhadap kegiatan peningkatan penilaian indikator ini sebagaimana direktif pada

PMK No. 249/PMK/02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dengan mengacu pada:

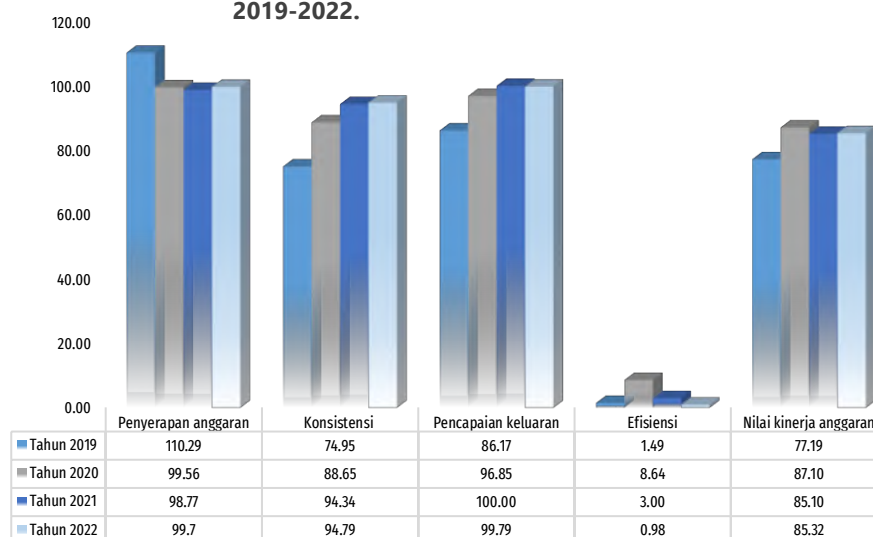
- Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
- Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
- Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Adapun kategori nilai kinerja anggaran sebagai berikut:

- >90% - 100 % : Sangat baik
- > 80 % - 90 % : Baik
- > 60 % - 80 % : Cukup
- > 50 % - 60 % : Kurang
- ≤ 50 % : Sangat kurang

Selanjutnya dari hasil perhitungan aplikasi yang terakhir diakses pada tanggal 30 Januari 2022 **realisasi nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 85,32 termasuk dalam kategori baik**. Berikut ini disajikan gambar perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 58. Perbandingan nilai kinerja anggaran Polda Lampung periode 2019-2022.



Berdasarkan gambar tersebut di atas, **nilai kinerja anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,26%, adapun komponen penyusun nilai kinerja anggaran; penyerapan anggaran meningkat dari 98,77 poin menjadi 99,7 atau 0,95%; dan nilai konsistensi mengalami tren kenaikan dari 94,34 menjadi 94,79 atau dengan besaran kenaikan 0,48%; demikian juga dengan komponen pencapaian keluaran turun dari 100 menjadi 99,79 atau turun sebesar 0,21%.** Selanjutnya perbandingan nilai kinerja anggaran satker pada empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Perbandingan nilai kinerja anggaran empat tahun terakhir.

NO.	SATKER	NILAI KINERJA ANGGARAN			
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2022	TAHUN 2022
1	Spripim	81,28	84,35	57,81	84,92
2	Itwasda	81,69	99,81	60,79	85,36
3	Roops	85,83	73,08	73,61	86,50
4	Bidkum	64,55	88,8	65,74	85,12
5	Bidhumas	67,54	92,01	41,29	84,94
6	Rorena	85,44	87,43	64,86	87,81
7	Ro SDM	89,21	95,77	78,98	85,59
8	Rolog	67,82	69,22	50,72	83,93
9	Bidpropam	51,20	91,88	65,00	88,19
10	Bidtik	75,36	83,95	59,05	84,31
11	Bidokkes	78,89	70,47	59,05	86,72
12	Bidkeu	76,68	86,5	95,02	96,00
13	Yanma	83,92	93,11	70,70	85,53
14	SPN	76,79	85,3	74,67	85,71
15	Ditintelkam	98,00	99,99	47,38	85,96
16	Ditreksrimum	59,86	92,78	73,31	83,42
17	Ditreksrimus	73,52	89,52	50,47	84,49
18	Diresnarkoba	74,33	93,77	66,02	84,68
19	Ditsamapta	80,94	83,12	49,64	85,88
20	Ditlantas	87,58	95,84	53,16	85,70
21	Ditbinmas	92,84	87,72	82,13	85,70
22	Ditpolairud	69,48	88,91	59,78	86,17
23	Ditpamobvit	94,70	97,68	68,06	84,02
24	Satbrimob	94,14	87,30	65,51	84,23
25	Rumkit Bhayangkara	40,08	93,05	85,57	84,14
26	Polresta Balam	47,94	85,03	85,39	86,87
27	Polres Lamsel	82,23	87,66	85,79	85,61
28	Polres Metro	80,99	85,77	86,14	86,58
29	Polres Lamut	74,70	86,23	85,61	82,30
30	Polres Lambar	73,64	86,11	85,36	84,91
31	Polres Tuba	84,02	90,92	84,30	84,22
32	Polres Tanggamus	85,54	84,78	89,49	88,05
33	Polres Lamtim	85,51	87,11	85,35	85,69
34	Polres Way Kanan	78,08	82,41	84,43	82,39
35	Polres Lamteng	72,40	91,29	85,03	87,77
36	Polres Mesuji	47,08	83,79	86,00	85,73
37	Polres Pesawaran	33,43	93,44	86,35	85,25
38	Polres Tubaba	0	67,90	81,37	83,38
39	Polres Pringsewu	0	73,08	50,33	84,58
40	Polres Pesbar	0	0	0	0
	Polda Lampung	75,06	87,10	85,10	85,32

Terlihat bahwa tahun 2022 nilai kinerja anggaran satker telah dipenuhi oleh 39 satker yang ada di Polda Lampung yakni lebih dari target NKA 76 poin. Selanjutnya apabila nilai kinerja anggaran tahun 2022 dibandingkan dengan target nasional 95, maka capaian nilai kinerja anggaran Polda Lampung sebesar 88,88%.

Fakta keberhasilan pencapaian target nilai kinerja anggaran ini menunjukkan bahwa sepanjang TAB 2022, pengelolaan anggaran sudah

menjadi perhatian penuh semua satuan kerja, karena dengan hasil nilai kinerja anggaran 85,32% termasuk pada kategori baik secara umum, karena apabila tidak mengikuti kaidah dalam pengelolaan anggaran maka akan terdapat; proses penarikan anggaran yang tidak sesuai waktu, sehingga berpengaruh terhadap nilai kinerja; terdapat adanya salah satu *output* anggaran yang tidak diserap, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja anggaran. Untuk tahun yang akan datang, Polda Lampung berusaha untuk memperbaiki pengelolaan program anggaran dengan memberi *stressing* pada program prioritas nasional, dengan melakukan *monev* secara holistik, guna mendukung operasional kepolisian di lapangan.

Adapun kendala dan hambatan dalam pengelolaan anggaran, umumnya menyangkut pengetahuan pengelolaan anggaran yang berbasis TIK (teknologi, informasi dan komunikasi), terus dilakukan peningkatan kapabilitas dan kapasitas dalam manajemen pengetahuan oleh pembina fungsi Rorena Polda Lampung. Kegiatan peningkatan tersebut mulai dari sosialisasi, asistensi, supervisi, bimbingan teknis, tutorial, di samping intensif menjalin sinergi antar pengemban fungsi perencanaan satker.

C. Realisasi Anggaran

Perbandingan DIPA Polda Lampung selama tiga tahun terakhir 2019-2022, dalam perkembangan pagu dan realisasi Polda Lampung sebagai berikut:

Tabel 27. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Polda Lampung 2019-2022.

DIPA POLDA LAMPUNG	TAHUN			
	2019	2020	2021	2022
Pagu awal (Rp.)	1.165.371.110.000,-	1.166.502.186.000,-	1.271.995.008.000,-	1.276.370.236.000,-
Pagu akhir (Rp.)	1.235.379.331.000,-	1.277.172.925.000,-	1.310.263.308.000,-	1.377.147.790.000,-
Realisasi (Rp.)	1.331.208.573.710,-	1.273.342.063.000,-	1.308.313.262.802,-	1.374.566.857.580,-
% realisasi	107,8 %	99,70%	99,85%	99,81%

Selanjutnya dari lima program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung, maka dibawah ini adalah rincian pelaksanaan realisasi anggaran T.A. 2022 sebagai berikut:

Tabel 28. Program Anggaran Polda Lampung T.A. 2022

NO	NAMA PROGRAM	PAGU AKHIR	REALISASI	% REALISASI	SISA	% SISA
1.	Profesionalisme SDM	38.286.503.000	38.013.084.371	99,29	273.418.629	0,71
2.	Lidik sidik	108.926.939.000	108.353.757.110	99,47	573.181.890	0,53
3.	Modernisasi almatsus	188.714.194.000	188.183.446.952	99,72	530.747.048	0,28
4.	Harkamtibmas	338.253.975.000	337.548.294.554	99,79	705.680.446	0,21
5.	Dukungan manajemen	702.966.179.000	702.468.274.593	99,93	497.904.407	0,07
JUMLAH		1.377.147.790.000	1.374.566.857.580	99,81	2.580.932.420	0,19

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN Kemenkeu R.I. Per 31 Desember 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Polda Lampung berusaha mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan melakukan efisiensi anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. mulai dari total pagu awal Polda Lampung T.A. 2022 sebesar Rp. 1.276.370.236.000,-. berdasarkan Surat Kapolri nomor: B/8644/XII/REN.2.3./2021/Srena, tanggal 09 Desember 2021 tentang *Automatic Adjustment* belanja T.A. 2022 sumber Rupiah Murni, Polda Lampung mengalami pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Belanja Modal sebesar Rp.833.925.000,-.
- b. Selanjutnya terdapat penambahan anggaran dari Sumber Hibah sebesar Rp. 44,677,924,000,- yang terdiri atas:
 - 1) Bidkeu Polda Lampung sebesar Rp.6.500.000.000,- (BKO penebalan pam arus balik mudik, tambah kapasitas bandwidth Command Center, pembinaan Babinkamtibmas, bintek katpuan Aplikasi Sakti dan E-Katalog, lidik sidik narkoba, sertifikasi gadik, penmas, latihan kualifikasi Kapolri Cup, peralatan multimedia, tambah gar belanja barang Ditbinmas T.A. 2022, pengadaan 3 randis opsnal, interior ruang Polda, ruang podcast Polda, alsintor SPKT & ruang foto SIM, lanjutan bangun gedung Rumkit + meubelair, pengadaan alat dan mesin kantor Polda);
 - 2) Rolog Polda Lampung sebesar Rp.11.250.000.000,- (interior ruang kerja, sound system & ac GSG, alat material Polda, siger lounge,interior GSG, pagar depan Polda, interior gedung A, interior ruang Karo, videotron Polda Lampung);
 - 3) Satbrimobda Lampung sebesar Rp.150.000.000,- (giat patroli dalam rangka harkamtibmas);
 - 4) Bid TIK Polda Lampung sebesar Rp.750.000.000,- (Pemindahan Comman Center Polda);
 - 5) SPN Polda Lampung sebesar Rp.1.000.000.000,- (Rehab gedung Aula Subarkah);
 - 6) Yanma Polda Lampung sebesar Rp.500.000.000,- (Renovasi rumah dinas Karo Ops);
 - 7) Polres Lampung Selatan sebesar Rp.900.000.000,- (giat Ops Lilin, Ketupat, Ops Sikat, Ops Antik dan giat Harkamtibmas);
 - 8) Polres Lampung Barat sebesar Rp.700.000.000,- (giat Ops Lilin, Ketupat, Pam pemilihan Peratin dan Pam wilayah);
 - 9) Polres Metro sebesar Rp.500.000.000,- (giat Harkamtibmas,

Pengadaan Taman Polres dan Alat Pengawasan Mako);

- 10) Polres Pesawaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (giat Harkamtibmas, giat Ops mandiri kewilayahan, giat lidik sidik, pembangunan garasi Mako Polres);
 - 11) Polres Tanggamus sebesar Rp.4.699.924.000,- (giat Ops Ketupat, KRYD, Pilkakon 2022, giat dukopsnal Polres, bangun Mapolsek Limau tipe 190, rumdin Kasat, taman lalu lintas, fasum Satpas & Asrama Perwira serta ruang Sikum Polres Tanggamus);
 - 12) Polres Tulang Bawang sebesar Rp.4.250.000.000,- (giat Ops Ketupat, giat harkamtibmas & pembuatan taman Polres);
 - 13) Polres Way Kanan sebesar Rp.200.000.000,- (giat Ops Ketupat & Lilin);
 - 14) Polres Lampung Utara sebesar Rp.3.050.000.000,- (giat Harkamtibmas Polres);
 - 15) Polres Mesuji sebesar Rp.1.000.000.000,- (harwat Poliklinik, renovasi fasilitas Polres, Ops Ketupat, Ops Lilin, pelatihan Pocil, pengadaan jaringan cctv, drone humas, pengadaan kursi staf);
 - 16) Polres Lampung Tengah sebesar Rp.2.400.000.000,- (giat Pilkakam Serentak 2022, giat Ops Ketupat & giat Harkamtibmas);
 - 17) Polres Tuba Barat sebesar Rp.500.000.000,- (giat Ops Ketupat, Ops Zebra, giat Polisi Cilik dan giat Patroli Samapta);
 - 18) Polresta Bandar Lampung sebesar Rp.2.778.000.000,- (perawatan operasional cctv, giat Ops Lilin);
 - 19) Polres Lampung Timur sebesar Rp.2.000.000.000,- (giat Harkamtibmas, giat Operasi, har gedung Polsek);
 - 20) Polres Pringsewu sebesar Rp.550.000.000,- (giat Pilkakon Serentak tahun 2022 Kab. Pringsewu, duk giat Polisi Cilik, pengadaan PC komputer dan printer);
- c. Kemudian pada TAB 2022 ini terjadi lagi revisi anggaran sebagai berikut:
- 1) Revisi Saldo awal BLU pada Satker Rumkit Bhayangkara Polda Lampung sebesar Rp.9.784.628.000,-
 - 2) Revisi Optimalisasi anggaran Giat Diktukba Polri T.A. 2022 pada satker SPN Polda Lampung Rp.259.403.000,- sumber RM.

- 3) Penambahan gar jasa Pamobvit untuk satker Ditpamobvit dan Polres jajaran (14 Polres) dari PNBP sebesar Rp.2.385.888.000,-
- 4) Revisi Pagu Minus menyebabkan penambahan gar Belanja Pegawai sebesar Rp.50.070.008.000,- yang terdiri dari pengurangan Belanja Pegawai satker yang mengalami surplus sebesar Rp.4.884.591.000,- dan ditambah anggaran dari Mabes Polri sebesar Rp. 45.185.417.000,-

Untuk rincian realisasi penyerapan anggaran pagu akhir pada masing-masing satker di lingkungan Polda Lampung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi anggaran persatker Polda Lampung T.A. 2022.

	SATKER	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	Sripim	7.885.568.000	7.768.362.000	7.768.356.483	100,00	5.517
2	Ditintelkam	26.035.546.000	26.632.491.000	26.632.104.935	100,00	386.065
3	Satbrimob	69.795.567.000	76.051.137.000	76.046.100.075	99,99	5.036.925
4	Bidkeu	2.270.465.000	8.917.335.000	8.915.942.696	99,98	1.392.304
5	Ditresnarkoba	13.265.217.000	13.003.531.000	12.996.072.534	99,94	7.458.466
6	Ditreskrim	13.687.161.000	14.876.033.000	14.865.440.694	99,93	10.592.306
7	Rumkit	28.780.016.000	39.512.351.000	39.482.609.230	99,92	29.741.770
8	Ditlantas	23.135.344.000	24.816.606.000	24.789.761.998	99,89	26.844.002
9	Bidkum	3.414.381.000	3.546.965.000	3.543.045.033	99,89	3.919.967
10	Rolog	48.999.359.000	60.679.628.000	60.610.861.690	99,89	68.766.310
11	SPN	29.347.969.000	29.391.533.000	29.351.514.275	99,86	40.018.725
12	Bid TIK	4.662.854.000	6.196.461.000	6.187.776.925	99,86	8.684.075
13	Yanma	9.108.656.000	9.977.119.000	9.960.769.756	99,84	16.349.244
14	Ditreskrimum	20.450.523.000	20.612.352.000	20.578.460.482	99,84	33.891.518
15	Bidpropam	10.829.547.000	9.499.152.000	9.480.740.351	99,81	18.411.649
16	Itwasda	4.200.056.000	4.583.146.000	4.574.207.642	99,80	8.938.358
17	Roops	17.209.485.000	17.096.824.000	17.055.904.088	99,76	40.919.912
18	Ditsamapta	20.805.053.000	24.322.294.000	24.261.538.635	99,75	60.755.365
19	Ditbinmas	5.120.459.000	5.746.374.000	5.723.929.119	99,61	22.444.881
20	Ditpamobvit	11.580.258.000	12.668.763.000	12.616.790.984	99,59	51.972.016
21	Ditpolairud	20.467.847.000	22.381.649.000	22.206.216.510	99,22	175.432.490
22	Rorena	5.114.994.000	5.011.188.000	4.969.966.157	99,18	41.221.843
23	Biddokkes	15.706.941.000	16.998.614.000	16.850.689.427	99,13	147.924.573
24	Bidhumas	4.569.002.000	5.404.290.000	5.350.608.445	99,01	53.681.555
25	Ro SDM	9.468.577.000	10.562.511.000	10.295.806.880	97,47	266.704.120
26	Polres Metro	54.815.162.000	56.860.409.000	56.860.381.794	100,00	27.206
27	Polres Lamsel	71.085.282.000	72.355.310.000	72.355.207.068	100,00	102.932
28	Polres Lamtim	86.924.053.000	94.195.839.000	94.190.196.082	99,99	5.642.918
29	Polres Lamteng	83.816.441.000	83.647.854.000	83.619.294.668	99,97	28.559.332
30	Polres Lamut	67.234.058.000	73.734.002.000	73.696.173.061	99,95	37.828.939
31	Polres Lambar	52.032.752.000	57.804.507.000	57.772.859.109	99,95	31.647.891
32	Polres Pringsewu	54.480.486.000	56.346.775.000	56.279.581.851	99,88	67.193.149
33	Polres Tuba	48.015.780.000	55.124.543.000	55.057.154.905	99,88	67.388.095
34	Polres Tuba Barat	27.953.671.000	34.590.367.000	34.545.326.292	99,87	45.040.708
35	Polres Waykanan	51.599.691.000	57.679.349.000	57.577.474.231	99,82	101.874.769
36	Polres Mesuji	37.064.388.000	39.759.900.000	39.663.449.556	99,76	96.450.444
37	Polresta Balam	119.599.846.000	117.851.541.000	117.470.453.171	99,68	381.087.829
38	Polres Tanggamus	53.176.004.000	56.795.957.000	56.508.938.172	99,49	287.018.828
39	Polres Pesawaran	42.661.777.000	44.144.728.000	43.855.152.576	99,34	289.575.424
	Jumlah Total	1.276.370.236.000	1.377.147.790.000	1.374.566.857.580	99,81	2.580.932.420

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa selama TAB, total realisasi anggaran Satker jajaran Polda Lampung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 mencapai 99,81%. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.580.932.420,- atau 0,19%, merupakan sisa dari revisi pagu minus belanja pegawai dan sisa belanja barang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pengelolaan anggaran di lingkungan Polda Lampung pada tahun anggaran berikutnya, selain melakukan penguatan kapabilitas melalui petunjuk dan arahan, juga melakukan penguatan kapasitas dengan melakukan sosialisasi, asistensi supervisi, hal ini secara berkala dalam rangka percepatan realisasi anggaran, dengan penekanan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pejabat perbendaharaan (PPK, PPSPM dan Bendahara) dan pejabat pengadaan barang dan jasa, serta menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- b. Menyusun *disbursement plan* (rencana penyerapan) dari awal tahun anggaran secara sistematis berdasarkan *procurement plan* (rencana pengadaan barang dan jasa) dan kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penumpukan;
- c. Memonitor kegiatan dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan



Gambar 59. Rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Polri Polda Lampung 2022.

- d. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian antara kegiatan, KRO, RO, Komponen, Subkomponen dan detail kegiatan guna menghindari kekeliruan dalam pelaksanaannya, apabila terdapat ketidaksesuaian segera melakukan revisi RKA dan DIPA Satker T.A.2023;
- e. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukkan langsung atau swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa mendasari pada alokasi anggaran sesuai dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan T.A.2023 masing – masing satker;
- g. Khusus anggaran sumber RM agar menyelesaikan proses lelang dan penandatanganan pengadaan barang/jasa paling lambat bulan february 2023;
- h. Mengefektifkan peran pembina teknis pembangunan gedung negara dari Dinas PU dalam pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung negara serta melibatkan pembina fungsi logistik dalam

- pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. Segera menyelesaikan tagihan dengan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tagihan
 - j. Segera menyelesaikan tagihan sesuai dengan progres pekerjaan (sesuai termin) dan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan serta mengingatkan kepada pihak ke-2 yang terlambat mengajukan tagihan pembayaran sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak;
 - k. Memberikan teguran kepada pihak kedua yang terlambat mengajukan tagihan pembayaran sesuai jadwal yang tertuang dalam kontrak;
 - l. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka pelaksanaan anggaran sesuai RKA dan DIPA satker T.A.2023;
 - m. Berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengatasi permasalahan pengadaan barang/jasa serta optimalisasi penggunaan e-procurement untuk pengadaan barang/jasa;
 - n. Satker yang alokasi anggarannya pada T.A.2023 terdapat *output* cadangan atau diberi tanda bintang (diblokir), agar segera mengajukan revisi dengan melengkapi dokumen pendukung serta berkoordinasi dengan fungsi terkait;
 - o. Memedomani Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun dan mengajukan SPM ke KPPN;
 - p. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - q. Pengelolaan anggaran wajib memedomani prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - r. Meningkatkan ketertiban penyampaian data *supplier* dan data kontrak termasuk *adendum* kontrak kepada KPPN;
 - s. Memedomani sasaran prioritas dalam Renstra, Renja serta target *output* dan *outcome* kinerja satker T.A.2023 yang telah ditetapkan dalam RKA dan DIPA satker termasuk kegiatan prioritas Polri;
 - t. Menerapkan instrumen pencegahan penyimpangan (*probity audit*)

untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pendistribusian;

- u. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, Kasatker selaku KPA wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%, dengan melampirkan surat pernyataan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- v. Satuan harga yang digunakan dalam RKA dan DIPA Satker T.A.2023 merupakan alokasi anggaran sesuai dalam perencanaan, dan dalam pelaksanaannya tidak melampaui alokasi anggaran dalam RKA dan DIPA satker serta sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kasatker/KPA;
- w. Lebih bijaksana dalam mengelola anggaran khusus berdasarkan direktif Kapolri/Kapolda melalui mekanisme hierarki anggaran dengan mengoptimalkan anggaran kegiatan rutin kepolisian atau Kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), Dukops Polda/Satker serta anggaran operasi kewilayahan T.A.2023;
- x. Penanggungjawab Program agar melaksanakan *monitoring*, evaluasi, asistensi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana target kinerja secara berkala, sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan RPD;
- y. Pembina Fungsi Teknis agar melaksanakan *monitoring*, asistensi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan bidang masing – masing, guna menghasilkan output yang tepat, cepat dan berhasil guna;
- z. Kasatker selaku KPA agar mensosialisasikan direktif Kapolri kepada jajarannya, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya serta bertanggungjawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

D. Regulasi dan Kelembagaan

- a. Bahwa dalam implementasi penguatan kelembagaan pada TAB telah berhasil mendapatkan persetujuan dari Kapolri melalui Kep Kapolri Nomor: Kep/1138/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang pembentukan Polres Pesisir Barat, yang selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2023 diresmikan oleh Kapolda Lampung;

Tabel 30. Hasil penguatan kelembagaan 2022

NO	POLRES	POLSEK							POLSUB SEKTOR	SATPOL AIRUD	SATPAM OBVIT	USUL TUK POLSUB SEKTOR	USUL TUK POLSEK (D) THP 1	USUL TUK POLSEK (D) THP 2	USUL KAT POLSEK (D)→(C)	KET
		METRO (A)	URBAN (B)	RURAL (C)	PRA RURAL (D)	JML POLSEK	JML KEC.	% PEMENUHAN								
1	POLRESTA BALAM (C)	-	8	1	2	11	20	50%	2	√	proses			1		Dim proses kajian lemtala
2	POLRES LAMSEL (D)	-	2	7	3	12	17	70%	1	√		1		3		Dim proses di Kemenpan
3	POLRES LAMUT (D)	-	2	8	5	15	23	65%	7				2			Dim proses di Kemenpan
4	POLRES METRO (D)	-	-	5	-	5	5	100%	-							Bim memenuhi kriteria MP
5	POLRES LAMBAR (D)	-	2	1	1	4	15	27%	1	√		1				
6	POLRES TUBA (D)	-	1	4	2	7	15	47%	2	√				2		
7	POLRES TANGGAMUS (D)	-	-	7	3	10	20	50%	3	√		2	3	3		
8	POLRES LAMTIM (D)	-	2	20	2	24	24	100%						2		
9	POLRES WAY KANAN (D)	-	2	8	2	12	15	80%			Series "thn 2020" Legend Entry			1		
10	POLRES LAMTENG (D)	-	2	13	2	17	28	60%	1			3				
11	POLRES MESUJI (D)	-	1	2	1	4	7	57%	2	tunda		1	1			
12	POLRES PESAWARAN (D)	-	1	3	-	4	11	36%	2	√		1				
13	POLRES TUBABA (D)	-	1	3	-	4	9	44%	2					1		
14	POLRES PRINGSEWU (D)	-	1	4	-	5	9	55%	4			1	1			
15	POLRES PESBAR (D)	-	1	3	-	4	11	36%	1							
	JUMLAH	0	26	89	23	138	229	60%	31	7		7	3	11		

- b. Untuk penguatan kelembagaan melalui pembentukan Satpolairud pada Polres Tanggamus, telah mendapat persetujuan dari Kapolri sebagaimana Kep Kapolri Nomor: Kep/1052/VIII/ 2022 tanggal 8 Agustus 2022. Dan untuk Polres Pesawaran melalui persetujuan Kapolri sebagaimana Kep Kapolri Nomor: Kep/1053/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022, tetapi untuk usulan pembentukan Satpolairud Polres Mesuji ditunda oleh Mabes Polri, mengingat tempat yang ajukan untuk kantor Satpolairud dan dermaganya hasil verifikasi dan evaluasi perlu dilakukan peninjauan kembali melalui usulan berikutnya;
- c. Pada TAB 2022 ini juga telah diresmikan terbentuknya batalyon C Satbrimob di Kabupaten Lampung Utara sebagaimana persetujuan Kapolri yang tertuang dalam Kep Kapolri Nomor: Kep/1887/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, pada tanggal 14 Nopember 2022.
- d. Untuk penguatan kelembagaan berikutnya adalah pembentukan Polsubsektor pada TAB 2022 terdapat tujuh usulan yang masih dalam proses kajian dari Mabes Polri, masing-masing satu usulan dari Polres Lampung Selatan dan Tanggamus, dua usulan dari Polres Mesuji dan tiga usulan dari Polres Lampung Tengah, sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/309/II/OTL.1.1.1./2022 tanggal 09 Februari 2022;
- e. Untuk pembentukan Polsek TAB 2022 dalam perkembangannya terdapat dua tahap usulan yang diusulkan Polda Lampung yang masih dalam proses kajian dari Mabes Polri, **pertama** terdapat tujuh usulan pembentukan Polsek yang berasal dari lima Polres yakni satu usulan masing-masing dari Polres Lampung Barat, Mesuji, Pesawaran dan Pringsewu, ditambah tiga usulan dari Polres Tanggamus. Sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/3071/XII/OTL.1.1.1./2021 tanggal 31 Desember 2021. Kemudian

usulan **kedua** sebanyak lima usulan masing-masing satu usulan dari Polresta Bandar Lampung, Polres tulang Bawang Barat dan Pringsewu. Selanjutnya dua usulan dari Polres Lampung Utara. Sebagai mana surat Kapolda Lampung Nomor: B/3015/XII/OTL.1.1.1./2022 tanggal 13 Desember 2022;

- f. Untuk usulan peningkatan tipologi dari Polsek (D) menjadi Polsek (C) terdapat sebelas usulan, masing-masing satu usulan dari Polres Way Kanan, dua usulan dari Polres Lampung Timur dan Tulang Bawang, sedangkan yang tiga usulan dari Polres Lampung Selatan dan Tanggamus. Sebagai mana Surat Kapolda Lampung Nomor: B/3022/XII/OTL.1.1.1./2021 tanggal 24 Desember 2021, masih dalam kajian mabes Polri;
- g. Selama TAB dalam rangka mengimplementasikan transformasi organisasi melalui pembinaan Polsek harkamtibmas, maka pada TAB 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tuis Polsek pada 16 Polsek harkamtibmas dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Polsek Harkamtibmas yang efektif (peringkat komposit 4 (P-4) dengan skor 61-80, sebanyak empat Polsek yaitu Polsek Sumberejo; Rebang Tangkas; Metro Kibang; dan Polsek Braja Selehah.
 - 2) Polsek Harkamtibmas yang cukup efektif (peringkat komposit 3 (P-3) dengan skor 41-60, sebanyak delapan Polsek yaitu; Polsek Tumijajar; Tulang Bawang Tengah; Sragi; Semaka; Selagai Lingga, Rawa Pitu; Pematang Sawa; dan Polsek Cukuh Balak.
 - 3) Polsek Harkamtibmas yang kurang efektif (peringkat komposit 2 (P-2) dengan skor 21-40, sebanyak empat Polsek yaitu; Polsek Sukadana; Pesisir Selatan; Polsek Kawasan Pelabuhan Panjang; dan Polsek Bumi Agung.
- h. Terbit 1.212 Keputusan Kapolda Lampung terkait penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi Polda Lampung.
- i. Berlaku 145 Mou antara Polda Lampung dengan *stakeholder* dalam penguatan dinamika operasional tupoksi.

E. Penghargaan dan apresiasi.

- a. Penghargaan dan apresiasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP₂MI) atas pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah hukum Polda Lampung.
- b. Penghargaan dan apresiasi dari Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto

atas penyelesaian Target Operasi Kejahatan Pertanahan selama 2022 di Wilayah Provinsi Lampung.

- c. Penghargaan dan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Lampung berupa anugerah keterbukaan informasi badan publik Tahun 2022.
- d. Penghargaan dari Gubernur Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/VI.08/HK/2022 tentang pemberian penghargaan Kepada Personil Kepolisian Daerah Lampung, Direktorat Jenderal Beacukai Sumatera Bagian Barat, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, atas kerjasama dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Lampung.
- e. Penghargaan dari Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI) Lampung atas keberhasilan dan peran aktif dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung.
- f. Penghargaan/apresiasi dari ASDP Indonesia Ferry, atas keberhasilan Polda Lampung pada pelaksanaan pengamanan angkutan Lebaran Tahun 2022.
- g. Penghargaan dan apresiasi terhadap komitmen dan dedikasi dalam menyukseskan pengamanan mudik hari raya 1442 H dari Kemenpan RB.

IV. Penutup

Laporan Kinerja Polda Lampung tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis, sebagai tahun ke-tiga Renstra 2020-2024 dan perkembangan perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan hasil yang signifikan, meskipun masih ada agregat komponen penyusun indikator kinerja yang belum menunjukkan level kinerja yang memadai, tetapi masih dapat dilapisi dengan agregat komponen penyusun indikator kinerja yang level kinerja di atas memadai, sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2022, terdapat indikator kinerja pendukung yang tidak mencapai target, tetapi secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap nilai pencapaian sasaran strategis, yang dicapai 113,53%. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Polda Lampung T.A. 2022, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a. Secara umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Polda Lampung T.A. 2022 sebesar 113,53%. Semua Sasaran Strategis, capaiannya antara 107%-120% dari keseluruhan jumlah Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 31. Sasaran Strategis Polda Lampung.

Kode SS	Nama SS	NSS
<i>SSimpack</i>	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	120,00%
SS1	Harkamtibmas yang partisipatif	107,26%
SS2	Penegakan hukum yang berkeadilan.	120,00%
SS3	Sumber daya manusia yang profesional	98,14%
SS4	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	113,91%
SS5	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel	108,94%

- b. Dari 14 (empat belas indikator kinerja baik Indikator *Impack*, indikator kinerja Utama maupun indikator kinerja pendukung, capaian antara 94%-120%, dengan perincian masing-masing realisasi, target dan capaian sebagai berikut:

Tabel 29. IKU dan IKP Polda Lampung 2022.

NO	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	Realisasi	Capaian
1.	IKU-0 Indeks keamanan dan ketertiban	3,3	4,21	120%
2.	IKU-1 Indeks pemeliharaan kamtibmas.	73	78,30	107,26%
3.	IKU-2 Indeks penegakan hukum.	68	91,83	120,00%
4.	IKP-3 Indeks profesionalitas personel.	75	73,60	98,14%
5.	IKP-4 Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70,5	85,81	120,00%
6.	IKP-5 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.		2,34	101,74%
7.	IKP-6 Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	52	71,20	120,00%
8.	IKP-7 Indeks penguatan implementasi kebijakan.	73	77,70%	106,44%
9.	IKP-8 Indeks Tatakelola Kepolisian.	5,3	5,44	102,63%
10.	IKP-9 Indeks kepuasan pelayanan kepolisian.	81	87,40	107,90%
11.	IKP-10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	67	99,08%	120,00%
12.	IKP-11 Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	83	98,54%	118,71%
13.	IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,6	86,67%	94,61%
14.	IKP-13 Nilai kinerja anggaran.	76	85,32	112,26%

Bahwa ke-14 (empat belas) indikator kinerja Polda Lampung tersebut, target yang dapat dicapai sebanyak 12 indikator kinerja dan dua indikator tidak tercapai, yakni indeks profesionalitas personel terdapai 98,14% dan persentase penyelesaian masalah hukum tercapai 96,61%.

- c. Faktor yang menyebabkan kegagalan capaian kinerja dari Indeks profesionalitas personel pada tahun 2022, yang tersusun atas lima komponen pendukungnya, salah satunya yang penyelenggaraan latihan dan pendidikan pengembangan

	TH. 2020	TH. 2021	TH. 2022
ALOKASI ANGGARAN	GIAT 3100 PENYELENGARAAN DIKLAT POLRI Rp. 1.608.750.000,-	GIAT 3100 PENYELENGARAAN DIKLAT POLRI Rp. 650.900.000,-	GIAT 3100 PENYELENGARAAN DIKLAT POLRI Rp. 650.900.000,-
ALOKASI PESERTA DIKLAT	Dikbangspes 330 serdik Pelatihan 1.375 serlat	Dikbangspes 300 serdik Pelatihan 500 serlat	Dikbangspes 150 serdik Pelatihan 500 serlat

spesialis di SPN Polda Lampung alokasinya mengalami penurunan, karena diturunkan oleh Lemdiklat Polri. Kondisi ini dapat ditinjau dari tiga tahun terakhir yang terus mengalami pengurangan, sementara itu SPN belum merekonstruksi kebutuhan pelatihan dan dikbangspes, mengingat alokasi anggaran penyelenggaraan diklat Polri terus

menurun. Selanjutnya **upaya untuk meningkatkan kinerja indeks profesionalitas personel**, di samping nilai kinerja ini diperoleh secara komposit bersama komponen kinerja profesionalitas personel lainnya, **maka untuk komponen penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya SPN harus melakukan pemetaan kebutuhan dan mengusulkan**

penambahan alokasi peserta pelatihan dan dikbangspes ke Mabes Polri dan Rorena mengusulkan penambahan anggaran, ataupun SPN bersama dengan Rorena berinisiatif mengusulkan tambahan anggaran pelatihan melalui sumber pembiayaan lainnya, yang sebelumnya menyusun analisa kebutuhan pelatihan fungsi kepolisian berdasarkan masukan dari satker dan Polres jajaran.

- d. Upaya lainnya dengan memberikan **atensi terhadap menurunnya pemberian penghargaan bagi personel yang berprestasi, melalui upaya para kasatker secara konsisten dan berkesinambungan selalu memberikan dorongan kepada personel melalui membangun kerja sama dan menjalin hubungan yang harmonis dalam rangka merangsang personel untuk berprestasi.** Konsep pemberian penghargaan adalah merupakan bentuk stimulan pemimpin kepada personel, agar bekerja dengan baik, bersemangat, berdedikasi dan terpeliharanya loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan yang digeluti.
- e. Selanjutnya hal yang menyebabkan kegagalan dari capaian kinerja dari **IKP-12 Persentase penyelesaian masalah hukum** adalah menyangkut salah satu komponen dari tiga komponen pendukung kinerjanya mengalami penurunan kinerja yakni adanya kekalahan pada proses praperadilan, dimana dari 15 perkara praperadilan, terdapat tiga perkara praperadilan yang kalah, yakni satu perkara praperadilan di Polresta Bandar Lampung dan dua perkara praperadilan Ditreskrimum. Adapun pokok perkara kekalahan dari praperadilan tersebut adalah adanya perkara tindak pidana yang sudah lama dan berlarut-larut sudah ditetapkan tersangka tetapi belum ada kepastian hukum, tetapi berkas perkara tidak dilengkapi sesuai dengan petunjuk JPU selama lebih dari ketentuan yang diatur dalam peraturan bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Ham. Sehingga menjadi celah hukum bagi tersangka untuk mengajukan gugatan. **Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa proses bisnis penyidikan selama ini terdapat kelemahan yang perlu diatensi,** yaitu penyidik tidak menjalani petunjuk dari peraturan bersama seperti tersebut di atas. Penyidik tidak menjalani standar operasional prosedur dengan baik, sehingga ditinjau dari Perkap 4 Tahun 2021 tentang manajemen risiko lingkungan

Polri. Hal ini menyangkut sistem dan metode yang dilakukan dalam penyidikan.

- f. **Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelesaian masalah hukum adalah,** di samping peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari fungsi hukum juga melakukan peningkatan kemampuan dari para penyelidik dan penyidik dalam memahami dan mengetahui perkembangan dari aturan-aturan yang berhubungan teknis penyidikan. Peningkatan kemampuan tersebut didukung pula dengan optimalisasi dalam pengawasan penyidikan dan sertifikasi terhadap penyidik. Fungsi Bidkum selaku kuasa hukum institusi juga melakukan analisa dan evaluasi terhadap gugatan peradilan yang kalah, untuk dijadikan atensi bagi penyidik agar tetap menjaga kualitas profesi yang menjadi tanggung jawabnya. **Poin penting lainnya** adalah fungsi Bidkum selaku kuasa hukum tergugat, tentunya dalam melakukan pembelaan diperlukan adanya kerja sama dan kolaborasi dengan satker tergugat, dalam hal ini adalah penyidik yang menangani perkara. Apabila penyidik tidak terbuka dengan kuasa hukum, maka akan terjadi pertentangan dalam proses peradilan, sehingga berujung pada kekalahan. **Terakhir** adalah merevitalisasi terhadap peta manajemen risiko dari penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana.
- g. Berdasarkan hasil capaian kinerja Polda Lampung tahun 2022 ini, terhadap komponen penyusun indikator kinerja baik utama maupun pendukung, yang realisasi kinerja dan performa kinerja yang mengalami polarisasi meningkat maupun menurun, harus selalu waspada, jalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi, sinkronisasi, revitalisasi organisasi dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi pada satuan kerja masing-masing. mengingat perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang.
- h. Selanjutnya menyangkut mekanisme pencapaian kinerja satuan kerja di lingkungan Polda Lampung, akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga memacu dalam pencapaian target kinerja, melalui upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi dengan kegiatan asistensi, sosialisasi, bimbingan teknis, rapat teknis, koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan harmonisasi proses bisnis organisasi dan hubungan tata cara kerja baik pada satker, subsatker maupun hubungan personal antar personel, sehingga terjalin *networking*

dan *framework* yang satu pemahaman dalam mencapai visi dan misi Polda Lampung, dengan merealisasikan program, kebijakan dan strategi menjadi kegiatan Satker. Mendorong setiap satker pelaksana program untuk memahami dan mengaktualisasikan tugas, fungsi dan peran dalam organisasi, sehingga setiap tahun anggaran target indikator kinerja dapat dicapai secara optimal.

2. Saran

- a. Berdasarkan hasil kinerja tahun ke-tiga Renstra 2020-2024 ini, Polda Lampung harus berupaya mempertajam implementasi dari visi Polri, yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan tertib, secara umum berupaya melaksanakan tupoksi sesuai dengan amanat undang-undang Kepolisian, di samping itu tetap konsisten berupaya meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat. Secara khusus berupaya menjadi kebanggaan masyarakat provinsi Lampung, dengan lebih fokus pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilandasi gerakan revolusi mental, melalui kebijakan internal, bahwa semua personel Polda Lampung dalam melaksanakan tugasnya mampu memerankan fungsi kepolisian dengan mengembangkan arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyi Sigit Prabowo, S.IK., M.Si transformasi menuju Polri yang presisi (prediktif, responsibilitas dan transparan berkeadilan).
- b. Selanjutnya dalam mengimplementasikan agenda transformasi menuju Polri yang Presisi, Polda Lampung telah, sedang dan akan mengimplementasikannya sesuai dengan petunjuk dan arahan serta tanggung jawab kewenangan lokalitas kewilayahan, dengan dilandasi semangat kerja sama antar satuan fungsi internal Polda Lampung dan pembina fungsi pada satuan kerja di Mabes Polri.
- c. Khusus dalam teknis terhadap pemantauan capaian kinerja, Polda Lampung beserta seluruh satuan kerja secara berkelanjutan, setiap triwulan melaksanakan kegiatan diseminasi capaian kinerja, guna mengetahui dan mengevaluasi dari realisasi dan capaian target kinerja tahun anggaran berjalan. Di samping itu meningkatkan jalur koordinasi dan konsolidasi dalam mengimplementasikan kebijakan Polri sebagai fokus bersama dari semua satuan kerja di Polda Lampung, berkomitmen melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polda Lampung T.A. 2022 disusun, kiranya dapat digunakan Pimpinan Polri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya, serta bagi para Kasatker agar dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Strategis 2020-2024, khususnya pada Rencana Kerja T.A. 2023.

Lampung Selatan, Februari 2023
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. AKHMAD WIYAGUS, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
POLDA LAMPUNG T.A. 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

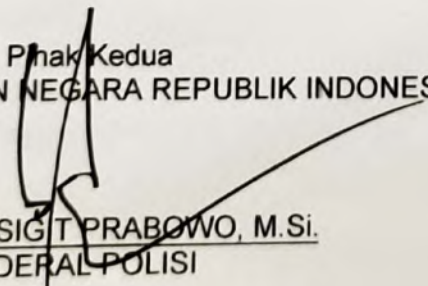
Nama : Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
Pangkat : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
Pangkat : JENDERAL POLISI
Jabatan : KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua :

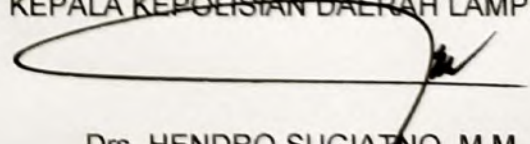
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Pihak Pertama
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
0.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban.	3,3
1.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	73
2.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	68
3.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas SDM.	75
4.	Modernisasi pelayanan kepolisian yang berkelanjutan.	a. Indeks dukungan sarpras dan peralatan.	70,5
		b. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik.	2,3
		c. Nilai pengelolaan informasi dan pemberitaan.	52
5.	Manajemen pengawasan kepolisian yang akuntabel.	a. Indeks penguatan implementasi kebijakan.	73
		b. Indeks tatakelola Kepolisian.	5,3
		c. Indeks kepuasan layanan Kepolisian.	81
		d. Persentase penanganan pengaduan masyarakat.	67%
		e. Persentase penyelesaian pelanggaran personel.	83%
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum.	91,6%

g. Nilai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		g. Nilai kinerja anggaran.	76

Program

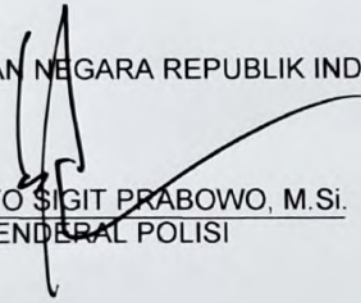
1. Profesionalisme SDM Polri
2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
3. Modernisasi Alamatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Dukungan Manajemen

Anggaran

- Rp. 37.315.080.000,-
 Rp. 107.737.924.000,-
 Rp. 169.745.002.000,-
 Rp. 297.300.914.000,-
 Rp. 664.271.316.000,-

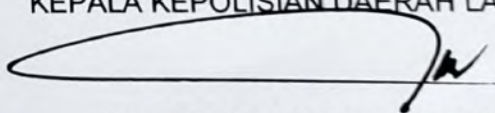
Keterangan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
 JENDERAL POLISI

Bandar Lampung, 10 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kep Kapolda Lampung Nomor :
Kep/467/VI/2020/ tanggal 30 Juni 2020
Perihal Penetapan IKU Polda Lampung
Tahun 2020-2024



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
Nomor : Kep /467/VI/2020

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Polri, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005, tentang Grand Strategis Polri 2005 – 2025;
5. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1132/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Polri Tahun 2020-2024.
- Memperhatikan: Surat Perintah Kapolda Lampung Nomor : Sprin/1095/VI/ HUK.6.6./2019 tanggal, 21 Juni 2019 susunan tim kerja penyusunan Renja Polda Lampung Tahun 2020 dan Renstra Polda Lampung Tahun 2020-2024 dan penyusunan IKU Polda Lampung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG.

1. penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polda Lampung tahun 2020-2024;
2. indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis, Rencana Kerja dan anggaran, Penetapan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja Polda Lampung, sebagaimana amanat dari Keputusan Kapolda Lampung Nomor: Kep/699/XII/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Polda Lampung;
3. dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepolisian Daerah Lampung Nomor : Kep/698/XII/2097 tanggal 03 Desember 2019, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
pada tanggal: 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG



Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Lampung.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

1. Nama Unit Organisasi / Satker : Kepolisian Daerah Lampung
2. Tugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
 - d. pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person* (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya;
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- f. pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/*Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1.	Keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.	Indeks keamanan dan ketertiban	Seluruh program anggaran yang menjadi tanggung jawab Polda Lampung	Seluruh kegiatan Polda Lampung yang berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban di daerah hukum	Seluruh Satker di Polda Lampung
2.	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang partisipatif.	Indeks pemeliharaan kamtibmas.	04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3133-Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas	Ditlantas dan Polres
				5076-Pembinaan Potensi Keamanan	Ditbinmas dan Polres
				3130-Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	Ditsamapta dan Polres
				3134-Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	Roops dan Satker pelaksana operasi kepolisian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3131-Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital	Ditpamobvit dan Polres
				5087-Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri	Satbrimob
				3114- Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik	- Ditintelkam dan Polres
				3115-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi	- Ditintelkam dan Polres
				3116-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya	- Ditintelkam dan Polres
				3117-Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang	- Ditintelkam dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				Keamanan Negara	
				3112-Analisis Keamanan	- Ditintelkam dan Polres
				3120-Kerjasama Keamanan dan Ketertiban K/L	- Roops dan Polres
3.	Penegakan hukum yang berkeadilan.	Indeks penegakan hukum.	11-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3140-Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3142-Penindakan Tindak Pidana Umum	- Ditreskrim, Ditlant, Ditpolairud dan Polres
				3143-Penindakan Tindak Pidana Terorisme	- Ditreskrim, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3144-Penindakan Tindak Pidana Narkoba	- Ditresnarkoba dan Polres
				3145-Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	- Ditreskrimsus, dan Polres
				3146-Penindakan Tindak Pidana Korupsi	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5082-Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				5083-Penindakan Tindak Pidana Tertentu	- Ditreskrimsus, dan Polres
				5086-Pengawasan Penyidikan	- Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba dan Polres
				3151-Penindakan Tindak Pidana siber	- Ditreskrimsus, dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
4.	Kebijakan fungsional kepolisian yang integratif	Indeks penguatan implementasi kebijakan.	01-Program Dukungan Manajemen	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan satker pembina fungsi kepolisian terkait
5.	Pengelolaan tupoksi organisasi yang efektif.	Indeks Tata kelola Kepolisian (ITK).	01-Program Dukungan Manajemen	5053-Reformasi Birokrasi Polri	- Rorena, dan Polres
				3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres
				3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres
				3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres
			02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				5059-Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	- Rolog dan Polres
			03-Program Profesionalisme	3105-Peyelenggaraan Administrasi	- Ro SDM dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			SDM Polri	Perawatan Pegawai Polri	
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.	- Ditintelkam, Ditbinmas, Dilantas, Ditsamapta dan Polres
				5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- Roops
			05-Program Penyidikan Tindak Pidana	3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	- Pembina fungsi Reskrim dan Polres
		Indeks Kepuasan layanan kepolisian.	01-Program Dukungan Manajemen	5053-Reformasi Birokrasi Polri	- Rorena dan Polres
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan	5051-Penyusunan Kebijakan Polri	- Rorena dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
			Ketertiban Masyarakat		
			01-Program Dukungan Manajemen	3072-Pelayanan Kesehatan Polri	- Rumkit bhayangkara
			04-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	5080-Pengendalian Operasi Kepolisian	- SPKT dan Polres
				0002 Dukungan Manajemen Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	- Dintelkam, Ditlantast, Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Diresnarkoba
			03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM
6.	Pengendalian dan pengawasan kinerja yang antisipatif.	a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	01-Program Dukungan Manajemen	3091-Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan	- Itwasda dan Polres
		b. Persentase penyelesaian pelanggaran personel	01-Program Dukungan Manajemen	3090-Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri	- Bidpropam dan Polres
				3088-Pertanggung jawaban Profesi	- Bidpropam dan Polres

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				3089-Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	- Bidpropam dan Polres
		c. Persentase penyelesaian masalah hukum	01-Program Dukungan Manajemen	3154-Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum	- Bidkum dan Polres
				3155-Penyusunan dan Penyuluhan Hukum	- Bidkum dan Polres
7.	Sumber daya manusia yang profesional.	Indeks profesionalitas SDM.	03-Program Profesionalisme SDM Polri	3107-Pengendalian Pegawai Polri	- Ro SDM
				3108-Pembinaan Karier Personel Polri	- Ro SDM
				3105-Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	- Ro SDM
				3110-Pelayanan Psikologi Anggota Polri	- Ro SDM
				3100-Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
				5069-Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri	- SPN
8.	Modernisasi sarpras dan peralatan kepolisian yang berkelanjutan.	indeks dukungan sarpras dan peralatan.	02-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	5062-Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	- Rolog dan Polres
				3084-Pengembangan Peralatan Polri	- Rolog dan satker
9.	Teknologi komunikasi dan informasi kepolisian yang responsif.	a. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	01-Program Dukungan Manajemen	3071-Penyelenggaraan Teknologi Informasi	- Bid TIK dan satker
				5052-Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	- Rorena dan Rorena
		b. Nilai pengelolaan informasi pemberitaan.	01-Program Dukungan Manajemen	3070-Penerangan Masyarakat	- Bidhumas
				5056-Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	- Bidhumas

N	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	SATKER PENGEMBAN PROGRAM
1	2	3	4	5	6
10.	Terkelolanya anggaran yang akuntabel.	Nilai kinerja anggaran.	01-Program Dukungan Manajemen	5054-Manajemen Anggaran	- Rorena

Ditetapkan di: Bandar Lampung
 pada tanggal: 30 Juni 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG


 Drs. PURWADI ARIANTO, M.Si.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Penghargaan dan dukungan kepada
Polda Lampung T.A. 2022

DAFTAR PIAGAM PENGHARGAAN KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.

NO	URAIAN SINGKAT PENGHARGAAN	PEJABAT PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	PIAGAM PENGHARGAAN DARI KEPALA BP2MI KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u> ATAS PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG.	<i>Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BENNY RHAMDANI)</i>	NOVEMBER 2022
2.	PIAGAM PENGHARGAAN DARI KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH LAMPUNG KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u> ATAS PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DAN/ATAU MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU PADA AKTA AUTENTIK DAN/ATAU PENYEROBOTAN TANAH MILIK KWARDA GERAKAN PRAMUKA LAMPUNG YANG BERADA DI DESA SUKADANA TIMUR KEC. SUKADANA DAN DESA RAJABASA LAMA II KEC. LABUHAN RATU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.	<i>Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Lampung (Hj. CHUSNUNIA, M.Si., M.Kn., Ph.D.)</i>	23 NOVEMBER 2022
3.	ANUGERAH REKSA BANDHA DARI KAKANWIL DJKN LAMPUNG DAN BENGKULU KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u> , TERBAIK 1 UNTUK KATEGORI KOLABORASI PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN KPKNL BANDAR LAMPUNG.	<i>Kakanwil Djkn Lampung Dan Bengkulu (DUDUNG RUDI HENDRATNA)</i>	05 DESEMBER 2022
4.	PIAGAM PENGHARGAAN DARI PIMPINAN UMUM SKH PILAR KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u> ATAS KATEGORI PERWIRA TINGGI POLRI TELADAN TAHUN 2022.	<i>PIMPINAN UMUM SURAT KABAR HARIAN PILAR (MICO PERIYANDHO)</i>	16 DESEMBER 2022
5.	PIAGAM PENGHARGAAN DARI LE GRAND CHANCELIER KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u>	<i>GENCIAL THIERRY MARIS METINKOE</i>	05 JULI 2022
6.	PIAGAM PENGHARGAAN DARI HOEGENG AWARDS 2022 KEPADA KAPOLDA LAMPUNG IRJEN POL <u>DR. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M.</u> SEBAGAI POLISI BERINTEGRITAS	<i>KAPOLRI JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.</i>	TAHUN 2022



BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

IRJEN. POL. Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., M.Si., M.M

atas Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
di Wilayah Hukum Polda Lampung

Kepala BP2MI



BENNY RHAMDANI



GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH LAMPUNG



Piagam Penghargaan

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
diberikan kepada :

Irjen Pol. Dr. AKHMAD WYAGUS, S.IK.M.Si
(KAPOLDA LAMPUNG)

Atas proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau menempatkan keterangan palsu pada akta autentik dan/atau penyerobotan tanah milik Kwarda Gerakan Pramuka Lampung yang berada di Desa Sukadana Timur Kec. Sukadana dan Desa Rajabasa Lama II Kec. Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Bandar Lampung, 23 November 2022



Gerakan Pramuka
Kwartir Daerah Lampung
Ketua,

HJ. Chusnunia, M.Si., M.Kn., Ph.D.



DJKN

ANUGERAH

Reksa Bandha

Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu

Dengan bangga dipersembahkan kepada
Kepolisian Daerah Lampung

Terbaik 1
Untuk Kategori
Kolaborasi Penilaian Barang Milik Negara
Dengan KPKNL Bandar Lampung

Bandar Lampung, 05 Desember 2022

Kantor Wilayah DJKN
Lampung dan Bengkulu

Dudung Rudi Hendratna

Piagam Penghargaan

Nomor: 430 / XII / HP / B / 2022



Dengan Yakin dan Bangga Memberikan Penghargaan

Kepada:

Bpk. Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M

Kapolda Lampung

Kategori:

Perwira Tinggi POLRI Teladan Tahun 2022

Dalam Acara

Gebyar HUT Ke 10 Surat Kabar Harian Pilar

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

*"Semoga Penghargaan ini Menjadi Penyemangat
Untuk Terus Berkarya Yang Bermanfaat
Bagi Masyarakat Banyak"*

Mico Periyandho
Pimpinan Umum



REPUBLIQUE



CENTRAFRICAINE

ORDRE NATIONAL DE LA RECONNAISSANCE CENTRAFRICAINE



Le Grand Chancelier de

l'Ordre National du Mérite Centrafricain

Certifie que par décret

n° 22.085 du 04 Avril 2022

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CHEF DE L'ETAT

GRAND MAITRE DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE CENTRAFRICAIN

A nommé *Police Inspector General - Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.*

Chevalier

de l'Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine

SCELLE ET ENREGISTRE SOUS N°40 641
LE SECRETAIRE DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL
DU MERITE CENTRAFRICAIN,

Paul Tomic Jaroghin

FAIT A BANGUI LE 05 JUIL 2022,

LE GRAND CHANCELIER



Thierry Marie METINKOE

General Thierry Marie METINKOE

PENGHARGAAN



PRESENTED BY
detikcom

Diberikan Kepada

Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.

Sebagai **Polisi Berintegritas**
HOEGENG AWARDS 2022

JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG**

📍 Jl. Terusan Ryacudu Jati Agung 35365

✉ birorenalampung@gmail.com

📷 @rorenapoldalampung